



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA DALAM MENGHADAPI
ANCAMAN ASIMETRIS BIDANG EKONOMI
(STUDI NEO-IMPERIALISME CHINA DALAM KERJA SAMA
BELT AND ROAD INITIATIVE)**

TESIS




**SITI MAWADDAH PALAMANI
120190102013**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**






**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

**BOGOR
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

<p>Nama : Siti Mawaddah Palamani NIM : 120190102013 Program Studi : Peperangan Asimetris Fakultas : Strategi Pertahanan Judul Proposal Tesis : Strategi Pertahanan Negara Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi (Studi Neo-Imperialisme China dalam Kerja sama <i>Belt and Road Initiative</i>)</p>	
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Drs. Surryanto Djoko Waluyo, M.H., M.M., CIQaR Kolonel (Purn) Tanggal 8 Februari 2021</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Dr. Yusuf Ali, S.E, M.M, CIQaR Kolonel Cba NRP. 33586 Tanggal 8 Februari 2021</p>
<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan</p>  <p>Dr. Deni D.A.R, S.Sos., M.Si (Han) Mayor Jendral TNI Tanggal Februari 2021</p>	

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama	: Siti Mawaddah Palamani		
NIM	: 120190102013		
Program Studi	: Peperangan Asimetris		
Fakultas	: Strategi Pertahanan		
Judul Proposal Tesis	: Strategi Pertahanan Negara Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi (Studi Neo-Imperialisme China dalam Kerja Sama <i>Belt and Road Initiative</i>)		
No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I: Kolonel (Purn) Dr. Drs. Surryanto Djoko Waluyo, M.H., M.M., CIQaR		16/02/2021
2.	Pembimbing II: Kolonel Cba Dr. Yusuf Ali, S.E, M.M, CIQaR		15/02/2021
3.	Reviewer I : Brigjen TNI (Purn) Dr. Moch Afifuddin, S.E., M.M., MSi (Han)., CIQnR		16/02/2021
4.	Reviewer II : Letkol Inf Dr. Triyoga Budi P. M.Si		15/02/2021
5.	Reviewer III: Dr. F.G Cempaka Timur S.IP., M.Si (Han)		15/02/2021

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab tau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan kecuali yang secara tertulis diajukan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 15 Februari 2021



Siti Mawaddah Palamani

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penelitian tesis dengan judul “Strategi Pertahanan Negara Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi (Studi Neo-Imperialisme China dalam Kerja Sama *Belt and Road Initiatives*)” ini telah dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian S.T., M.Sc., DESD., CiQnR., CIQaR., IPU selaku rektor Universitas Pertahanan.
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Deni D.A.R, S.Sos., M.Si (Han) selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.
3. Letkol Laut (K) Dr. Dr. Anwar Kurniadi, SKp., M.Kep. selaku Sesprodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
4. Kolonel (Purn) Dr. Drs. Surryanto Djoko Waluyo, M.H., M.M., selaku Pembimbing I
5. Kolonel Cba Dr. Yusuf Ali, S.E, M.M, CIQaR selaku Pembimbing II
6. Para narasumber yang telah bersedia memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mensukseskan penelitian ini.
7. Orang tua, dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil pada peneliti.
8. Rekan-rekan Program Studi Peperangan Asimetris, Cohort 8, Universitas Pertahanan.

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Harapan peneliti, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi stakeholder terkait dalam upaya memajukan bangsa dan negara Indonesia kearah yang lebih baik sehingga cita-cita nasional dapat terwujud dengan sempurna.

Bogor, 15 Februari 2021

Siti Mawaddah Palamani

ABSTRAK

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN ASIMETRIS BIDANG EKONOMI (STUDI NEO-IMPERIALISME CHINA DALAM KERJA SAMA *BELT AND ROAD INITIATIVES*)

SITI MAWADDAH PALAMANI

Kerjasama *Belt and Road Initiative (BRI)* yang berasal dari negara China menjadi sebuah polemik dalam kerjasama ekonomi internasional. Dampak yang dihasilkan dari kerja sama ekonomi BRI dari negara China menjadi salah satu ancaman non-militer bagi negara Indonesia yakni dalam bidang ekonomi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kerjasama BRI dapat menjadi ancaman bagi Indonesia serta bagaimana strategi pertahanan negara Indonesia untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerja sama BRI oleh negara China yang dapat menjadi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi di Indonesia serta menganalisis strategi pertahanan negara Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut. Metode dan desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Wawancara dilakukan dengan pejabat dari Kementerian Pertahanan, Universitas Pertahanan, dan *Indonesia Research Development International (IRDI)*. Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari ancaman yang terdapat dalam kerja sama BRI bukan hanya pada bidang ekonomi namun juga pada sektor pertahanan. Dibutuhkan strategi yang mampu menangkal ancaman tersebut, dan pemerintah Indonesia harus memperhatikan *contingency plan* jika terjadi *worst case* dalam pelaksanaan kerja sama ini. Peneliti memberikan rekomendasi yaitu diperlukan adanya pengawasan dalam pelaksanaan kerja sama BRI di Indonesia, serta pengkajian ulang mengenai kerja sama ekonomi internasional.

Kata Kunci : *Ancaman Non-militer, Belt and Road Initiative, Kerja sama Ekonomi, Neo-Imperialisme*

ABSTRACT

DEFENSE STRATEGY OF INDONESIA TO OVERCOME THE ASYMETRIC THREAT IN ECONOMIC ASPECT (STUDY OF CHINA'S NEO-IMPERIALISM IN THE BELT AND ROAD INITIATIVES)

SITI MAWADDAH PALAMANI

The Belt and Road Initiative (BRI) from China seems like to have quite a polemic in the international cooperation atmosphere. The impact that comes from the China's BRI cooperation has become one of the non-military threats to Indonesia, especially in the economic area. The purpose of this research is to analyze the BRI cooperation from China which becomes an asymmetric threat Indonesian economic situation and also analyze the strategy of the Indonesian government to counter the threat as the impact of the BRI. This research use Qualitative Research as the method of the research, along with Analysis Descriptive design. Interviews conduct with officials from the Ministry of Defense, Indonesia Defense University, and Indonesia Research Development International (IRDI). The result of this research is the impacts of the threat that comes within the BRI cooperation are both on the economic and defense sector. The Indonesian government shall need a good strategy to overcome these threats. And also give more attention to the contingency plan, just in case if the worst case happens in the BRI cooperation in Indonesia. Recommendations included in this research, which suggest more supervision in the implementation of BRI in Indonesia, enhancing international and diplomatic relations with other countries than China, along with renegotiation about the international economic cooperation in Indonesia.

Keywords : Non-military Threats, Belt and Road Initiative, Economic Cooperation, Neo-Imperialism

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2. Manfaat Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Strategi.....	13
2.1.2 Konsep Pertahanan Negara.....	15

2.1.3 Teori Ancaman.....	19
2.1.4 Teori Neo-imperialisme.....	24
2.1.5 Teori Peperangan Asimetris.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	49
3.1 Metode dan Desain Penelitian.....	49
3.1.1 Metode Penelitian.....	49
3.1.2 Desain Penelitian.....	50
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	51
3.2.1 Tempat Penelitian.....	51
3.2.2. Waktu Penelitian.....	51
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	56
3.6 Teknik Analisis Data.....	59
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
4.1.1 Geoekonomi China dan Indonesia di Kawasan Asia.....	61
4.1.2 Timeline Kerja sama <i>Belt and Road Initiative (BRI)</i>	72
4.1.3 Kerja sama <i>Belt and Road Initiative (BRI)</i> di Indonesia.....	79
4.2 Hasil Penelitian.....	85

4.2.1 Ancaman dalam Kerja sama <i>Belt and Road Initiative (BRI)</i> di Indonesia.....	85
4.2.2 Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi dalam Kerja sama <i>Belt and Road Initiative (BRI)</i>	101
4.3 Pembahasan.....	110
4.3.1 Analisis Ancaman Asimetris dalam Kerja sama <i>Belt and Road Initiative (BRI)</i> di Indonesia.....	111
4.3.2 Analisis Strategi Pertahanan Negara Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi dalam Kerja sama <i>Belt and Road Initiative (BRI)</i>	123
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	130
5.1 Kesimpulan.....	130
5.2 Rekomendasi.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN.....	141
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	143
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	144
Lampiran 3 MOU <i>Belt and Road Initiative</i> China – Indonesia.....	147
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Persebaran Proyek Kerja sama <i>Belt and Road Initiatives</i>	3
Gambar 2.1 Empat Elemen Utama dalam Peperangan Asimetris.....	32
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	46
Gambar 3.1 Bagan Analisis Data Interaktif.....	59
Gambar 4.1 Perkembangan Kerja sama <i>Belt and Road Initiative</i> tahun 2013-2019.....	74
Gambar 4.2 Neraca Perdagangan Indonesia terhadap China periode tahun 2015-2020.....	84
Gambar 4.3 Proposal 30 Proyek untuk <i>Regional Comprehensive Economic Developments Corridors BRI-GMF</i>	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	52
Tabel 3.2 Data Informan.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

China merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia dan terbesar ketiga di dunia, setelah Rusia dan Kanada. China yang populasinya lebih dari 1,4 miliar manusia, memiliki konsep "*Chinese Dream*" yang berkembang di awal abad ke-21. Konsep ini memngambil fokus dalam bidang transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang radikal dari masyarakat China yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, munculnya kelas sosial dan ekonomi baru, dan identitas kolektif. (Korwa, 2019)

Penerapan *Chinese Dream* ini sejalan dengan konsep *Tianxia (all under heaven)* yang diyakini oleh bangsa China. Zhao Tingyang mengatakan bahwa '*all under heaven*' adalah sebuah konsep terbuka yang memungkinkan untuk sistem dunia. *Chinese Dream* dan *Tianxia* yang diyakini dan menjadi perspektif China dalam memandang dunia internasional inilah yang membawanya dalam suatu ambisi untuk dapat menjadi negara yang besar dan jika perlu, menjadi hegemoni dunia. Dominasi China di LCS serta proyek investasi terbesar China yaitu *Belt and Road Initiative (BRI)* menjadi bukti atas relevansi dari *Chinese Dream* di kawasan Laut China Selatan.

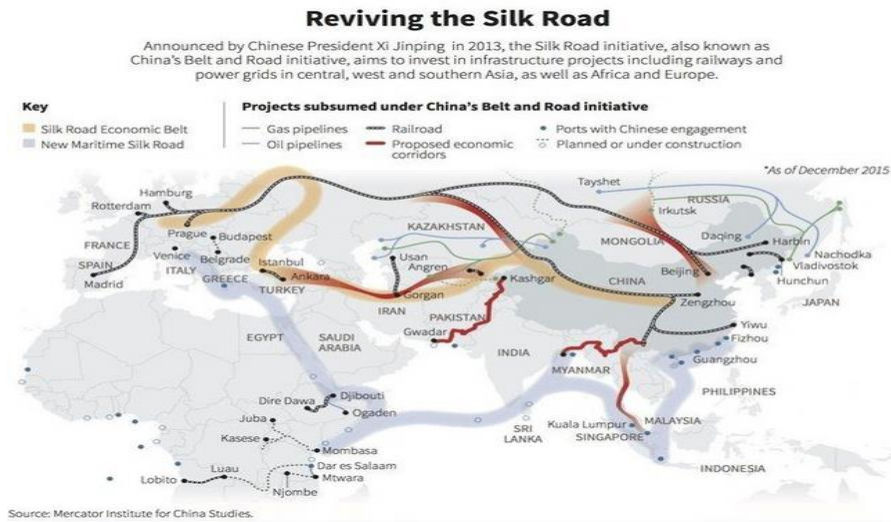
Hal ini tentu saja dapat menjadi ancaman bagi negara lain, khususnya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan sekitar 2,7 juta km per segi atau setara dengan 70% total luas wilayah negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk dapat merumuskan strategi pertahanan dan

kemanaannya dengan mengacu pada geopolitik dan geostrategis Indonesia. (Kurniawan, 2016)

Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 mengumumkan rencana untuk membangun Jalur Ekonomi Jalur Sutera dan Jalur Sutera Maritim Abad 21, yang kemudian dikenal sebagai *Belt-Road Initiative (BRI)* (Kurniawan, 2016). Proyek BRI ini diarahkan untuk mendorong konektivitas yang lebih besar, aliran ekonomi, pertumbuhan kesempatan kerja, investasi, konsumsi, pertukaran budaya dan semangat kerja sama regional antara Asia (termasuk Indonesia), Eropa dan Afrika dengan menciptakan rute perdagangan yang dibangun bersama meniru Jalan Sutra kuno.

Skala BRI digambarkan oleh 4,4 miliar orang dan produk domestik bruto kumulatif (PDB) sekitar US \$ 21 triliun yang akan dicakupnya. Rancangan jalur sutera dan BRI ini terdiri dari enam koridor ekonomi utama, yaitu Jembatan Daratan Eurasia Baru, China – Mongolia – Rusia, China – Asia Tengah – Asia Barat, Semenanjung Indo-China, China – Pakistan dan Bangladesh – China – India – Myanmar (Das, 2017). Dengan mengamati koridor jalur perdagangan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan utama BRI adalah untuk meningkatkan konektivitas antara China dan negara-negara kawasan Eurasia dengan mengembangkan infrastruktur dan kerja sama perdagangan dalam bentuk zona perdagangan bebas (Lee, et al., 2015).

Lima tujuan utama atau prioritas kerja sama juga telah dipromosikan oleh pemerintah China (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China, 2015) sebagai dasar BRI untuk berjalan secara efektif adalah koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan obligasi antar masyarakat.



Gambar 1.1 Peta Persebaran Proyek Kerja sama *Belt and Road Initiatives*

Sumber : *Mercator Institute for China Studies*, 2017

Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan China, skema kerja sama yang ditawarkan dalam kerja sama BRI ini akan memainkan peran penting. China dan Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia. Pada 2016, populasi China adalah 1,37 miliar. Sementara itu, populasi Indonesia adalah 261 juta (Bank Dunia, 2016). Oleh karena itu, hubungan China dan Indonesia memiliki banyak potensi, tidak hanya di sektor bisnis dan ekonomi tetapi juga di bidang lain, termasuk teknologi, pendidikan, sosial dan budaya.

Kerja sama BRI di Indonesia dimulai pada tanggal 27 April 2019 di Beijing, ketika pemerintah Indonesia menandatangani 23 *Memorandum of Understanding* dalam agenda acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II *Belt Road Initiative* di Beijing. Kontrak kerja sama ini dilaksanakan secara *Business to Business* (B to B) antar perusahaan Indonesia dan China yang bekerja sama dalam proyek ini (CNBC Indonesia.com, 2019)..

Beberapa kerja sama BRI Indonesia-China diantaranya adalah MRT East-West Line, jalur kereta proyek 100 km yang akan menghubungkan tiga provinsi, yaitu Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Proyek lainnya adalah

Kereta Api Sulawesi yang akan menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara dengan kereta api sepanjang 1.513 km. Selain itu, ada juga investasi pariwisata di Manado, Sulawesi Utara, dan China juga telah berinvestasi dalam proyek Kereta Api Berkecepatan Tinggi Jakarta-Bandung (CNBC Indonesia.com, 2019).

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk 'mengawinkan' ide Poros Maritim atau *Global Maritime Fulcrum (GMF)* dengan proyek *Belt and Road Initiative (BRI)*. Sekilas, BRI dan GMF terlihat sangat saling melengkapi. Namun di sisi lain, sengketa maritim yang sering terjadi di wilayah Laut China Selatan dan terkait hak penangkapan ikan di dekat Kepulauan Natuna berpotensi menimbulkan tantangan yang membahayakan hubungan Indonesia-China dalam beberapa tahun terakhir (FES Asia.org, 2020).

Dalam perjalanannya, proyek BRI ini mengalami kendala di beberapa negara. Contoh saja di negara Sri Lanka, setelah tidak mampu membayar hutang yang menjadi bentuk investasi dari China kepada negaranya, akhirnya pemerintah Sri Lanka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US\$1,1 triliun. Sri Lanka mengalami kegagalan pembayaran hutang karena hutangnya mencapai 77% dari PDB nya (Tagar.id, 2019) Selain itu, Nigeria yang menerima investasi dengan model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang oleh China, dirugikan dengan persyaratan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Nigeria (Tempo.co, 2018).

Tidak hanya Sri Lanka dan Nigeria, Pakistan pun turut melepaskan Gwadar Port yang bernilai sekitar US \$ 46 Miliar setelah tidak mampu membayar hutangnya terhadap negara China. Zimbabwe juga memiliki utang US\$ 40 juta kepada China. Akibatnya Zimbabwe harus mengikuti

keinginan China mengganti mata uangnya menjadi yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Mata uang yuan di Zimbabwe mulai berlaku pada 1 Januari 2016, setelah pemerintah Zimbabwe mendeklarasikan tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 2015 (Tempo.co, 2018).

Sementara itu, menurut *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) penerapan kerja sama BRI di Indonesia telah menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan kerja sama tersebut (Damuri, 2019). Hal tersebut mencakup tentang pengelolaan tenaga kerja asing dari china, kemampuan membayar hutang / investasi BRI, kualitas dan kapasitas teknologi, transfer teknologi dan dampak lingkungan, hambatan kebijakan fiskal dan *trade balance*, dan keterlibatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam proyek BRI ini.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB relatif rendah pada yaitu berkisar pada angka 29%, sedangkan tingkat defisit fiskal dapat dikendalikan di bawah 3% dan terkait pinjaman dari China, saat ini total pinjaman dari negara tersebut relatif kecil dan hanya 4,5% dari total utang Indonesia (Kompas.com, 2021). Namun, hal yang patut diwaspadai adalah apakah Indonesia mampu untuk membayar hutang tersebut dalam tempo dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Political Counselor di Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Indonesia, Qiu Xinli, dalam peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia – China mengatakan bahwa kedua pihak akan mendiskusikan untuk menyelenggarakan berbagai acara antara lain Seminar Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik RRC-RI. Tujuannya untuk menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan hubungan antara kedua negara. Sementara di bidang kerja sama pragmatis, pihak China bersedia bekerja

sama dengan pihak Indonesia untuk menindaklanjuti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Koridor Ekonomi Komprehensif dan sebagainya (Media Indonesia.com, 2020).

Peluang kerja sama dengan China ini terlihat dari kontribusi China yang semakin besar dan nyata. Bila dilihat dari *Foreign Direct Investment* (FDI) selama 2015–triwulan III 2020, China menempati posisi ketiga terbesar dengan nilai 17,29 miliar dollar AS. Peningkatan investasi China di Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak bisa dilepaskan dari proyek kerja sama BRI. Indonesia melihat munculnya peluang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya sekitar Rp 4.796 triliun dengan adanya kerjasama BRI di Indonesia (Kompas.com, 2021).

Skema *business to business (B to B)* ini menjadi tameng bagi pemerintah Indonesia dalam menghindari jebakan hutang investasi China. Hal ini dikarenakan, utang tersebut akan dikategorikan sebagai utang swasta dan tidak membebani pemerintah sebagai utang negara. Hal ini tergambar dalam pernyataan yang diberikan oleh Direktur PT Kereta Cepat Indonesia – China Hanggoro Budi yaitu "Pemerintah tidak ingin kereta cepat membebani utang negara dan rakyat. Untuk itu didorong skema *b to b* yang diharapkan swasta bisa masuk, bisa menjaga proyek dan semua dapat manfaat." (Tempo.co, 2016).

Pemerintah Indonesia yang saat ini tengah berupaya mendorong penggunaan skema *business-to-business* untuk proyek-proyek di bawah BRI yang tentu saja tidak mudah. Apabila perusahaan tersebut tidak mampu membayar hutang dalam kerjasama tersebut, maka Bank Indonesia dan pemerintah harus turun langsung untuk membantu menyelesaikan masalah utang luar negeri swasta. Contohnya seperti krisis ekonomi yang di alami Indonesia pada tahun 1998 yang menyebabkan aktivitas ekonomi

mengalami penurunan secara dramatis sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,4% yoy (*year on year*). Pengalaman krisis ekonomi tahun 1997-1998 tersebut menjadi pelajaran berharga dalam pengelolaan utang luar negeri swasta (Ispryahadi, 2014).

Terdapat setiap kemungkinan dalam setiap hal, termasuk dalam kerja sama BRI ini. Dibutuhkan *contingency plan* apabila pada suatu masa Indonesia tidak mampu melunasi hutang atas investasi pembangunan infrastruktur tersebut. Karena meskipun skema *B to B* dilaksanakan, tetapi dampak yang akan dihasilkan tentunya tidak hanya akan mempengaruhi perusahaan terkait, namun juga stabilitas perekonomian Indonesia secara umum dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terdampak. Sejauh ini, skema *Business to Business* adalah satu-satunya strategi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah wajib menyusun suatu strategi pertahanan negara Indonesia untuk mempertahankan stabilitas pertahanan dan perekonomiannya. Pertahanan negara sendiri merupakan upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka membangun dan mempersiapkan kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman sistem pertahanan semesta (UU No 3 th 2002). Usaha pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30 Bab XII UUD 1945).

Sementara itu, defenisi ancaman menurut Undang Undang no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah “Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang

dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa” (UU No. 34 th 2004).

Upaya yang dilakukan oleh China melalui kerja sama BRI ini memiliki kaitan yang erat dengan perang asimetris. Jakarta Global Future Institute (GFI) Forum dalam artikel berjudul “*Mengenal Perang Asimetris : Sifat, Bentuk, Pola, dan Sumber*” merumuskan tujuan perang asimetris tidak hanya dalam satu aspek tetapi juga dalam berbagai aspek. Ada tiga target untuk perang asimetris, yaitu (1) mengalihkan sistem suatu negara untuk kepentingan kolonialisme, (2) melemahkan ideologi dan mengubah pola pikir masyarakatnya, dan (3) menghancurkan keamanan pangan dan keamanan energi, kemudian menciptakan saling ketergantungan pada negara-negara target untuk keamanan pangan dan energi (The Global Review.com, 2017).

Bangkitnya China sebagai kekuatan dominan dalam politik dunia mempraktikkan bentuk neo-imperialisme melalui penggunaan politik, ekonomi, dan kekuatan militernya. Kerja sama BRI sebagai upaya kerja sama dan pembangunan ekonomi multinasional, yang terdiri dari segala hal mulai dari investasi asing langsung hingga pengembangan infrastruktur. Namun, tujuan BRI bukan hanya pada sektor ekonomi, namun juga bergerak pada bidang strategis, dan merupakan upaya untuk menutupi perluasan kekuatan yang merupakan upaya hegemoni China. Dalam intensi strategisnya, BRI dapat dianggap sebagai proyek imperial yang mirip seperti pendahulunya yaitu *British East India Company* (EIC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) (Spectator.us, 2019).

Selain itu, BRI juga telah menggunakan pinjaman ke negara-negara yang memilih BRI sebagai sarana yang disebut ‘*debt-diplomacy*’. Hal ini karena BRI merupakan rangkaian pinjaman kepada negara-negara yang

tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Misalnya, BRI mendanai pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi di Laos yang biayanya setara dengan setengah dari pendapatannya. Perusahaan Investasi China, dana kekayaan kedaulatan China, sangat terlibat dalam pembiayaan proyek kereta api berkecepatan tinggi ini. Hal tersebut merupakan bentuk imperialisme model baru yang menjadi dampak dari kerja sama BRI ini (Intpolicydigest.org, 2019).

Beberapa contoh negara yang telah disebutkan diatas telah mengalami dampak dari perang asimetris dalam bidang ekonomi melalui kerja sama BRI oleh China ini. Perubahan mata uang menjadi Yuan di Zimbabwe, masuknya tenaga kerja asing di Nigeria dan Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama dengan asas '*Turnkey Management Project*' yang mana kerja sama tersebut mewajibkan seluruh suplai tenaga kerja dan material bahan baku berasal dari China, hingga pengambil-alihan infrastruktur kritis negara seperti *Gwadar Port* dan Pelabuhan Hambatota dengan dalih ketidakmampuan membayar hutang terhadap investasi akhirnya menjadi '*debt trap*' yang dialami oleh negara-negara yang terlibat dalam kerja sama BRI ini.

Melihat bahwa kerja sama BRI dalam bidang ekonomi nyatanya mampu untuk mengalihkan kebijakan negara, mengubah mata uang dan mengambil alih infrastruktur kritis negara, melalui permasalahan diatas peneliti memiliki hipotesa sementara bahwa peperangan asimetris dapat terjadi dalam bidang ekonomi. Bukan dalam bentuk sanksi, embargo, restriksi perdagangan, atau hal-hal yang bersifat pembatasan dan pemutusan hubungan kerja sama yang kerap dikaitkan sebagai 'perang ekonomi', namun dapat berbentuk kerja sama antar-negara yang seharusnya dapat meningkatkan kemajuan masing-masing negara yang justru dapat membawa kemerosotan dan kehancuran bagi negara yang tidak memiliki kapabilitas

untuk bertahan dan memenangkan perang asimetris dalam bidang ekonomi ini.

Oleh karena itu, maka potensi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi khususnya pada kasus kerja sama BRI ini menjadi fokus dalam penelitian ini. Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai '*Debt Trap*' dari kerja sama BRI oleh negara China ini, dan menganalisis potensinya bagi Indonesia, yang menjadi salah satu negara yang bekerja sama didalam skema kerja sama BRI. Selain menganalisis ancaman terkait upaya hegemoni China melalui kerja sama BRI ini sebagai 'imperialisme model baru' dalam tatanan dunia Internasional, penelitian ini juga akan merumuskan rekomendasi terkait strategi pertahanan negara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangkal ancaman asimetris dalam bidang ekonomi khususnya pada kerja sama BRI ini.

Sehingga dengan demikian, peneliti mengambil judul "Strategi Pertahanan negara Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi (Studi Neoimperialisme China dalam Kerja Sama *Belt and Road Initiative*)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka disusun rumusan masalah yang diuraikan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kerja sama *Belt Road Initiative (BRI)* negara China dapat menjadi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi ?
2. Bagaimana strategi pertahanan negara Indonesia untuk menghadapi ancaman asimetris bidang ekonomi dalam kerja sama *Belt Road Initiative (BRI)* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam thesis ini adalah :

1. Menganalisis kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* oleh negara China yang dapat menjadi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi di Indonesia.
2. Menganalisis strategi pertahanan negara Indonesia untuk menghadapi ancaman asimetris bidang ekonomi khususnya dalam kerja sama *Belt Road Initiative (BRI)*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 manfaat, yakni Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis adalah kegunaan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan. Dalam hal ini, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan literatur bagi Program Studi Peperangan Asimetris khususnya pada bidang Ancaman Asimetris dalam bidang Ekonomi yang terjadi di Indonesia. Serta dapat mnejadi manfaat bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji tentang permasalahan terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah implementasi hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, pihak-pihak terkait (*stakeholder*) yang dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut (*policy research*). Dalam hal ini, manfaat praktis dari penelitian ini dapat digunakan untuk :

- a. Kementerian Pertahanan sebagai *stakeholder* dalam menyusun strategi pertahanan dalam bidang militer dan non militer khususnya dalam ancaman perang asimetris bidang ekonomi yang terdapat dalam kerja sama *Belt Road Initiatives* (BRI) ini.
- b. Kementerian Luar Negeri sebagai *stakeholder* dan *decision maker* dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama luar Negeri khususnya pada bidang ekonomi *politik* Internasional.
- c. Lembaga dan perusahaan terkait yang beroperasi dalam proyek kerja sama BRI di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam meneliti permasalahan terkait kerja sama investasi *Belt Road Initiative (BRI)* sebagai ancaman asimetris bidang ekonomi di Indonesia, peneliti akan mengambil beberapa landasan teori dan konsep yang sepadan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam kasus ini. Berikut akan dijabarkan mengenai teori yang relevan sebagai sudut pandang peneliti terkait permasalahan ancaman asimetris bidang ekonomi dalam studi kasus kerja sama investasi BRI dari negara China.

2.1.1 Teori Strategi

Salah satu definisi kontemporer yang umum yang dapat menggambarkan teori strategi adalah tentang menjaga keseimbangan antara *ends, means, dan ways* ; tentang mengidentifikasi tujuan; dan tentang sumber daya dan metode yang tersedia untuk memenuhi tujuan tersebut (Carlisle, PA: U.S. Army War College, 1989). Keseimbangan ini tidak hanya mencari cara untuk mencapai tujuan (ends) yang diinginkan namun juga menyesuaikannya dengan metode (ways) dan cara yang realistsis sehingga tujuan tersebut dapat tercapai (means).

Kemudian berdasarkan pepatah Sun Tzu dalam "*The Art of War*", menyatakan bahwa kunci dari *deception* atau pengelabuan adalah dengan cara melakukan kebalikan dari apa yang diharapkan

— terlihat tidak berdaya saat mampu, pasif saat aktif, dekat saat jauh, jauh saat dekat. Keunggulan tertinggi dalam perang tidak ditemukan dalam memenangkan "seratus kemenangan dalam seratus pertempuran." Sebaliknya, lebih baik "menaklukkan musuh tanpa berperang". Ahli strategi yang hebat harus menjadi penipu yang ulung, menggunakan kekuatan di tempat yang paling efektif: "Hindari yang kuat untuk menyerang yang lemah." Mengalahkan strategi musuh (atau "menolak rencana musuh") adalah "bentuk tertinggi dari keahlian militer." (Sun Tzu, diterjemahkan oleh Giles: 2000).

Sementara itu, Clausewitz sebagai ahli teori perang menitikberatkan pada pengamatan yang menjadi inti pemikirannya yang matang, bahwa perang dibentuk oleh kekerasan primordial, kebencian, dan permusuhan, yang dianggap sebagai kekuatan alam yang buta; tentang permainan peluang dan peluang di mana jiwa kreatif bebas berkeliaran; dan elemen subordinasinya, sebagai instrumen kebijakan, yang membuat perang tunduk pada akal semata. Politik adalah salah satu sumber pengekanan, tetapi friksi adalah sumber lain. Dan perang adalah kelanjutan dari politik (Clausewitz, diterjemahkan oleh Howard dan Paret: 1976).

Dalam menjelaskan mengenai teori strategi, perlu dipahami bahwa hingga saat ini tidak ada definisi strategi yang disepakati oleh para ahli yang menjelaskan bidang cakupannya dan memberi pembatasan yang jelas terhadap teori strategi. Strategi militer diuji hanya sesekali dalam pertemuan satu kali yang mungkin tidak selalu setegas yang diharapkan, tetapi dapat diharapkan untuk mengubah ketentuan pertemuan di masa depan. Ekonomi adalah instrumen penting yang datang untuk memperoleh posisi yang hegemonik secara strategis. Hal ini bukan karena ia cocok secara unik untuk tujuan intelektual ini tetapi karena keputusan yang disengaja untuk

mengadopsinya sebagai dasar ilmu baru pengambilan keputusan dan promosi aktif ilmu baru ini (Freedman: 2013).

Dalam menganalisis kasus dalam penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus menggunakan teori Sun Tzu khususnya dalam frasa “mengalahkan musuh tanpa berperang”. Kerja sama BRI dilihat menjadi strategi bagi negara China untuk dapat mengalahkan ‘musuh’ nya yaitu kompetitor dari negara lain seperti Amerika Serikat. Melalui kerja sama ini, China mampu bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru dan mengalahkan hegemoni kekuatan ekonomi yang sebelumnya.

Strategi yang digunakan oleh China dalam kerja sama BRI seyogyanya dapat dianalisis dan diprediksi ancamannya bagi negara-negara yang melakukan kerja sama dalam investasi tersebut. Jika ancaman tersebut telah diketahui, maka strategi yang dapat digunakan untuk menangkal ancaman tersebut adalah melalui ‘*deception*’ seperti apa yang dijabarkan oleh Sun Tzu. Melakukan yang sebaliknya dari apa yang diharapkan, mengetahui kelemahan lawan, dan mengacaukan strateginya adalah bentuk pertahanan terhadap ancaman musuh, tak terkecuali dalam kerja sama BRI ini.

2.1.2 Konsep Pertahanan Negara

Pertahanan Negara merupakan upaya aktif pemerintah dan seluruh warga dan seluruh wilayah dengan memanfaatkan sumber daya nasional. Keamanan Nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina

kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman (UU No. 3 Th 2002).

Pada hakikatnya, pertahanan negara merupakan upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pertahanan yang bersifat semesta merupakan model yang dikembangkan sebagai pilihan bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Oleh karena itu, pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Usaha pertahanan dan Keamanan Negar dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Tujuan dari pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara secara fisik dan non fisik, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dari disintegrasi dan disorientasi serta mejaga keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman baik ancaman militer atau pun non militer yang datang dari

dalam dan luar negeri. Esensi pertahanan negara menjadi penuntun bagi setiap warga negara untuk dapat memahaminya yang meliputi tujuan nasional, kepentingan nasional, hakikat pertahanan negara, sistem pertahanan negara, fungsi pertahanan negara dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Selain itu, Undang Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan negara. Kesadaran setiap warga negara untuk ambil bagian dalam bela negara perlu digelorakan ketika negara membutuhkan. Penyusunan strategi untuk mengamankan kepentingan nasional tidak terlepas dari bagaimana pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dielaborasi untuk menjadi kekuatan yang dapat digunakan sesuai hakikat ancaman yang dihadapi. Pengintegrasian pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter merupakan bentuk kesemestaan dalam sistem pertahanan negara (Buku Strategi Pertahanan Negara, 2014).

Dalam kajian hubungan internasional, negara dianggap sebagai sebuah aktor yang memerlukan sumber untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Agar mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*survive*), maka negara harus melakukan upaya mempertahankan diri (*defense*) dengan mengatasi setiap hal yang mengancam eksistensinya, menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, serta menaklukan berbagai tantangan dalam penyelesaian masalah dan gangguan yang datang dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Gumilar, 2015).

Menurut Makmur Supriyatno, ilmu pertahanan mencakup tentang mempelajari bagaimana pengelolaan sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang, dan pada saat sesudah

perang. Ilmu pertahanan memiliki fungsi untuk menjadi panduan dalam menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014).

Ilmu pertahanan sebagai disiplin ilmu mengkaji tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan Negara. Kebutuhan untuk mempelajari masalah-masalah pertahanan secara filosofis berangkat dari keberadaan suatu entitas yang disebut Negara (*state*), dan kebutuhan untuk mempertahankan diri (*survive*) dari ancaman-ancaman (*threats*) yang datang baik dari dalam Negeri maupun dari negara lain.

Relevansi penggunaan teori pertahanan menjadi salah satu landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisis agar peneliti mampu melihat permasalahan penelitian dalam konteks pertahanan negara. Sesuai dengan tujuan dari pertahanan negara yaitu untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara secara fisik dan non fisik, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dari disintegrasi dan disorientasi serta menjaga keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman baik ancaman militer atau pun non militer yang datang dari dalam dan luar negeri.

Proyek kerja sama *Belt Road Initiative* (BRI) oleh negara China yang nyatanya telah mengganggu dan menjadi ancaman bagi pertahanan beberapa negara yang terdampak, menjadikan Indonesia wajib waspada terhadap efek negatif yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama tersebut. Agar bisa mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, Indonesia harus memiliki

kemampuan *'defense'* atau bertahan, untuk dapat *'survive'* dalam perjalanan perjanjian kerja sama tersebut dan tidak mengalami dampak negative seperti beberapa negara lain.

2.1.3 Teori Ancaman

Definisi ancaman menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar Negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara serta keselamatan negara (UU No. 3 th 2002). Didalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, dijelaskan bahwa ancaman merupakan dasar dari penyusunan sistem pertahanan negara, menurut penggolongan atau klasifikasi ancamannya (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Ancaman terbagi dalam tiga jenis, yakni ancaman militer (bersenjata maupun non-senjata), ancaman non militer, serta ancaman hibrida. Ketiga ancaman tersebut dapat berasal dari internal, maupun eksternal negara dalam lingkup wilayah nasional, regional, dan internasional. Kemudian dampak dari ancaman tersebut dapat meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Selain pembagian berdasarkan jenisnya, Buku Putih Pertahanan Indonesia juga mengkategorisasi ancaman tersebut dalam skala prioritas yaitu dalam bentuk Ancaman Nyata serta Ancaman Belum Nyata. Ancaman nyata merupakan prioritas utama bagi pertahanan negara Indonesia, karena cenderung sering terjadi, dan dinilai dapat mengancam kedaulatan negara (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Contoh dari ancaman nyata menurut Buku Putih Pertahanan adalah terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan, pencurian kekayaan alam, penyalahgunaan narkoba, serangan siber dan spionase, serta bencana alam dan wabah penyakit. Sementara itu, ancaman belum nyata merupakan ancaman yang probabilitas terjadinya tergolong kecil, seperti konflik terbuka atau perang konvensional antar negara menggunakan kekuatan militer secara massif (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Dimensi ancaman mudah berkembang dari satu dimensi ke dimensi lain, termasuk dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, informasi dan teknologi. Spektrum ancaman dapat berubah tiba-tiba dari lokal ke nasional. Demikian juga perkembangan eskalasi keadaan dari tertib hingga darurat atau sebaliknya, tidak mudah untuk diprediksi. Sifat, sumber, dimensi, dan spektrum ancaman serta tantangan yang kompleks dan sulit diprediksi, mudah berubah, dan tidak jelas, harus dihadapi dengan suatu kebijakan pertahanan negara yang fleksibel dan adaptif (Buku Strategi Pertahanan Negara, 2014).

Ancaman berdimensi ekonomi dapat dipengaruhi dari dalam dan luar negeri. Ancaman berdimensi ekonomi dari luar berkaitan dengan inflasi, ketergantungan pada modal asing, pembatasan kuota, penolakan impor, pembatasan ekspor, dan embargo. Potensi ancaman ekonomi dapat terjadi ketika inflasi sangat tinggi dan nilai tukar mata uang sangat tertekan, sehingga menimbulkan rendahnya daya saing ekonomi. Tingkat ketergantungan pada modal asing yang menyebabkan utang negara menjadi tinggi mengakibatkan posisi tawar dan daya saing lemah. Persaingan antar negara dalam bidang

ekonomi dapat berupa pembatasan kuota, penolakan impor, pembatasan ekspor, dan embargo menjadi fenomena wajar yang mengakibatkan ketimpangan volume perdagangan. Ketidaksiapan pasar dalam negeri menghadapi pasar bebas, mengakibatkan melemahnya sektor industri dan produksi dalam negeri untuk mensuplai barang dan jasa dengan kualitas bersaing (Doktrin Pertahanan Negara, 2014).

Dimensi ancaman selain dalam bidang tradisional yang mencakup perang dan intervensi militer, juga terdapat dalam bidang non tradisional yaitu dalam aspek politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain-lain (Buzan, 1983). Barry Buzan dalam "*People, State, and Fear*" juga menyatakan bahwa ancaman keamanan sebuah negara tidak hanya bersifat militer saja, namun juga nonmiliter. Aspek-aspek dalam ancaman nonmiliter adalah: 1) ancaman fisik, 2) ancaman social, 3) ancaman terhadap HAM, dan 4) ancaman terhadap posisi dan status (sosial). Selain itu, Buzan juga menjelaskan bahwa *referent object* tidak hanya stabilitas keamanan negara, namun juga individu dan sistem (Buzan dalam Alfajri, 2019).

Sementara itu, Stephen M. Walt dalam bukunya yang berjudul "*The Origins of Alliances*" mengemukakan teori *Balance of Threat*. Teori ini menjelaskan bahwa aliansi negara terbentuk sebagai cara untuk memastikan keamanan mereka sendiri dan respon atas ancaman yang berlaku. Negara membentuk aliansi dengan tujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan melawan ancaman (Walt, 1987).

Di dalam *Balance of Threat* ini, aliansi terbagi dua kategori, yaitu: *Balancing* dan *Bandwagoning* (Walt, 1987) *Balancing*

merupakan aliansi antara negara dengan negara lain melawan ancaman yang berlaku. Aliansi kategori ini juga dipertimbangkan di tingkat regional, dimana negara-negara menyiratkan keinginan untuk mempertahankan status quo. Sementara *bandwagoning* secara konseptual menurut Kenneth Waltz (1978) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan yang lebih lemah untuk bergabung mengikuti negara yang memiliki kekuatan lebih besar demi mendapat tambahan kekuatan dan kemananan bagi negaranya dalam rangka menghadapi ancaman yang berlaku.

Bandwagoning terjadi hanya di bawah kondisi paksaan atau tidak stabil atau tidak pasti. Aliansi *Bandwagoning* menyiratkan keinginan untuk menginduksi perubahan sistemik dan atau perilaku mendestabilisasi (Schweller, 1994). Aliansi ini terjadi ketika negara lemah memutuskan bahwa biaya melawan negara yang lebih kuat justru lebih mahal daripada keuntungan yang didapatkan. Negara kuat biasanya menawarkan insentif, misalnya penambahan wilayah, perjanjian dagang, atau perlindungan, agar negara lemah mau bekerja sama dengan mereka (Mearsheimer, 2001).

Karena *balancing* dan *bandwagoning* cenderung dipandang sebagai respons terhadap ancaman, maka penting bagi kita untuk mempertimbangkan semua faktor yang akan memengaruhi level ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh suatu negara. Tingkat besar kecilnya ancaman tersebut dapat disebabkan oleh :

1. *Aggregate power* : Semakin besar total sumber daya suatu negara (yaitu, populasi, kemampuan industri dan militer, kecakapan teknologi, dll.), Semakin besar potensi ancaman yang dapat ditimbulkannya kepada orang lain.

2. *Proximity* : Negara cenderung untuk dalam menanggapi ancaman dari kekuatan yang ada di sekitarnya. Karena kemampuan untuk memproyeksikan daya menurun seiring dengan jarak, negara yang wilayahnya berdekatan akan menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada yang jaraknya berjauhan.
3. *Offensive capability* : Negara dengan kemampuan ofensif besar lebih cenderung memprovokasi aliansi daripada mereka yang lemah secara militer atau hanya mampu bertahan.
4. *Offensive intentions* : Negara yang tampak agresif cenderung memprovokasi orang lain untuk menyeimbangkan diri melawan mereka. (Walt, 1985)

Teori ancaman dengan konsep *balance of threat* khususnya pada konsep *bandwagoning* ini memiliki kaitan erat dengan perjanjian kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* dari negara China. Ketika Indonesia dan negara yang kekuatannya lebih rendah daripada China ikut serta dan melakukan aliansi melalui perjanjian kerja sama investasi, maka sejatinya negara yang powernya lebih lemah tersebut sedang melakukan '*bandwagoning*' terhadap ancaman dari negara yang powernya lebih kuat.

Karena ketidakmampuan suatu negara untuk mengcounter ancaman dari luar, alih-alih menghadapi ancaman dengan cara 'mengusir pergi', mereka justru menjadikan ancaman tersebut sebagai 'aliansi'. Hal ini juga tergambar dari sebagian besar negara yang menjadi target dari pelaksanaan kerja sama BRI China, yang secara kondisi dan tingkat perekonomiannya berada dibawah negara China. Ketidakmampuan negara yang memiliki power yang lemah untuk

menangkal ancaman perjanjian kerja sama yang berujung kepada jebakan hutang dari skema investasi tersebut membuat negara yang 'lemah' ini cenderung untuk mengikuti kemauan sang investor.

Hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa, Indonesia. Apabila Indonesia gagal mengidentifikasi ancaman dalam perjanjian kerja sama BRI ini, dan kemudian secara sadar maupun tidak mengalami *bandwagoning* dan menjadi 'aliansi' dari negara investor yakni China, hal tersebut akan mengancam stabilitas politik luar Negeri di Indonesia yang sejatinya memiliki asas politik bebas-aktif, serta mengancam kedaulatan Indonesia.

Oleh karena itu, relevansi teori ini dengan tema penelitian yang dikaji adalah terkait ancaman kerja sama investasi BRI sebagai ancaman asimetris bidang ekonomi di Indonesia yang menjadi serangan asimetris dari negara lain dalam hal ini adalah negara China kepada Indonesia. Strategi asimetris dikenal sebagai strategi 'murah meriah' namun memiliki daya hancur yang cukup tinggi dan dalam waktu yang lama. Teori ancaman tersebut cukup relevan untuk dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, terkait dengan prediksi ancaman kedepan yang dihasilkan dari kerja sama BRI di Indonesia.

2.1.4 Teori Neo-imperialisme

Berbicara mengenai Neo-Imperialisme, tentunya kita harus memahami konsep awalnya yaitu Imperialisme. Imperialisme merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu situasi, dimana satu negara memberi pengaruh atau mengontrol negara lain. Negara yang mengontrol tersebut cenderung memiliki kekuatan yang lebih daripada negara yang diatur.

Menurut Merriam Webster dictionary, "*imperialism*" dapat didefinisikan sebagai 'Kebijakan, praktik, atau advokasi untuk memperluas kekuasaan dan dominasi suatu negara dengan akuisisi teritorial langsung atau mendapatkan kendali tidak langsung atas kehidupan politik dan ekonomi di wilayah lain. Sedangkan istilah "neo-imperialisme" dijelaskan dari pertengahan 1800-an hingga akhir Perang Dunia Kedua.

J.A. Hobson, seorang ekonom sosialis yang pertama kali memperkenalkan teori imperialisme ekonomi. Salah satu tema besar dalam buku Hobson yang berjudul "*Imperialism : A Study*" menyatakan hal berikut :

By far the most important economic factor in Imperialism is the influence relating to investments. The growing cosmopolitanism of capital has been the greatest economic change of recent generations. Every advanced industrial nation has been tending to place a larger share of its capital outside the limits of its own political area, in foreign countries, or in colonies, and to draw a growing income from this source (Hobson, 2005).

Melalui kalimat tersebut Hobson menganggap bahwa gelombang besar investasi asing di mana imperialisme dibangun pada waktunya akan mengarah pada revolusi industri di tempat yang sekarang kita sebut Dunia Ketiga, menghancurkan budaya tradisionalnya. Deindustrialisasi akibat dari dunia maju juga akan mengubah Eropa Barat menjadi ekonomi jasa, diperintah oleh kekuatan finansial, merusak kebebasan dan demokrasi yang dikaitkan Hobson dengan kebangkitan industri perkotaan (Hobson, 2005).

Imperialisme diperkenalkan oleh Hobson, namun teori ini segera diadopsi oleh Marxisme dan setelah itu menjadi perspektif yang

banyak dibahas oleh pakar teori Marxis. Pandangan awal dari para pendiri teori Marxis tentang imperialisme adalah bahwa sistem internasional kapitalisme mencerminkan sistem nasionalnya; artinya ini juga merupakan sistem eksploitasi. Sedangkan dalam ekonomi nasional ada eksploitasi tenaga kerja oleh kapital, dalam sistem internasional ada eksploitasi ekonomi yang kurang berkembang oleh negara yang lebih maju (Mavroudeas, 2018).

Konsepsi ini adalah kebalikan langsung dari yang diadopsi oleh pandangan *mainstream* kaum borjuis yang menyatakan bahwa sistem internasional kapitalisme adalah mekanisme yang menguntungkan semua yang berpartisipasi di dalamnya. Debat Marxis tentang imperialisme, dilakukan pada awal abad ke-20 antara arus yang diasosiasikan dengan R. Hiferding, R.Luxemburg dan V.I.Lenin. Marxisme berpendapat bahwa eksploitasi internasional adalah ciri organik kapitalisme. Jadi, persaingan internasional adalah 'perang' yang memiliki pihak yang menang dan kalah (Mavroudeas, 2018).

Kemunculan kembali dari bentuk Imperialisme yang dikondisikan oleh formulasi dalam terma "Neo-Imperialisme" yang menyatakan bahwa dalam kapitalisme-imperialisme kontemporer telah memperoleh karakter baru. Jika imperialisme kapitalis klasik didasarkan pada pemaksaan dan eksploitasi ekonomi secara tidak langsung, maka 'Neo-Imperialisme' menyerupai imperialisme pra-kapitalis di mana paksaan dan penyitaan langsung (kekerasan) mendominasi, namun neo imperialism melakukan pemaksaan dan eksploitasi ekonomi secara tidak langsung (Mavroudeas, 2018).

Dalam menjalankan suatu perekonomian baik negara maupun dalam taraf internasional, mekanisme politik dan militer merupakan dukungan yang diperlukan (karena merupakan kelanjutan perekonomian dengan cara lain) tetapi bukan merupakan mekanisme

yang mendasar. Berkenaan dengan perdagangan internasional, mekanisme dasarnya adalah pertukaran yang tidak setara (berdasarkan perbedaan komposisi organik modal) dan persaingan berdasarkan keunggulan absolut. Mekanisme ini dilengkapi dengan mekanisme serupa terkait dengan portofolio dan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) (Mavroudeas,2018).

Kwame Nkrumah (1965), presiden pertama Ghana didalam bukunya yang berjudul "*Neo-Colonialism : The Last Stage of Imperialism*" mengemukakan teorinya mengenai fenomena yang sedang berkembang yang ia gambarkan sebagai "neo-kolonialisme". Dalam bukunya, Nkrumah dengan jelas menggambarkan neo-kolonialisme sebagai teori perang kelas-nya Marx dalam skala internasional, dengan pembagian antara Barat yang kaya dan kelas pekerja yang miskin di Dunia Selatan.

Selanjutnya Nkrumah memprediksikan bahwa struktur kapitalis akan terguling dalam skala global karena itu adalah akar dari tendensi imperialistik yang mengarah pada neo-kolonialisme. Menurut Nkrumah, tujuan umum dari neo-kolonialisme adalah dominasi ekonomi untuk memuaskan segelintir orang. Dalam kasus Afrika, ini memanifestasikan dirinya sebagai kekuatan imperialistik tanpa tanggung jawab. Neo-kolonialisme dalam bentuknya yang paling buruk adalah kelanjutan dari kebijakan kolonial berkedok mencapai kebebasan. Negara-negara imperialis memajukan aspirasi ekonomi neo-kolonial mereka dengan berbagai skema bantuan dengan dalih meningkatkan standar dan kondisi hidup.

Fenomena yang dikemukakan oleh Nkrumah merupakan apa yang terjadi pada negara Afrika di awal tahun 2000 an. Sementara itu, teori neo-imperialisme terus berkembang hingga saat ini. Ketika imperialisme biasanya dicirikan oleh penaklukan dan kekuasaan, dan

kolonialisme dengan migrasi dan tempat tinggal di wilayah yang ditaklukkan, Neo-Imperialisme cenderung mengenai dominasi atau bahkan hegemoni atas negara lain melalui perjanjian hukum bebas secara formal, kekuatan ekonomi, dan pengaruh budaya. Perbedaan 'Neo' Imperialisme dari imperialisme lama, adalah pembatasan keinginan politik (*political will*).

Sementara itu, Noam Chomsky seorang profesor linguistik modern ternama internasional pernah membahas agenda ekonomi imperialisme. Chomsky berpandangan bahwa imperialisme AS ini telah menghalangi negara lain untuk mengejar model "pembangunan mandiri", dan mengantarkan pada era di mana perusahaan multinasional AS mampu mendominasi ranah ekonomi di dunia. Kerajaan AS telah terlibat dalam perang imperialistik ini untuk memajukan kepentingan ibu kota AS dan telah sangat menguntungkannya dan membuatnya berhasil (Chomsky, 2005).

Chomsky dalam interviewnya sebagaimana yang dikutip oleh The News.com menyatakan hal berikut :

There are plenty of other complicated things happening in the world. There's a lot of talk about a global shift of power: China are going to become the great powers, the wealthiest powers, and so on. The imperial model succeeded. It was able to prevent other countries from developing independently, and paved the way for the global dominance of US multinationals. It also explains the current US-China rivalry (The News.com, 2020).

Sebagaimana yang telah dibahas di atas, Neo-imperialisme muncul sebagai kekuatan dominan dalam politik dunia dan mempraktikkan bentuk neo-imperialisme melalui penggunaan

kekuatan politik, ekonomi, dan militer. neoimperialisme tentu saja menyerupai imperialisme Eropa generasi sebelumnya, yakni dalam manipulasi politik, dominasi ekonomi, dan kesediaannya untuk menggunakan kekuatan militer. Tetapi ada juga perbedaan besar. Melalui dekolonisasi, banyak bekas rakyat kolonial memperoleh hak dan kebebasan formal sebagai warga negara baru (Encyclopedia.com, 2020).

Selain itu, ciri utama dari neo-imperialisme adalah asimetri. Ada hubungan asimetris antara negara yang memiliki power dengan negara yang 'dijajah'. Negara yang menjadi kekuatan imperial dapat mengontrol aspek perilaku klien untuk kepentingannya sendiri dimana tidak ada pengaruh timbal balik oleh klien. Namun, tingkat kendali oleh kekuatan imperial sangat bervariasi sesuai dengan sifat struktur kekaisaran. Imperialisme bukanlah fenomena yang ada atau tidak ada. Ada spektrum yang berkisar dari kolonialisme yang dijalankan secara terpusat hingga kehilangan pengaruh atas suatu perekonomian.

Generasi baru dari neo-imperialisme mulai muncul dengan kebangkitan ekonomi China, dan pada saat yang sama, kebangkitan dana kekayaan negara seiring dengan berkurangnya kekuatan AS. Dengan kekuatan ekonomi dan politik Amerika Serikat yang semakin memudar di seluruh dunia, ditambah dengan bangkitnya China sebagai pabrik manufaktur dunia bersama dengan sumber kekuatan ekonomi baru dengan munculnya dana kekayaan kedaulatan, muncul bentuk baru neo-imperialisme di kancah politik dunia.

Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013 saat berkunjung ke Indonesia dan Kazakhstan dianggap sebagai jenis imperialisme baru. Bagian "Sabuk" dari BRI mengacu pada jalan darat dan transportasi kereta api, di mana bagian "Jalan" mengacu pada rute laut. BRI juga dikenal sebagai proyek "One

Belt, One Road". BRI China merupakan upaya untuk meningkatkan konektivitas regional dan bersama-sama merangkul masa depan yang lebih cerah. Pada Oktober 2019, BRI telah menjangkau 138 negara dengan PDB gabungan \$ 29 triliun dan lebih dari 4,6 miliar orang (Intpolicydigest.org, 2019).

Perkembangan teori neo-imperialisme ini dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Melihat upaya China dalam menjalin kerja sama melalui kerja sama BRI ini nyatanya memberikan dampak 'ketergantungan' atas pembayaran hutang atas dibangunnya infrastruktur terkait, seperti yang telah terjadi di beberapa negara.

Pengendalian ekonomi tanpa harus menginvasi wilayah menjadi titik awal dari penggunaan teori Neo-imperialisme dalam penelitian ini. Kemampuan ekonomi China yang berkembang pesat kemudian menjadi salah satu *'emerging power'* di dunia menempatkan China pada posisi negara yang kuat secara ekonomi. Tendensi dan intensi dalam penguasaan sektor ekonomi melalui kerja sama BRI ini dapat dilihat menggunakan teori Neo-imperialisme.

2.1.5 Teori Peperangan Asimetris

Dalam berbagai literatur pertahanan dan hubungan internasional, istilah "asimetris" diartikan sebagai perbedaan yang signifikan dalam "kekuatan". Perang asimetris mencakup konflik antarnegara dan antarkelompok (biasa disebut perang sipil atau perang saudara). Perang asimetris sering disebut juga dengan perang gerilya, pemberontakan, terorisme, konflik intensitas rendah, perang generasi ke 4, perang irreguler, dsb.

Perang asimetris memiliki ciri khusus yakni ketimpangan kekuasaan yang dimiliki antara dua atau lebih aktor yang berperang. Perang asimetris juga merupakan konflik yang melibatkan

kekerasan, antara militer formal di satu pihak melawan pihak lain yang informal dan tidak didukung pasukan bersenjata lengkap namun memiliki militansi yang tinggi.

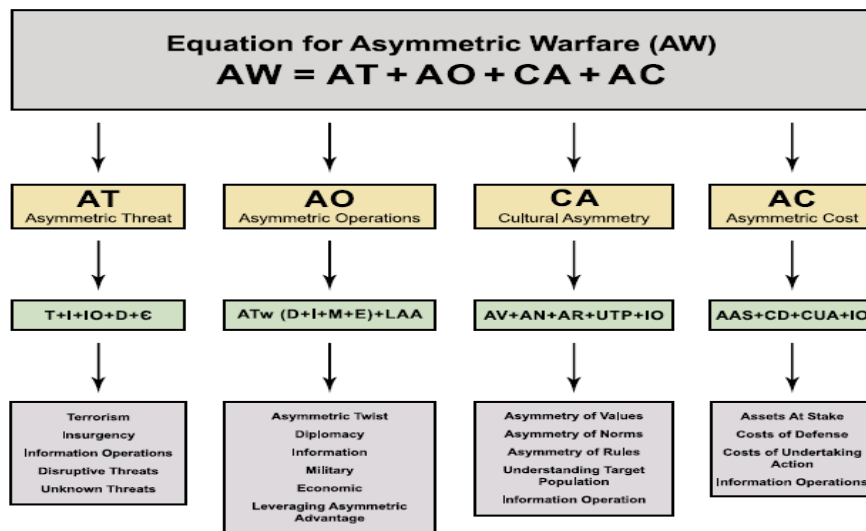
Dalam perang asimetris, kedua pihak berusaha untuk mengeksploitasi kelemahan lawan dengan menggunakan strategi dan taktik perang konvensional maupun non-konvensional. Pihak yang lebih lemah berusaha menggunakan strategi yang lebih jitu untuk mengimbangi kekurangannya dalam kuantitas atau kualitas militer. Strategi pihak yang lemah menghindari tindakan secara militer, yang merupakan kekuatan pihak lawan (Darwanto,2019).

David L. Buffaloe (2006) dalam tulisannya yang berjudul *Defining Asymmetric Warfare* mendefinisikan peperangan asimetris sebagai berikut :

Asymmetric warfare is population-centric nontraditional warfare waged between a militarily superior power and one or more inferior powers which encompasses all the following aspects: evaluating and defeating asymmetric threat, conducting asymmetric operations, understanding cultural asymmetry and evaluating asymmetric cost. (Buffaloe, 2006).

Kemudian untuk memahami lebih lanjut mengenai peperangan asimetris, Buffaloe mengembangkan teori mengenai empat elemen utama dalam peperangan asimetris, yaitu (1) *Asymmetric Threat*, (2) *Asymmetric Operations*, (3) *Cultural Asymmetry*, dan (4) *Asymmetric Cost*.

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.



Gambar 2.1 Empat Elemen Utama dalam Peperangan Asimetris

Sumber : Buffaloe, David L. (2006) *Defining Asymmetric Warfare, The Institute Land Warfare Papers (AUSA)*

1. *Asymmetric Threat.*

Elemen yang pertama adalah *Asymmetric Threats* yang terdiri dari berbagai hal, yaitu : *terrorism, insurgency, information operations, disruptive threats dan unknown threats*. Dikatakan sebagai '*threat*' karena sifatnya yang mengancam keselamatan masyarakat secara luas, baik secara fisik maupun psikologis. Ancaman dari berbagai hal tersebut dapat menebar '*fear*' terhadap masyarakat secara luas, serta dapat menjadi ancaman dan mempengaruhi '*the heart and mind of the people*'.

2. *Asymmetric Operations*

Operasi asimetris sebagai elemen dari peperangan asimetris merupakan operasi yang direncanakan dan dilakukan oleh pihak yang cenderung memiliki *power* yang lebih kuat dalam peperangan asimetris. Oleh karena itu, operasi ini juga dapat dikatakan sebagai

operasi ofensif. Operasi ini dapat berjalan dengan menempatkan *asymmetric twist* pada bidang instrument kekuatan nasional, yaitu diplomasi, informasi, militer dan ekonomi (DIME). *Asymmetric twist* yang dimaksud adalah memberikan serangan asimetris kepada negara lain melalui instrument kekuatan nasional tersebut.

Ketika instrument kekuatan nasional tersebut telah mendapat '*asymmetric twist*' melalui strategi yang dilancarkan oleh suatu negara, terlebih apabila negara tersebut memiliki power, maka negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar dapat menggunakan powernya untuk mempengaruhi instrument kekuatan nasional negara lain, khususnya yang memiliki kekuatan yang lebih lemah.

Konsep asimetri pada elemen ini cenderung memberikan benefit bagi negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar, alih-alih bersifat menguntungkan bagi negara yang memiliki kekuatan yang lemah. Namun tentu saja, sisi asimetris dalam perbedaan kekuatan tetap menjadi ciri khas dari *asymmetrical operation* ini

3. Cultural Asymmetry

Cultural asymmetry atau asimetri budaya merupakan salah satu konsep yang cukup kompleks dalam hal pemahamannya. Namun, hal ini merupakan salah satu hal yang esensial dalam peperangan asimetris. Karena perang asimetris berpusat pada memenangkan '*heart and mind*' dari populasi, maka asimetri budaya juga dapat dikombinasikan ke dalam setiap operasi lainnya. Pemahaman tentang asimetri budaya juga dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan ancaman asimetris karena peneliti tentunya harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan motif dari lawan.

Dalam cultural asymmetry terdapat beberapa bagian penting, yaitu: asimetri nilai (*asymmetry of values*), asimetri aturan (*asymmetry of rules*), asimetri norma (*asymmetry of norms*), pemahaman populasi sasaran dan pelaksanaan operasi informasi yang selaras dengan budaya. Komponen inilah yang menjadi kunci dalam pelaksanaan dan infiltrasi serangan asimetris dalam sisi kultural di dalam suatu masyarakat.

4. Asymmetric Cost

Asymmetric cost menjelaskan bahwa ada biaya yang sangat besar dalam melakukan peperangan asimetris dan hal ini berlaku di semua jenis peperangan asimetris, baik dalam *asymmetric threats*, *asymmetric operations*, maupun *cultural asymmetry*. Didalam *asymmetric cost* terdapat beberapa hal yang menjadi bagian penting dari 'cost' sebuah peperangan asimetris, hal tersebut adalah : *Assets at stake*, *costs of defense*, *costs of unfertaking action*, and *information operation* (Buffaloe, 2006).

Serangan terhadap ekonomi suatu negara dapat dikategorikan sebagai asymmetric warfare dalam klasifikasi *Asymmetric Operations* yang dilakukan oleh negara yang lebih kuat secara power ekonominya terhadap negara yang lemah. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* ini dapat menjadi menjadi permasalahan pelik yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui contoh kasus yang telah disebutkan pada Bab I.

Jebakan '*debt trap*' yang akhirnya dapat mengubah kebijakan politik di suatu negara seperti pengambil alihan infrastruktur kritis negara yang berupa pelabuhan, perubahan mata uang yang merupakan bukti atas adanya kendali dari negara China terhadap

kebijakan fiskal dan moneter di negara lain, hingga tentang isu tenaga kerja asing yang menjadi 'diaspora terstruktur' dalam skema kerja sama BRI ini dapat mempengaruhi kondisi situasi dan stabilitas politik dan ekonomi di suatu negara.

Konsep ini juga akan menjelaskan bagaimana kerja sama ekonomi dan investasi dapat dipandang sebagai salah satu strategi peperangan asimetris yang dipakai oleh China selain untuk memperoleh keuntungan atas pangsa pasar Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar, namun untuk melemahkan dan merusak tatanan negara melalui perjanjian kerja sama yang memiliki dampak negatif terhadap suatu, tanpa disadari oleh negara tersebut, serta sebagai strategi dalam mencapai ambisinya menjadi hegemoni global dalam bidang ekonomi politik internasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yang memiliki kesamaan tema, isu, dan permasalahan yang diangkat dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu selain menjadi referensi peneliti dalam menulis karya ilmiah juga dapat menjadi pembanding antara keterbaruan (*novelty*) dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam penelitian mengenai Strategi Pertahanan Negara Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi (Studi Neo-Imperialisme China dalam Kerja sama *Belt And Road Initiatives*) ini, peneliti mengambil setidaknya lima (5) studi atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan kesamaan isu dan tema dengan penelitian yang tengah dilaksanakan saat ini. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian saat ini memiliki kurun waktu dari tahun 2016-2019.

a. **Kurniawan, Y. (2016) “One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal China?”**

Kurniawan, Y. (2016) “*One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal China?*” dalam jurnal Universitas Indonesia Politica Vol. 7 No. 2 November 2016 Universitas Indonesia merupakan salah satu penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Kurniawan menggunakan metode Kualitatif dengan teori Regionalisme, Liberalisme, Teori Interdependensi, dan Teori *Invisible Hand* mendapatkan hasil penelitian berupa China dalam rangka mensukseskan inisiatif OBOR adalah menjaga citranya sebagai kekuatan yang sedang bangkit dan bersahabat di hadapan negara-negara tetangganya. Pada akhirnya, kerja sama strategis hanya dapat diperoleh melalui lingkungan strategis yang kondusif dan damai. Perbedaan terdapat pada teori Regionalisme yang menjadi fokus atas alasan negara China melaksanakan kerja sama OBOR / BRI ini. Penelitian terdahulu mengambil perspektif dari negara China, sementara penelitian saat ini lebih fokus terhadap sudut pandang Indonesia.

b. **Wibawati, S.W., Sari, M.I., Sulistyanti, Y.A. (2018) “Potensi Dan Tantangan One Belt One Road (OBOR) Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Maritim”.**

Penelitian ini ditulis oleh Wibawati, S.W., Sari, M.I., Sulistyanti, Y.A. (2018) dalam Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 No.2, 2018 Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan dengan judul penelitian “*Potensi Dan Tantangan One Belt One Road (OBOR) Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Maritim*”. Masih dengan tema yang sama yaitu OBOR atau yang sekarang dikenal dengan BRI,

penelitian tersebut juga menggunakan metode Kualitatif dengan teori Neo-Realisme, Teori Pertahanan, dan Teori Kepentingan Nasional.

Hasil dari penelitian terdahulu ini merupakan pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan yang datang dari China dengan melakukan pengawalan terhadap kepentingan nasional Indonesia dalam OBOR. Sinergitas antar Kemenko Maritim, Kemenko Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut dibutuhkan dalam menjaga stabilitas Indonesia agar mampu melakukan kerja sama BRI ini dengan baik dan tetap menjaga kedaulatan negara. Perbedaan terletak pada kerangka teori yang mana dalam penelitian terdahulu cenderung untuk menggunakan perspektif Neo-Realisme, yang berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian saat ini juga lebih berfokus pada sektor ancaman asimetris bidang ekonomi, sementara penelitian terdahulu berfokus pada bidang kemaritiman.

c. Fabtian, Danika Ramadhani Azizah (2018) “*Belt Road Initiatives (BRI): Intensi Supremasi China di Samudra Hindia dan Respon Counterbalance dari India*”.

Masih dalam tahun 2018, penelitian terdahulu yang selanjutnya ditulis oleh Fabtian, Danika Ramadhani Azizah dalam Jurnal Hubungan Internasional Tahun XI, No. 2, Juli-Desember 2018 dengan judul “*Belt Road Initiatives (BRI): Intensi Supremasi China di Samudra Hindia dan Respon Counterbalance dari India*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua teori yakni teori Realisme dan Neo-Realisme. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam memandang BRI,

India melihat China lebih sebagai ancaman dibanding peluang. Sebagai respon counterbalance presensi China, India merumuskan alternatif dengan mengembangkan format kooperasi baru bersama negara kompetitor China, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada fokus negara yakni India dan China serta menggunakan kerangka teori yang berbeda.

d. Khairani, B., Khafivah, D.N, Susanti, R.W. (2019) “Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Belt And Road Initiative (BRI) Republik Rakyat China.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya merupakan hasil penelitian dari Khairani, B., Khafivah, D.N, Susanti, R.W. pada tahun 2019 dalam Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019 FISIP. Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan judul “*Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Belt And Road Initiative (BRI) Republik Rakyat China*”. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini adalah kualitatif, dan menggunakan teori Realisme dan teori Kepentingan Nasional.

Penelitian terdahulu ini mengemukakan alasan Indonesia bekerja sama dengan China dalam kerja sama BRI yang tidak lepas dari kepentingan politik maupun ekonomi Indonesia. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya BRI ini juga dapat mempermudah visi presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia agar adanya pemerataan perekonomian antar daerah di dalam maupun diluar pulau Jawa. Pemerintah juga telah menyetujui skema kerja sama *Business to Business (B2B)*, bukan *Government to Government (G2G)*. Sehingga

APBN Indonesia tidak terganggu dengan adanya proyek kerja sama tersebut.

Perbedaan terletak pada keseluruhan penelitian baik dalam teori, maupun sudut pandang peneliti. Penelitian terdahulu ini cenderung melihat benefit dari kerja sama BRI sementara penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan bertujuan untuk dapat melihat potensi ancaman dari kerja sama BRI ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan meningkatkan kewaspadaan pemerintah terhadap ancaman asimetris bidang ekonomi melalui kerja sama BRI dari negara China.

e. Korwa, Johni Robert Verianto. (2019) “Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia”

Penelitian terdahulu kelima yang digunakan dalam penelitian ini merupakan karya ilmiah dari Korwa, Johni Robert Verianto. (2019) dengan judul “Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia” yang dimuat dalam Jurnal Hubungan Internasional Vol. 8, No. 1 / April - September 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teori atau konsep *Tianxia* (Konsep Filosofi China), dan Sistem Westphalia. Tulisan ini mencoba menjelaskan kebangkitan China di abad ke-21 dengan menggunakan perspektif *Tianxia*. Peneliti terdahulu juga memilih program BRI sebagai contoh untuk mendeskripsikan aksi yang diambil oleh China saat ini. BRI tidak hanya bermanfaat untuk menopang laju kebangkitan China, tapi juga secara tidak langsung telah memudarkan konsep Westphalia karena batas-batas negara. Perbedaan dengan

penelitian yang dilaksanakan saat ini terletak pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif filosofi China kuno "*Tianxia*", dan melihat BRI sebagai potensi dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan dunia.

Keterbaruan (*novelty*) adalah ciri khas dari setiap penelitian. Oleh karena itu, dengan penjabaran mengenai perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini dilaksanakan dapat diambil beberapa *novelty* yang terdapat didalam penelitian ini, yaitu :

1. Konsep peperangan asimetris khususnya dalam bidang ekonomi. Penelitian terdahulu ada yang membahas dengan menggunakan konsep pertahanan, namun tidak melihat dalam perspektif asimetris yang dapat menjadi landasan dalam analisis potensi ancaman dari suatu kasus.
2. Studi perbandingan terhadap negara yang telah mengalami kerugian akibat kerja sama BRI yang menjadi '*lesson learnt*' yang digunakan dalam penelitian ini. Kegagalan beberapa negara dalam kerja sama BRI ini menjadi pelajaran bagi negara Indonesia untuk dapat menyusun strategi yang lebih baik sehingga tidak ikut terjerumus dalam skema '*debt trap*' seperti yang telah berlaku di beberapa negara yang telah dijabarkan pada Bab 1.
3. Dinamika perekonomian global yang saat ini tengah mengalami penurunan drastic hingga resesi yang merupakan akibat dari wabah pandemic COVID-19 menjadi faktor yang menimbulkan variable baru dalam penelitian ini. Adanya perbedaan situasi dan kondisi perekonomian menyebabkan pemerintah perlu menerapkan strategi baru dalam menjaga kestabilan negara khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menjadi rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan

dan strategi dalam mengelola perekonomiannya, terutama dalam kerja sama BRI di Indonesia.

Berikut ini adalah tabel mengenai penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori / Konsep	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	<p>Kurniawan, Y. 2016 Politica Vol. 7 No. 2 November 2016 Universitas Indonesia <i>“One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal China?”</i></p>	Kualitatif	Regionalisme, Liberalisme, Teori Interdependensi, Teori <i>Invisible Hand</i>	<p>China dalam rangka mensukseskan inisiatif OBOR adalah menjaga citranya sebagai kekuatan yang sedang bangkit dan bersahabat di hadapan negara-negara tetangganya. Pada akhirnya, kerja sama strategis hanya dapat diperoleh melalui lingkungan strategis yang kondusif dan damai.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang tema penelitian yang mana menyangkut masalah kerjasama <i>Belt and Road Initiative</i> yang dulunya bernama <i>One Belt One Road</i></p>	<p>Perbedaan terdapat pada teori Regionalisme yang menjadi fokus atas alasan negara China melaksanakan kerja sama OBOR / BRI ini. Penelitian terdahulu mengambil perspektif dari negara China, sementara penelitian saat ini lebih fokus terhadap sudut pandang Indonesia</p>
2.	<p>Wibawati, S.W., Sari, M.I., Sulistyanti, Y.A. 2018 Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 No.2, 2018 Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan <i>“Potensi Dan Tantangan One Belt One Road (Obor)”</i></p>	Kualitatif	Neo-Realisme, Teori Pertahanan, Teori Kepentingan Nasional	<p>Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan yang datang dari China dengan melakukan pengawalan terhadap kepentingan nasional Indonesia dalam OBOR. Sinergitas antar Kemenko Maritim, Kemenko Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang tema penelitian yang mana menyangkut masalah kerjasama <i>Belt and Road Initiative</i> yang dulunya bernama <i>One Belt One Road</i>. Selain itu, persamaan lainnya</p>	<p>Perbedaan terletak pada kerangka teori yang mana dalam penelitian terdahulu cenderung untuk menggunakan perspektif Neo-Realisme, yang berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian saat ini juga lebih berfokus pada sektor ancaman</p>

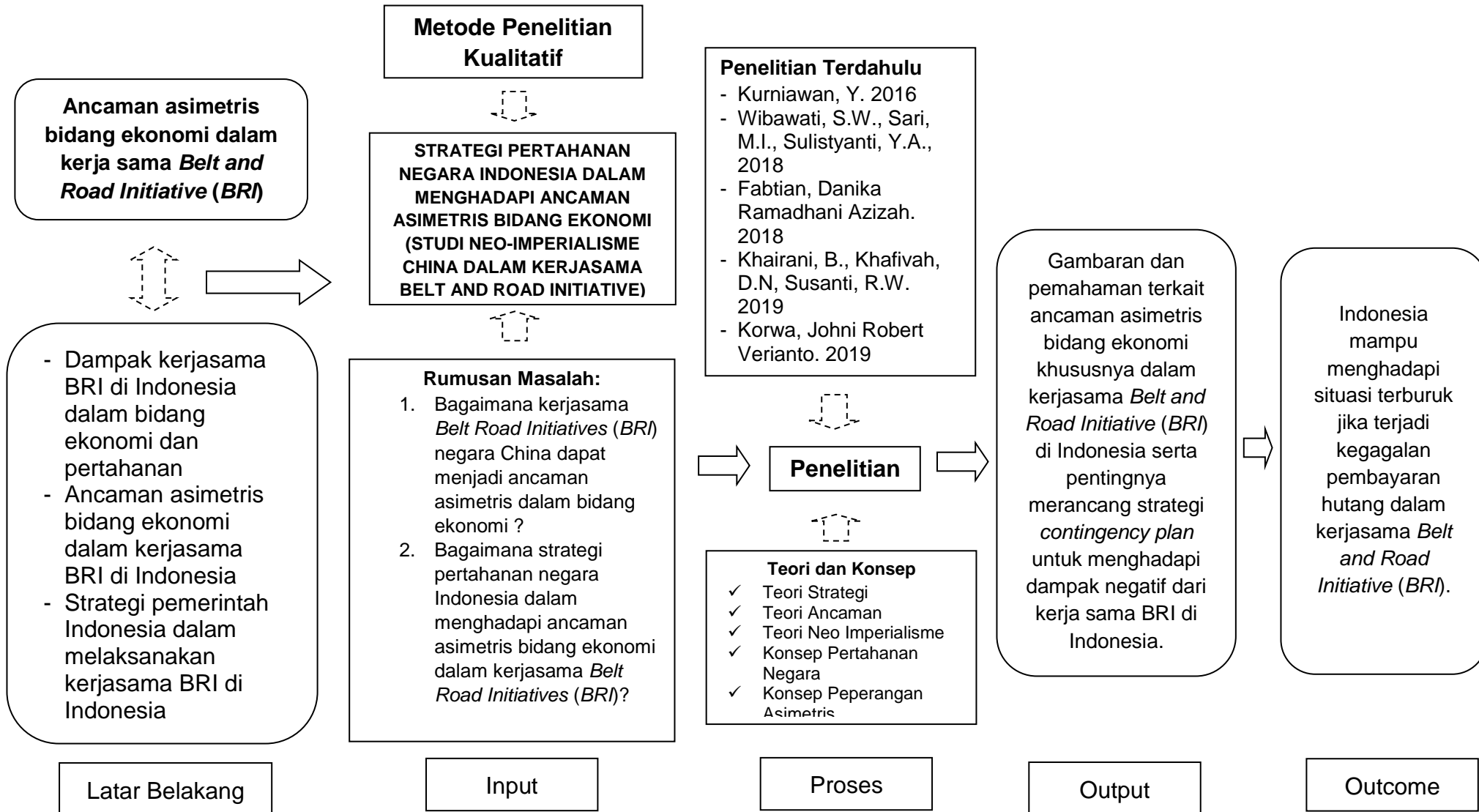
	<i>Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Maritim”</i>			erjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut dibutuhkan dalam menjaga stabilitas Indonesia agar mampu melakukan kerja sama BRI ini dengan baik dan tetap menjaga kedaulatan negara.	adalah dengan menggunakan teori dan konsep pertahanan sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian.	asimetris bidang ekonomi, sementara penelitian terdahulu berfokus pada bidang kemaritiman.
3.	Fabtian, Danika Ramadhani Azizah. 2018 Jurnal Hubungan Internasional Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018 <i>“Belt Road Initiatives (BRI): Intensi Supremasi China di Samudra Hindia dan Respon Counterbalance dari India”</i>	Kualitatif	Realisme, Neo-Realisme	Dalam memandang <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI), India melihat China lebih sebagai ancaman dibanding peluang. Sebagai respon counterbalance presensi China, India merumuskan alternatif dengan mengembangkan format kooperasi baru bersama negara kompetitor China, Korea Selatan dan Jepang.	Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang tema penelitian yang mana menyangkut masalah kerjasama <i>Belt and Road Initiative</i> . Selain itu, hasil penelitian menyatakan bahwa ada ancaman, sebagaimana pula dengan penelitian tesis ini.	Perbedaan terletak pada fokus negara yakni India dan China serta menggunakan kerangka teori yang berbeda.
4.	Khairani, B., Khafivah, D.N, Susanti, R.W. 2019 Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019 FISIP. Universitas Wahid	Kualitatif	Realisme, Teori Kepentingan Nasional	Alasan Indonesia bekerjasama dengan China dalam <i>Belt and Road Initiative</i> tidak lepas dari kepentingan politik maupun	Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang tema penelitian yang mana menyangkut masalah kerjasama <i>Belt and Road</i>	Perbedaan terletak pada keseluruhan penelitian baik dalam teori, maupun sudut pandang peneliti. Penelitian terdahulu ini cenderung melihat

	<p>Hasyim Semarang “Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Belt And Road Initiative (Bri) Republik Rakyat China”</p>		<p>ekonomi Indonesia. Dengan adanya BRI ini juga dapat mempermudah visi presiden Jokowi untuk menjadikan indonesia Poros Maritim Dunia agar adanya pemerataan perekonomian antar daerah di dalam maupun di luar pulau Jawa. Pemerintah juga telah menyetujui skema kerja sama <i>Business to Business</i> (B2B), bukan <i>Government to Government</i> (G2G). Sehingga APBN Indonesia tidak terganggu dengan adanya proyek kerja sama tersebut.</p>	<p><i>Initiative.</i></p>	<p>benefit dari kerja sama <i>Belt Road Initiative</i> sementara penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan bertujuan untuk dapat melihat potensi ancaman dari kerja sama BRI ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan meningkatkan kewaspadaan pemerintah terhadap ancaman asimetris bidang ekonomi melalui kerja sama <i>Belt and Road Initiative.</i></p>
--	--	--	---	---------------------------	--

5.	<p>Korwa, Johni Robert Verianto. 2019 Jurnal Hubungan Internasional Vol. 8, No. 1 / April - September 2019 <i>“Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia”</i></p>	Kualitatif	<p><i>Tianxia</i> (Konsep Filosofi China), Sistem Westphalia</p>	<p>Tulisan ini telah mencoba menjelaskan kebangkitan China diabad ke-21 dengan menggunakan perspektif <i>Tianxia</i>. Peneliti juga memilih program <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) sebagai contoh untuk mendeskripsikan aksi yang diambil oleh China saat ini. BRI tidak hanya bermanfaat untuk menopang laju kebangkitan China, tapi juga secara tidak langsung telah memudahkan konsep Westphalia karena menghilangkan batas-batas negara</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang tema penelitian yang mana menyangkut masalah kerjasama <i>Belt and Road Initiative</i> yang dulunya bernama <i>One Belt One Road</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan perspektif filosofi China kuno “<i>Tianxia</i>”, dan melihat BRI sebagai potensi dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan dunia.</p>
----	---	------------	--	--	---	---

Sumber : Diolah oleh peneliti 2020

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang dibangun oleh peneliti adalah melalui rumusan masalah yang mengangkat tema tentang membentuk strategi pertahanan terhadap serangan asimetris dalam bidang ekonomi, khususnya pada kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI). Menganalisis ancaman melalui penelitian terhadap *das sein* dan *das sollen* pelaksanaan kerja sama BRI di negara lain, serta menjadikan hal tersebut sebagai pembandingan terhadap pelaksanaan investasi BRI di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori strategi, teori pertahanan negara, teori ancaman, teori Neo-imperialisme dan teori peperangan asimetris sebagai landasan teori yang akan menjadi pisau analisis dan perspektif peneliti dalam melihat permasalahan dalam penelitian ini. Dalam metodologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara sebagai data primer, serta studi literatur dan observasi digital sebagai data sekunder.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian dan rumusan masalah pada Bab I, penelitian ini akan menjelaskan *das sein* dan *das sollen* mengenai potensi ancaman asimetris bidang ekonomi dalam kerja sama Belt Road Initiative, dan menemukan faktor penting mengapa Indonesia harus bersikap waspada terkait jebakan hutang (*debt trap*) dalam investasi BRI di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai analisis potensi ancaman terhadap perekonomian Indonesia, yang pada saat ini sedang mengalami resesi akibat wabah virus COVID-19.

Didalam penelitian ini akan dijabarkan mengenai hal-hal yang dikategorikan sebagai ancaman asimetris yang dapat merugikan dan membahayakan instrument kekuatan nasional melalui yakni dalam bidang ekonomi. Kemudian hasil penelitian ini akan dijabarkan dalam bab 4 tentang

indikator ancaman asimetris bidang ekonomi khususnya dalam investasi BRI, menentukan level ancamannya, serta membuat rancangan strategi bagi Indonesia agar memiliki kemampuan untuk menjalankan kerja sama Belt Road Initiative dan menghindari '*debt trap*' oleh negara investornya yaitu China.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi terhadap pemerintah Indonesia sebagai salah satu sarana yang dapat mendukung pemerintah untuk dapat menjalani investasi dan kerja sama ekonomi dengan meminimalisir resiko serangan asimetris yang cenderung terjadi tanpa disadari oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai tambahan literatur bagi Universitas Pertahanan serta penelitian lanjutan yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

3.1.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Burhan Bungin (2007) dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Kualitatif” menjelaskan bahwa penelitian sosial yang menggunakan format kualitatif-deskriptif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan, menyederhanakan situasi dan kondisi dan fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang dalam hal ini menjadi objek penelitian. Bungin juga menjelaskan bahwa desain penelitian kualitatif-deskriptif ini cenderung bersifat eksploratif, sehingga hal tersebut menjadi tepat guna dalam penelitian yang mencakup tentang permasalahan implementasi kebijakan publik, permasalahan mengenai dampak dari media terhadap masyarakat, dan sebagainya.

Sementara itu, David Williams (1995) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Hasil penelitian ini berupa deskripsi secara verbal atau kata-kata yang disampaikan secara lisan oleh narasumber dan analisis dilakukan

terhadap perilaku narasumber secara menyeluruh, rinci, dan mendalam, serta tidak membuat generalisasi.

3.1.2 Desain Penelitian

Menurut John W. Creswell (2011), penelitian adalah proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah. Penelitian kualitatif sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, seperti; ucapan atau teks tertulis dan perilaku orang yang diamati (Bogdan dan Biklen, 1992).

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan analisis deskriptif menurut Nasution (2003) “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengadakan deskripsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi sosial”. Sementara itu, Danial (2009) menjelaskan bahwa “metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu situasi, kondisi objek bidang kajian pada suatu waktu secara akurat”. Penelitian dengan menerapkan metode analisis deskriptif ini menitikberatkan pada pembahasan pertanyaan “siapa” atau “*who*” dan “bagaimana” atau “*how*” (Neuman, 2014). Sehingga, melalui penggunaan metode penelitian deskriptif diharapkan dapat menjelaskan permasalahan secara jelas (Vignali, Hallier, & Stanton, 2016).

Pendekatan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk dapat menjelaskan secara lebih mendalam mengenai objek penelitian yang dikaji yakni mengenai Strategi Pertahanan Negara Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi (Studi Neo-Imperialisme China dalam kerja sama *Belt and Road Initiative*).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah untuk dilakukan dimana dan waktu pelaksanaannya, maka peneliti merancang penelitian adalah sebagai berikut:

3.2.1 Tempat Penelitian

Agar penelitian ini memperoleh data, maka peneliti menentukan tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Universitas Pertahanan, dan *Indonesia Research Development International (IRDI)*, dan sebagai lembaga think-tank swasta.

Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan berdasarkan kesesuaian tugas pokok dan fungsi dari instansi terkait dengan persoalan yang diteliti, sehingga tempat penelitian ini cukup relevan dalam menjawab rumusan masalah yang ditetapkan karena memiliki wewenang dalam memberikan pandangan dan analisis terhadap potensi ancaman asimetris bidang ekonomi khususnya dalam perjanjian kerja sama *Belt Road Initiatives (BRI)* ini, serta menimbang kemampuan waktu, jarak, dan ekonomi yang dimiliki oleh peneliti.

3.2.2 Waktu Penelitian

Agar perkembangan dan pencapaian penelitian ini lebih terarah dan tepat waktu, maka peneliti menentukan waktu penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu pelaksanaan							
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Jan	Feb	Mar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pembuatan Proposal								
2.	Proses Bimbingan								
3.	Seminar Proposal								
4.	Perbaikan Proposal								
5.	Penelitian Lapangan								
6.	Pengolahan Data dan Penyusunan Hasil Penelitian								
7.	Ujian Tesis								
8.	Perbaikan Naskah Tesis								
9.	Pengumpulan Tesis								

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2021

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Menurut Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Pertahanan, obyek penelitian adalah permasalahan, problem atau isu yang diteliti dan menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Didalam penelitian ini, objek penelitian adalah kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) ini sementara fokus dari penelitian ini adalah strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi. (Unhan Press, 2019)

Menurut Arikunto (2006), subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda, atau lembaga (organisasi) yang keadaannya akan diteliti. Dengan demikian subjek penelitian ini adalah orang dan lembaga yang terkait yang berfungsi sebagai *informan* mengenai tema penelitian yang sedang berlangsung yaitu strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman asimetris bidang ekonomi dalam kerjasama BRI.

Disampaikan oleh Hendarsono dalam (sebagaimana dikutip dalam Suyanto Bagong, 2005, p. 172), *informan* penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan uraian diatas sebagaimana yang diungkapkan John W. Creswell (2011), maka informan ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah informan ditentukan sesuai dengan kebutuhan terhadap data/informasi. Adapun informan pada penelitian ini telah disesuaikan dengan peran dan wewenangnya dalam menjabarkan strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman asimetris bidang ekonomi dalam studi kerja sama BRI. Maka dalam penelitian ini digunakan informan yang terdiri dari: informan kunci berjumlah 1 (satu) orang, informan utama berjumlah 2 (dua) orang, dan informan tambahan berjumlah 2 (dua) orang. Data mengenai informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Data Informan

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Kol. Adm Agung Karyanto S.Sos, M.Si	Kepala Sub Direktorat Sun Jaksarhaneg - Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan	Kementerian Pertahanan – Strategi Pertahanan
2	Letkol. Inf Kurniawan Firmuzi S, S.E	Analisis Kebijakan Madya Bidang Diplomasi Pertahanan – Direktorat Kerja sama Internasional	Kementerian Pertahanan – Strategi Pertahanan
3	Kol. Lek Dewa Gede Agung Putra,	Analisis Madya Bidang Perizinan	Kementerian Pertahanan –

	S.T		Potensi Pertahanan
4	Laksdya (Purn) TNI Dr. Desi Albert Mamahit	Ketua <i>Indonesia Research Development International (IRDI)</i>	<i>Indonesia Research Development International (IRDI)</i>
5.	Dr. Yono Reksoprodjo	Dosen Program Studi Peperangan Asimetris	Universitas Pertahanan

Sumber: Diolah oleh peneliti 2021

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2011), terdapat empat tipe prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi non partisipan maupun partisipan, wawancara dengan tipe tertutup hingga tipe terbuka, dokumen yang bersifat publik (seperti koran, laporan, dan hasil pertemuan), maupun yang bersifat privat (seperti jurnal dan catatan pribadi, surat, dan email), serta dokumen audiovisual yang meliputi foto, CD, dan VCD.

Sementara menurut Bungin (2007), metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen dari sekian teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipasi, bahan documenter, serta metode baru seperti metode bahan visual, dan metode penelusuran bahan internet.

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data penelitian, yaitu :

1. Wawancara

Pada teknik ini, peneliti menggunakan rumusan dari Creswell (2011) untuk melakukan wawancara yaitu : Menentukan pertanyaan

riset yang akan dijawab dalam wawancara. Adapun pertanyaan wawancara yang dipilih peneliti yaitu melaksanakan wawancara semi terstruktur, merekam dan menulis wawancara tersebut. Wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini agar apabila muncul pertanyaan diluar pedoman wawancara, namun masih ada kaitannya dengan tema penelitian dapat disampaikan kepada narasumber dan memperkaya hasil penelitian.

2. Studi dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen dapat bersifat pribadi, maupun resmi. (Bungin, 2007) Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari wawancara.

3. Metode Penelusuran Data Online

Perkembangan internet yang semakin pesat dan maju akhirnya dapat bermanfaat bagi penelitian guna mencari sumber data yang terdapat di Internet melalui penelusuran dalam jaringan (*online*). (Bungin, 2007) Data yang didapatkan melalui penelusuran online ini dapat berupa laporan, grafik, tabel, jurnal, dan lainnya. Metode ini menjadi pilihan yang baik dalam masa pandemic Covid-19 dimana penelusuran data dapat dilakukan secara mandiri dari rumah.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong (2016) keabsahan data memiliki beberapa kriteria meliputi keadaan yang mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan

dasar agar hal itu dapat diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan dan relevan, Moleong (2016) menyebutkan terdapat empat kriteria teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

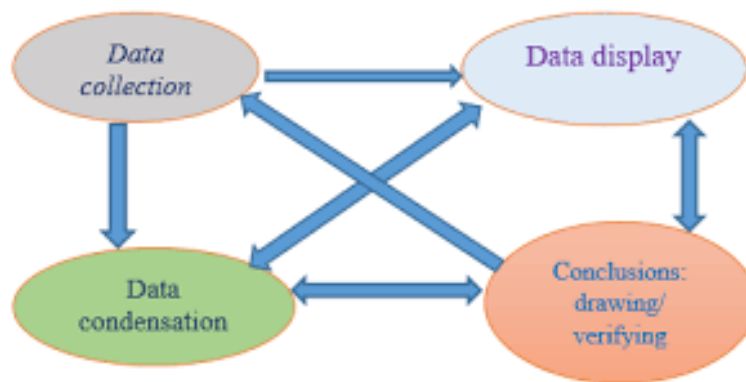
1. Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (*credibility*), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Perpanjangan keikutsertaan, yaitu kehadiran peneliti di lapangan hingga proses pengumpulan data sampai pada titik kejenuhan. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi dan menemukan distorsi yang dapat merusak data.
 - b. Ketekunan dan keajegan pengamatan, yaitu mencari dan melakukan pembatasan secara konsisten serta meningkatkan pengamatan dengan teliti dan rinci terhadap faktor-faktor yang menonjol. Hal ini dilakukan untuk menemukan aspek-aspek yang sangat relevan dengan persoalan yang diteliti.
 - c. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbedaan fakta dan pandangan yang diperoleh saat pengumpulan data. Triangulasi menurut Denzin (sebagaimana dikutip dalam Lexy J. Moleong, 2016, p. 330) dibedakan menjadi empat, yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan metode.

- d. Diskusi sejawat, yaitu melakukan diskusi dengan rekan-rekan sejawat untuk memperoleh pendapat lain dalam rangka pengabsahan data. Dengan cara ini, peneliti juga akan melakukan diskusi dengan dosen pembimbing serta rekan sejawat yang meneliti tentang perang informasi sebagai ancaman asimetris terhadap pertahanan negara.
2. Teknik keteralihan (*transferability*) dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan kejadian *empiris* tentang kesamaan konteks. Teknik ini dilakukan agar laporan hasil penelitian yang dilakukan dapat diaplikasikan terhadap seluruh populasi, dengan dasar penelitian yang dilakukan terhadap sampel yang mewakili seluruh kriteria populasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan menambahkan data uraian terperinci tentang yang diteliti, serta menambahkan tentang uraian seteliti dan secermat mungkin mengenai tempat penelitian diadakan sehingga dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian yang lain.
 3. Teknik kebergantungan (*dependability*) dilakukan dengan mengadakan replikasi studi. Ketika beberapa kali studi terjadi dalam kondisi yang sama dan diperoleh hasil yang sama, maka dapat dikatakan bahwa reliabilitasnya tercapai. Mencari kondisi yang benar-benar sama merupakan persoalan yang sulit dicapai.
 4. Teknik kepastian (*confirmability*), yaitu berkaitan dengan objektivitas. Sesuatu dikatakan objektif ketika pengalaman seseorang disepakati oleh banyak orang. Sesuatu yang objektif dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Jika nonkualitatif menekankan pada objektivitas orang, sementara penelitian alamiah menekankan pada objektivitas data.

Berdasarkan teknik keabsahan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengambil beberapa teknik keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (credibility) khususnya pada teknik Triangulasi dan Diskusi Sejawat.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (sebagaimana dikutip dalam Lexy J. Moleong, 2016, p. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.



Gambar 3.1 Bagan Analisis Data Interaktif

Sumber : Miles, Hubberman & Saldana 2014

Adapun proses analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan metode analisis data yang ditemukan oleh Miles and Huberman (2014) yaitu *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*data collection*) merupakan pengumpulan data dengan berbagai metode yang cocok antara lain dengan metode observasi non partisipasi, wawancara mendalam dengan informan dan metode pendukung berupa dokumen yang terkait dengan fenomena penelitian yang dilakukan.
2. Kondensasi data (*data condensation*) merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang merupakan keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, hasil wawancara, dan dokumen-dokumen empiris lainnya.
3. Penyajian data (*data display*) merupakan kegiatan penyajian data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti memahami hal-hal yang terkait dengan implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks narasi dan tabel sehingga semakin mudah untuk dipahami.
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*) adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dilapangan dan melakukan verifikasi. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti masih terbuka untuk menerima masukan yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Geoekonomi China dan Indonesia di Kawasan Asia

Geoekonomi merupakan studi mengenai aspek spasial, temporal, dan politik dari ekonomi dan sumber daya. geoekonomi sebagai bidang ilmu berasal dari geopolitik klasik. Dalam istilah yang lebih spesifik, dapat dipahami bahwa geoekonomi merupakan perpanjangan dari lingkup geopolitik yang diterapkan pada hubungan internasional di bidang ekonomi. Dari perspektif kontemporer, geopolitik mengacu pada analisis distribusi dan konfigurasi kekuasaan dalam sistem internasional dan pengaruhnya terhadap hubungan antar negara dalam politik internasional, serta morfologi strategis ruang dunia. Baik geopolitik dan geoekonomi secara intrinsik terkait dengan persaingan geostrategis antar negara. Namun, geoekonomi membatasi bidang analisis geopolitik dan menekankan pada relevansi kekuatan ekonomi sebagai faktor analisis (Jaeger, 2020).

Terma “Geoekonomi” atau ‘*geo-economics*’ sendiri pada awalnya digunakan dalam *Human Geography in the Air Age* oleh ilmuwan Amerika George T. Renner pada tahun 1942. Geoekonomi merupakan perkembangan dari geo-politik. Seorang ekonom dan konsultan dari Amerika, Edward N. Luttwak (1990) dalam karya nya “*From Geopolitics to GeoEconomics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce,*” mengatakan bahwa istilah ‘geoekonomi’ adalah nama dari sistem persaingan antar negara dalam dunia internasional yang berkembang pasca Perang Dingin (Priyono, 2017).

Sementara itu, geoekonomi didefinisikan sebagai sebuah gagasan kompleks yang mencakup kepentingan ekonomi dan keuangan dengan politik global dengan pertimbangan keamanan oleh Roger M. Kubarych dalam artikelnya yang berjudul “*Geo-economics Injects New Uncertainties into Troubled Markets*” pada tahun 2004. Jika kita melihat kembali kepada karya Sun Tzu yang berjudul *The Art of War*, terdapat pernyataan bahwa keunggulan tertinggi dari sebuah ‘perang’ adalah mampu menundukkan lawan atau musuh tanpa adanya pertempuran (Priyono,2017).

Persepsi bahwa perekonomian memperoleh dimensi baru dalam distribusi kekuatan global menempatkan disposisi sumber daya ekonomi sebagai faktor sentral dalam memahami status persaingan antarnegara. Dalam istilah praktis, arah aliran investasi, serta pola perdagangan, menentukan hubungan kekuatan geopolitik yang berdekatan. Dalam pengertian ini, ada penjajaran aspek ekonomi yang akhirnya membiaskan geopolitik klasik (Jaeger,2020).

Geoekonomi adalah studi tentang bagaimana perekonomian beroperasi dalam lingkungan internasional. Pada dasarnya, geoekonomi adalah studi akademis tentang pergerakan global modal, pasar, dan tenaga kerja. Geoekonomi juga memberi kita daftar kekuatan ekonomi, negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar, dan bagaimana pengaruhnya terhadap struktur kekuasaan. Aspek geografis dan demografis dari negara-negara tersebut dan kebijakan mereka sendiri tentang perdagangan internasional dan pengaruh komersial (Priyono,2017).

Geoekonomi berkembang dari pandangan realistis bahwa persaingan untuk mendapatkan kekuasaan relatif tidak hanya melalui sarana ekonomi dan militer, tetapi merupakan pendorong utama perilaku negara. Untuk memahami kompleksitas dunia internasional yang memiliki geografi yang

beragam, maka dibutuhkan definisi geoekonomi yang luas di mana kekuasaan dan saling ketergantungan memiliki hubungan yang tidak dapat diputuskan. Geopolitik terlibat dalam mobilisasi aset politik dan kekuatan politik yang mempengaruhi politik untuk mencapai tujuan ekonomi melalui kombinasi persaingan dan kerja sama (Grevi, 2011).

Sanjaya Baru mengartikan geoekonomi sebagai dampak timbal balik antara ekonomi dan geopolitik. Menurutnya, perkembangan ekonomi, seperti merosotnya kekuatan ekonomi suatu negara, dampak geopolitik, dan perubahan geopolitik, seperti pendudukan tanah, berpengaruh terhadap perekonomian. Dia menunjukkan kepada Jepang bahwa, meskipun negara ini menjadi kuat secara ekonomi pada tahun 1980-an, tidak dapat mengubahnya menjadi kekuatan geoekonomi, karena tidak dapat mengubah ekonominya menjadi kekuatan militer dan politik (Baru, 2012).

Sementara itu yang terjadi dalam perkembangan geoekonomi di kawasan Asia pada beberapa tahun terakhir adalah kebangkitan negara China yang mampu menyaingi pertumbuhan ekonomi negara maju dan menjadi kekuatan ekonomi baru tidak hanya di Asia, namun juga di dunia. Ekonomi telah menjadi faktor penentu pertumbuhan China selama beberapa dekade. Hal ini menyebabkan diadopsinya kebijakan luar negeri tertentu oleh negara ini. Seperti yang diantisipasi oleh Deng Xiaoping pada akhir tahun 1970-an bahwa sampai dalam waktu dekat, perang besar tidak akan terjadi dalam sistem internasional, strategi membuka diri terhadap dunia luar dan bergerak menuju pertumbuhan ekonomi berpusat pada kebijakan luar negeri China (Deng, 1985). Akibat persepsi tersebut, terciptanya dan kelanjutan hubungan ekonomi dengan berbagai negara, terutama negara maju, dan upaya menjaga stabilitas di lingkungan regional dan internasional menjadi inti dari politik luar negeri China.

Poin pentingnya, mengingat kondisi domestik dan internasional, pertumbuhan berbasis ekspor merupakan model ekonomi terpenting yang diandalkan Beijing setelah dimulainya era reformasi. Model ini telah memberikan kontribusi besar terhadap status China saat ini dalam sistem internasional. Alasan terpenting dari kegunaan model berorientasi ekspor adalah peran pelengkap ekonomi China dalam ekonomi global selama empat dekade terakhir. Namun, dengan pertumbuhan negara yang semakin meningkat, para pemimpin China menyimpulkan bahwa pola ini tidak lagi berguna untuk kelangsungan pertumbuhan negara (Asgarkhani, 2019).

Oleh karena itu, persyaratan untuk kelangsungan pertumbuhan ekonominya dan, sampai batas tertentu, perubahan posisinya dalam sistem internasional, telah membuat China mengandalkan model baru. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, para pengambil keputusan China menekankan pada langkah ke arah model ekonomi yang didasarkan pada "konsumsi domestik" dan "investasi luar Negeri". Di sisi lain, upaya China untuk mempromosikan posisi internasionalnya mengarah pada peran aktif dalam ekonomi internasional, dan sebagai hasilnya, model ekonomi baru dapat lebih memenuhi posisi China dalam sistem internasional (Asgarkhani, 2019).

Salah satu upaya China dalam model baru dari pertumbuhan ekonominya yakni 'investasi luar Negeri' adalah melalui skema kerja sama investasi *Belt and Road Initiative (BRI)*. Kerja sama pembangunan jalur transportasi ini menjadi andalan bagi China untuk mempermudah jalur perdagangannya ke negara-negara yang akan menjadi rekan kerja sama dalam bidang ekspor dan impor nya. Terutama di bawah kepemimpinan Xi Jinping yang telah dengan jelas mengabaikan nasihat terkenal Deng Xiaoping untuk tidak menonjolkan diri untuk mencapai sesuatu (Yan 2014), saat ini para elit China semakin yakin tentang kemampuan dan hak mereka untuk menempati posisi yang lebih sentral dalam mekanisme pemerintahan

global. Yang menjadi salah satu pendorong utama ketegasan baru China adalah perasaan bahwa tatanan kelembagaan yang ada mencerminkan dan memperkuat bentuk hegemoni Amerika yang bekerja melawan kepentingan China dan dirancang untuk menahan pengaruh internasional China (Zhao 2013). Apa pun manfaat dari analisis semacam ini, tidak diragukan lagi bahwa analisis tersebut menginformasikan pemikiran banyak aktor yang lebih berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri China yang tidak transparan (Jakobson dan Knox 2010).

Kedua, bentuk pasti yang akan diambil ambisi ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan, dan ada banyak eksperimen kebijakan baik di tingkat domestik maupun internasional. Pada tingkat pengaruh geoekonomi langsung yang terlihat pasti akan dikonsolidasikan oleh BRI, China telah menjadi sumber investasi dan keterlibatan langsung yang semakin penting dan berpengaruh dari Afrika hingga Amerika Latin, serta di dalam kawasan 'Asia' yang secara tradisional mereka miliki. didominasi (Das, 2009). Ada kesamaan yang mencolok antara ekspansi Jepang sebelumnya ke Asia Tenggara dan hubungan bilateral China saat ini dengan Afrika pada khususnya. Meskipun hubungan ini tidak selalu mulus atau tanpa ketegangan dan kontradiksi, Afrika menyediakan tempat uji coba penting bagi diplomasi sumber daya China yang berkembang dan upayanya untuk memastikan keamanan dan pengaruh ekonomi jangka panjang (Beeson, Soko, dan Yong 2011).

Ketiga, bentuk persis keterlibatan China di luar negeri mungkin memiliki implikasi bagi mitra ekonomi yang berbeda dan berbeda dari yang terkait dengan bentuk kapitalisme neoliberal 'Anglo-Amerika'. Seperti yang diamati oleh Jiang (2009), 'bagi mereka yang memiliki keyakinan pada "sosialisme dengan karakteristik Tionghoa", pengalaman reformasi China dalam tiga dekade terakhir dapat menjadi model bagi negara-negara

berkembang di Afrika tentang bagaimana menghapus kemiskinan dan membuat kemajuan dalam industrialisasi'. Bagi pengagum apa yang disebut 'konsensus Beijing', inilah tepatnya yang sangat penting tentang pengalaman perkembangan khas China: ini merupakan jalan alternatif menuju modernisasi dan ekspansi ekonomi yang tidak dibebani dengan tuntutan yang memberatkan dari yang lebih dikenal dan lebih historis dari konsensus Washington yang berpengaruh (Halper, 2010; Lin, 2011).

Akhirnya, sementara China mungkin mengembangkan semacam 'strategi besar' yang diasosiasikan mirip dengan AS dan kekuatan besar lainnya secara historis (Layne, 2006), hal tersebut adalah salah satu yang didasarkan pada prioritas China yang khas yang merupakan cerminan dari pengalaman sejarahnya yang unik (Goldstein, 2005). Prioritas nomor satu dari strategi besar China adalah kelangsungan hidup dari partai negara dan peran kepemimpinan Partai Komunis China (PKC). Seperti yang ditunjukkan Qin (2014), 'keamanan negara dan sistem politik adalah pertimbangan terpenting dalam merancang strategi internasional China', sebuah kenyataan yang membentuk semua pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Logika semacam inilah yang mendasari dan mengarahkan Wang (2011) untuk menyimpulkan bahwa China, seperti Jepang sebelumnya, telah mengadopsi pandangan keamanan yang 'komprehensif' yang 'menggabungkan masalah ekonomi dan non-tradisional dengan kepentingan militer dan politik tradisional'. Hubungan khusus dari kepentingan strategis, ekonomi, dan politik ini membentuk inti dari 'kepentingan nasional' China seperti yang didefinisikan oleh negara partai. Bahkan jika kita mengakui bahwa 'kepentingan nasional' dibangun secara sosial, secara historis merupakan manifestasi kekuatan politik yang bergantung (Weldes 1996), itu tidak membuat mereka menjadi kurang penting ketika menentukan kebijakan dalam dan luar negeri (Beeson, 2018).

Dengan perkembangan politik dan ekonomi dari negara China yang cenderung untuk lebih menunjukkan eksistensi perekonomiannya di mata dunia akhirnya mempengaruhi geopolitik dan geoekonomi di Asia. Indonesia tentu saja mendapatkan pengaruh dari perkembangan ekonomi China. Hubungan diplomatik Indonesia dan China khususnya pada bidang perdagangan dan perekonomian terlihat semakin intens, terutama ketika China memberikan pidatonya mengenai skema ambisius BRI pada tahun 2013 ketika mengunjungi Indonesia dan Kazakhstan yang pada saat itu BRI disebut sebagai *One Belt One Road* (OBOR) (Council on Foreign Relations.org).

Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi dari negara China juga harus menyesuaikan politik luar Negerinya. Dapat dilihat bahwa setidaknya dalam 5 tahun terakhir, perjanjian kerja sama baik dalam bidang perekonomian juga dalam bidang pertahanan banyak dilakukan dengan negara China. Mengingat bahwa selain memperkuat perekonomiannya, China juga melipatgandakan anggaran belanja pertahanannya. Tindakan tersebut dalam istilah hubungan internasional dapat disebut sebagai '*security dilemma*' dimana ketika negara lain mulai meningkatkan pertahanannya, maka negara disekitarnya akan ikut waspada. Hal ini dikarenakan penambahan kekuatan pertahanan seringkali mengarah pada indikasi untuk melakukan ekspansi dan meningkatkan *bargaining position* negara tersebut dalam politik internasional.

Merujuk dari Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yang memiliki visi "Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat" maka sesuai dengan sasaran strategis dari renstra Kemlu pada 2015-2019 salah satunya adalah melalui diplomasi ekonomi. Dalam renstra Kemlu tahun 2015-2019 juga dinyatakan bahwa diplomasi

ekonomi Indonesia akan difokuskan untuk mendukung penghapusan non-*tariff barrier* dalam perdagangan dengan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif, antara lain di kawasan Eropa Timur dan Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub Sahara Afrika, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia dan Asia yang juga mengalami pertumbuhan pesat (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

Perubahan pada lingkungan strategis pada tatanan global maupun regional di kawasan Asia dalam periode lima tahun terakhir membuat Indonesia harus menyesuaikan diri dengan dinamika yang berjalan di dunia internasional. China khususnya, mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang perekonomiannya. Kawasan Asia Timur akan menjadi pasar dan basis produksi tunggal (*single market and production base*). Perdagangan bebas telah menjadi agenda yang didorong oleh hampir semua negara di Asia Timur. Proses perundingan *Trans-Pacific Partnership* (TPP), kesepakatan *Region Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dan pembicaraan mengenai perdagangan bebas antara China, Jepang, dan Korea Selatan, merupakan contoh paling mutakhir dari kuatnya dorongan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan Asia (Fuddin, 2016).

Indonesia dalam upayanya untuk meningkatkan stabilitas keamanan tidak hanya berdiri pada sektor pertahanan yang bersifat militer semata. Namun juga mencakup pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Terciptanya stabilitas politik dapat membuka ruang terwujudnya keamanan yang stabil dan kondusif, yang akhirnya berpengaruh pada dinamika kegiatan ekonomi yang progresif. Hal ini karena pembangunan ekonomi dan stabilitas politik suatu bangsa merupakan dua entitas yang saling mendukung antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Kondisi keamanan yang stabil membuat pemerintah selaku pengelola negara dapat fokus pada cita-cita dan tujuan nasional

untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan rakyat Indonesia (Kusmanto, 2016).

Geoekonomi Indonesia pada dasarnya masih berdasarkan dengan prinsip politik luar Negeri Indonesia yang bersifat 'bebas dan aktif', sehingga menjalin kerja sama dengan berbagai negara adalah kunci keberhasilan dari perkembangan ekonomi di Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P Marsudi dalam teks Media Briefing mengenai Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2019-2024 menyatakan bahwa prioritas pertama dalam politik luar negeri Indonesia adalah penguatan diplomasi ekonomi. (Marsudi, 2019)

Penguatan diplomasi ekonomi ini memiliki beberapa langkah strategis yaitu :

1. Kapitalisasi Penguatan Pasar Domestik

Indonesia yang memiliki 260 juta jiwa merupakan pasar yang besar dalam kerja sama ekonomi di tingkat bilateral maupun regional. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai leverage atau daya tawar Indonesia dalam menjalin kerja sama internasionalnya. Namun dalam pelaksanaannya, diperlukan peningkatan kewaspadaan dalam menjaga pasar domestik dari produk asing yang masuk ke Indonesia secara illegal, serta aksi dumping dari negara lain.

2. Penguatan Pasar Tradisional dan Terobosan Pasar Non-Tradisional

Penguatan diplomasi yang diharapkan memberi dampak yang saling menguntungkan dengan pasar tradisional di Indonesia. BUMN dan swasta melalui *Indonesia-Africa Forum* dan *Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue* akan

melanjutkan hubungan kerja sama di bidang perdagangan barang dan jasa serta investasi dalam bidang pembangunan infrastruktur dan konstruksi di kawasan tersebut. Selain dengan negara-negara di Afrika, Indonesia juga melakukan kerja sama dengan kawasan Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Asia Pasifik.

3. Penguatan Perundingan Perdagangan dan Investasi

Prioritas dalam 5 tahun kedepan untuk penyelesaian berbagai perundingan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), *Free Trade Agreement* (FTA) dan *Preferential Trade Agreement* (PTA) dengan berbagai negara akan dipermudah dengan memprioritaskan kebermanfaatannya atas kepentingan Indonesia, memperkuat akses pasar dan saling menguntungkan.

4. Promosi Terpadu Perdagangan dan Investasi serta Mendorong *Outbound Investment*

Integrasi antara perdagangan dan investasi merupakan hal yang akan diupayakan dan dipromosikan sehingga menghasilkan dampak positif bagi Indonesia. Promosi luar negeri yang dilakukan sejalan dengan perbaikan iklim usaha dan investasi dalam negeri akan memberikan hasil yang lebih konkrit dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Selain itu, dengan adanya ekspansi BUMN dan sektor swasta di Indonesia, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan kebijakan *outbound investment* ke luar negeri yang sinergis dengan kepentingan ekonomi nasional. *Bilateral Investment Treaty* menjadi salah satu

sarana bagi Indonesia untuk melindungi investasinya di luar negeri secara adil.

Pengembangan ekosistem dan kebijakan yang mendukung perkembangan industri pengolahan sumber daya alam menjadi sektor yang akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Diplomasi ekonomi juga mencakup dan mendorong produk unggulan layak ekspor Indonesia serta mendukung dan membiayai proyek infrastruktur dan industri strategis ke luar negeri.

5. Menjaga Kepentingan Strategis Indonesia

Kepentingan strategis ekonomi Indonesia khususnya dalam bidang komoditi ekspor kelapa sawit juga merupakan sektor penting karena menyangkut kesejahteraan 16 juta rakyat Indonesia. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia juga akan melakukan penolakan terhadap tindakan diskriminatif yang ditujukan kepada ekspor kelapa sawit karena merugikan kepentingan nasional dan mengganggu pemenuhan kebutuhan mayoritas populasi dunia akan minyak nabati.

6. Mendorong Ekonomi 4.0 dalam Bidang Industri Digital, Ekonomi Kreatif dan Pengembangan SDM Indonesia

Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung dan meningkatkan produktifitas berbagai industri di Indonesia, maupun untuk membuka akses yang lebih besar terhadap kelompok menengah-bawah untuk dapat berkembang dan menjangkau pasar internasional melalui industri digital dan ekonomi kreatif (Marsudi, 2019).

Melihat bahwa sektor ekonomi adalah menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia dalam lima tahun kedepan, maka dapat disimpulkan bahwa geoekonomi Indonesia akan beradaptasi dengan dinamika perkembangan ekonomi global dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. Ekonomi bukan menjadi sektor pendukung dalam perkembangan politik internasional di era ini, namun justru menjadi sektor yang paling penting dalam meningkatkan *power politics* suatu negara dalam hubungan internasional.

Hal ini pula yang mendasari pertumbuhan kerja sama investasi Indonesia dan China, yang salah satunya melalui skema kerja sama investasi BRI ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai kerja sama BRI akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

4.1.2. Timeline Kerja sama *Belt and Road Initiatives* di Dunia (2013-2020)

Presiden Xi Jinping pertama kali mengumumkan rencana kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI) ini dalam kunjungan resminya ke Kazakhstan dan Indonesia pada 2013. Xi Jinping kemudian mengumumkan rencana Jalur Sutra Maritim Abad 21 pada KTT ASEAN tahun 2013 di Indonesia. Untuk mengakomodasi lalu lintas perdagangan maritim yang meluas, China akan berinvestasi dalam pengembangan pelabuhan di sepanjang Samudera Hindia, dari Asia Tenggara hingga Afrika Timur dan sebagian Eropa. Rencana tersebut memiliki dua cabang: Jalur Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim. Keduanya secara kolektif disebut pertama sebagai *One Belt One Road* (OBOR) namun akhirnya berganti nama menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI) (Council on Foreign Relations.org, 2020).

Strategi ini melibatkan investasi dan pembangunan infrastruktur secara massif di 152 negara yang tersebar di Eropa, Asia, Timur Tengah,

Amerika Latin, dan Afrika. Kata *belt* atau sabuk disini mengacu pada jalur darat berupa jalan dan rel kereta yang juga disebut sebagai Sabuk Ekonomi Jalur Sutra. Adapun *road* lebih merujuk pada jalur laut atau Jalur Sutra Maritim di Abad ke-21. Bank Dunia menyebut BRI sebagai upaya ambisius untuk meningkatkan kerja sama regional dan konektivitas antarbenua. Inisiatif ini bertujuan memperkuat infrastruktur, perdagangan, dan investasi antara China dengan 65 negara yang berkontribusi terhadap 30% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Program ini juga menyentuh 62% populasi dan 75% cadangan energi global (Kata Data, 2019).

China termotivasi untuk meningkatkan hubungan ekonomi global ke wilayah baratnya, yang secara historis telah terabaikan. Mempromosikan pembangunan ekonomi di provinsi barat Xinjiang, di mana kekerasan kelompok separatis meningkat, adalah prioritas utama, seperti mengamankan pasokan energi jangka panjang dari Asia Tengah dan Timur Tengah, terutama melalui rute yang tidak dapat diganggu oleh militer AS. Secara lebih luas, para pemimpin China bertekad untuk merestrukturisasi ekonomi untuk menghindari apa yang disebut jebakan pendapatan menengah. Dalam skenario ini, yang telah menjangkiti hampir 90 persen negara berpenghasilan menengah sejak 1960, upah meningkat dan kualitas hidup meningkat seiring dengan peningkatan manufaktur berketerampilan rendah, tetapi negara-negara berjuang untuk kemudian beralih ke produksi barang dan jasa yang bernilai lebih tinggi (Council on Foreign Relations.org, 2020).

Kerja sama BRI telah mengalami perkembangan dalam kurun waktu 5 tahun sejak diperkenalkan di dunia pada tahun 2013. Untuk mempermudah pemahaman mengenai timeline kerja sama BRI dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.1 Perkembangan Kerja sama *Belt and Road Initiative* tahun 2013-2019

Sumber : *Diolah oleh peneliti, 2021*

Timeline kerja sama BRI dimulai pada tahun 2013 yang merupakan tahun pertama kerja sama BRI diperkenalkan ke dunia. September 2013 Presiden Xi Jinping mengusulkan pembangunan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dalam pidatonya yang disampaikan di Universitas Nazarbayev di Kazakhstan. Pada Oktober 2013, Presiden Xi Jinping mengusulkan pembangunan Jalan Sutra Maritim Abad 21 dalam pidatonya di Indonesia (China.org.cn, 2017). Kemudian di bulan November 2013, sebuah resolusi yang diadopsi pada Sidang Paripurna Ketiga Komite Sentral Partai Komunis China ke-18 menyerukan untuk memajukan inisiatif BRI ini (Beijing Review.com, 2018). sebulan kemudian pada Desember 2013 Presiden Xi Jinping menyerukan

penguatan konektivitas infrastruktur dalam proses penerapan kerja sama BRI (China.org.cn, 2017).

Kemudian pada Februari 2014, Presiden Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin mencapai konsensus mengenai pembangunan dalam kerja sama BRI ini, serta hubungannya dengan Kereta Api Euro-Asia dengan negara Rusia. Mei 2014, Terminal logistik yang dibangun bersama oleh China dan Kazakhstan mulai beroperasi di pelabuhan Lianyungang di China timur. Hal tersebut merupakan platform nyata pertama di bawah kerangka Sabuk Ekonomi Jalur Sutra. November 2014 Presiden Xi Jinping menekankan perlunya mempercepat pengembangan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 selama pertemuan kedelapan Grup Pemimpin Pusat urusan Keuangan dan Ekonomi. Presiden Xi Jinping juga mengumumkan bahwa China akan menyumbang US \$ 40 miliar untuk mendirikan Silk Road Fund. Pada bulan Desember 2014 Konferensi Kerja Ekonomi Pusat diadakan di Beijing, menyoroti penerapan tiga strategi, yaitu Inisiatif Sabuk dan Jalan, pembangunan terkoordinasi Beijing-Tianjin-Hebei, dan sabuk ekonomi Sungai Yangtze (China.org.cn, 2017).

Selanjutnya pada Februari 2015 Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli menyerukan permulaan yang kokoh dari kerja sama BRI pada sebuah pertemuan di Beijing. Maret 2015 Perdana Menteri Li Keqiang menyerukan untuk memajukan kerja sama BRI dan mempromosikan pengembangan Koridor Ekonomi Bangladesh-China-India-Myanmar dan Koridor Ekonomi China-Pakistan. Setelah pidato utama Xi Jinping di Boao Forum for Asia Annual Conference, dia mengatakan penerapan kerja sama BRI mengikuti prinsip-prinsip konsultasi luas, kontribusi bersama, dan manfaat bersama (China.org.cn, 2017).

Kemudian pada bulan Maret 2015, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Kementerian Perdagangan negara China bersamasama mengeluarkan rencana induk pertama untuk inisiatif tersebut, berjudul *Visi dan Tindakan pada Pembangunan Bersama Sabuk Ekonomi dan Jalan Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad 21* (Beijing Review.com, 2018). Juni 2015, upacara penandatanganan *Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank* diadakan di Beijing. Perwakilan dari 57 calon anggota pendiri bank menghadiri upacara tersebut. September 2015 *United Nations Maritime-Continental Silk Road Cities Alliance* (Aliansi Kota Jalur Sutra Kontinental Maritim Perserikatan Bangsa-Bangsa) didirikan. November 2015, BRI muncul untuk pertama kalinya dalam *Macao SAR Chief Executive's Policy Address* (China.org.cn, 2017).

Selain itu, pada November 2015, China dan 16 negara Eropa Tengah dan Timur mengadopsi *Medium-Term Agenda for Cooperation* (Agenda Jangka Menengah untuk Kerja Sama), di mana mereka berjanji untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ditawarkan oleh kerja sama BRI. Dilanjutkan dengan peristiwa yang terjadi pada Desember 2015, yaitu berdirinya *The Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), sebuah lembaga keuangan multilateral yang berkomitmen untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Asia dan proyek di bawah kerja sama BRI (Beijing Review.com).

Kerja sama BRI ditetapkan sebagai tujuan utama dalam Rencana Lima Tahun ke-13 China (2016-2020) di awal tahun 2016 (Beijing Review.com, 2018). Kemudian, *Belt and Road Media Cooperation Union* (Serikat Kerja sama Media BRI) didirikan di Beijing. Jaringan penyiaran lintas batas "*Silk Road TV*" juga diluncurkan pada bulan April 2016. Juni 2016, Presiden Xi Jinping menyampaikan pidato berjudul "*Jointly Compose a New and Splendid Chapter of the Silk Road*" di Kamar Legislatif Majelis Tertinggi

Uzbekistan di Tashkent. Juli 2016 Pertemuan Asia-Eropa (ASEM) ke-11 ditutup di Ulaanbaatar, Mongolia. Konektivitas, kerja sama pragmatis, dan "China Plan" menjadi sorotan (China.org.cn, 2017).

Agustus 2016 Presiden Xi Jinping menghadiri simposium tentang kerja sama BRI yang menyerukan agar prakarsa ini terus dimajukan guna memberi manfaat bagi orang-orang di sepanjang rute. September 2016 Presiden Xi Jinping mengatakan selama KTT *Business 20* (B20) bahwa tujuan dari kerja sama BRI adalah untuk berbagi peluang pembangunan China dengan negara-negara di sepanjang rute dan mencapai kemakmuran bersama. Oktober 2016 Presiden Xi Jinping mengatakan kerja sama BRI ini memberikan peluang baru untuk kerja sama win-win antara China dan Bangladesh dalam artikelnya yang ditandatangani oleh sebuah surat kabar Bangladesh (China.org.cn, 2017).

Januari 2017 dimulai ketika kereta barang China-Eropa menjadi yang pertama dalam pikirannya mencapai London. Kemudian, pada 14-15 Mei 2017, diadakan *The Belt and Road Forum for International Cooperation* di Beijing. Pada Agustus 2017, 69 negara dan organisasi internasional telah menandatangani kesepakatan dengan China untuk melakukan upaya bersama untuk membangun kerja sama BRI ini (Beijing Review.com, 2018). Kemudian pada bulan Oktober 2017, kerja sama BRI telah dimasukkan secara resmi dalam Konstitusi Partai Komunis China (Safety4Sea.com, 2018).

Pada 2018, Senegal setuju untuk bermitra dengan China untuk bekerja sama dalam skema BRI ini, sekaligus menjadi negara Afrika barat pertama yang melakukannya (Beijing Review, 2018). Sekitar 95% dari 279 item pada daftar hasil *Belt and Road Forum for International Cooperation* telah diselesaikan per Juli 2018 (Safety4Sea.com, 2018). Lebih dari 100

negara telah menandatangani perjanjian untuk bergabung. Juga pada Agustus 2018 jumlah perjalanan barang China-Eropa mencapai angka 12.000 barang (Sikder, Dou dan Davi, 2020). Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan negara China mengenai *Jointly Promoting Cooperation within the Framework of the Global Maritime Fulcrum Vision and the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Matirime Silk Road Initiative (Belt and Road Initiative)* pada tanggal 23 Oktober tahun 2018.

Banyak perubahan yang telah terjadi selama 5 tahun kerja sama BRI ini dilaksanakan. Dalam lima tahun terakhir, perdagangan barang China dengan negara-negara di sepanjang *Belt and Road* ini melebihi 5,5 triliun USD. Investasi langsung China di sektor non-keuangan negara-negara tersebut mencapai 80 miliar dolar AS. Menurut Xinhua, dalam lima tahun terakhir, China juga telah membentuk 82 zona kerja sama ekonomi dan perdagangan luar negeri di negara-negara sepanjang rute, menginvestasikan 28,9 miliar dolar AS dan menciptakan sekitar 244.000 pekerjaan lokal. Dalam tujuh bulan pertama tahun 2018, perusahaan China meningkatkan investasi di 54 negara di sepanjang Belt and Road. Investasi baru yang ditambahkan sebesar 8,55 miliar USD mewakili peningkatan 11,8% dari tahun ke tahun. Kontrak konstruksi baru di sepanjang Belt and Road senilai 57,11 miliar USD (Safety 4 Sea.com, 2018).

Dalam periode tahun 2019, setidaknya ada 138 negara yang menyetujui dan bergabung dengan BRI (Sikder, Dou dan Davi, 2020). KTT BRI yang kedua yang digelar pada 26-27 April 2019 di Beijing direncanakan akan dihadiri oleh 37 kepala negara (Tirto.id, 2019). Indonesia menandatangani 23 MoU dalam KTT ini. Namun dengan mewabahnya virus Corona atau yang disebut sebagai COVID-19 di akhir tahun 2019 nampaknya menjadi polemik tersendiri bagi China dalam menjalankan proyek kerja sama BRI ini.

Pada tahun 2020 dan kedepannya dimana seluruh negara di dunia masih berjuang untuk bangkit kembali akibat krisis dan resesi ekonomi sebagai dampak dari wabah COVID-19 dapat menjadi hambatan bagi kelancaran kerja sama BRI ini. Retorika resmi Beijing adalah bahwa wabah COVID-19 hanya akan berdampak sementara pada BRI. Namun Dalam jangka pendek, BRI akan bermasalah. Proyek-proyek infrastruktur utama di Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan negara-negara lain mengalami kemajuan yang sangat lambat. *Worst case scenario* yang dapat terjadi adalah kerusakan ekonomi parah yang memerlukan permintaan besar untuk rekonstruksi, bahkan jika itu tidak dapat dipenuhi melalui sumber daya yang tersedia dan oleh tatanan kelembagaan global yang goyah. Halangan yang mungkin akan dihadapi BRI adalah kekurangan dana (Mata mata Politik.com, 2020).

Melihat perjalanan sejarah proyek ambisius China dalam kerja sama BRI ini dapat disimpulkan bahwa China masih memiliki harapan untuk membangun jalur sutra ekonominya. Terlepas dari situasi ekonomi yang memburuk akibat wabah COVID-19 yang juga diawali dari negara China, kerja sama BRI masih menjadi strategi bagi China untuk melakukan perluasan ekonominya ke negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang juga ikut menandatangani perjanjian kerja sama BRI ini. Mengenai kerja sama BRI antara negara China dan Indonesia akan dibahas pada sub bab berikutnya.

4.1.3. Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

Indonesia adalah komponen fundamental dari proyek *Belt and Road Initiative (BRI)* melihat bahwa BRI pertama kali diperkenalkan di Indonesia selain di Kazakhtan pada tahun 2013. Hubungan antara Indonesia dan China selama dekade terakhir sebagian besar telah bebas dari krisis atau

pergolakan nyata yang terjadi. menjadi ciri proyek BRI di beberapa negara Asia lainnya. Sejak tahun 2014, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo telah berupaya untuk membangun bangsa menjadi kekuatan maritim utama. Selain itu, China telah menjadi salah satu donor dan mitra dagang terbesar Indonesia, dan tawaran Presiden Xi Jinping untuk kemitraan dalam bidang maritim dan dukungan keuangan untuk proyek-proyek infrastruktur di bawah payung Jalan Sutra Maritim telah sangat membantu prospek Jokowi dalam mencapai tujuan maritimnya (The Asia Dialogue.com, 2019).

Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan negara China mengenai *Jointly Promoting Cooperation within the Framework of the Global Maritime Fulcrum Vision and the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road Initiative (Belt and Road Initiative)* pada tanggal 23 Oktober tahun 2018 (MoU BRI-GMF, 2018). Sementara kerja sama BRI di Indonesia dimulai pada tanggal 27 April 2019 di Beijing, ketika pemerintah Indonesia menandatangani 23 *Memorandum of Understanding* dalam agenda acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II *Belt Road Initiative* di Beijing. Kontrak kerja sama ini dilaksanakan secara *Business to Business (B to B)* antar perusahaan Indonesia dan China yang bekerja sama dalam proyek ini (CNBC Indonesia.com, 2019).

Namun, kerja sama antara Beijing dan Jakarta nyatanya tidak lepas dari konflik. *Nine dash line* nya China yang menandai klaimnya atas sebagian besar Laut China Selatan, berbenturan dengan kedaulatan Indonesia dan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atas Kepulauan Natuna. Indonesia telah berusaha untuk menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dengan mengganti nama bagian utara ZEE menjadi 'Laut Natuna Utara'. Indonesia dalam perspektif China juga agresif selama masa jabatan pertamanya, menahan dan menghancurkan kapal-kapal penangkap ikan yang dianggap beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia. Kapal

penangkap ikan ini tampaknya didominasi dari negara Vietnam, diikuti oleh Malaysia dan Filipina, meskipun beberapa berasal dari negara China. Sengketa yang sedang berlangsung ini mengancam merusak hubungan China-Indonesia bahkan sebelum dampak BRI menjadi perdebatan (The Asia Dialogue.com, 2019).

Meskipun hubungan antara kedua negara secara umum tetap kuat, namun implementasi BRI masih jauh dari kata mudah. Pembangunan infrastruktur di Indonesia harus melalui proses konsultasi yang menyeluruh. Hal ini seringkali berdampak pada penundaan proyek, pandangan negatif kepada pihak yang terlibat dalam konstruksi, sekaligus mengatasi keluhan publik yang lebih eksplosif di sekitarnya, yang berarti bahwa Indonesia mengalami protes yang lebih vokal terhadap proyek-proyek yang terlihat di tempat lain di jaringan BRI.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur dalam kerja sama kerja sama BRI ini, maka *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dibentuk sebagai lembaga pendanaan dalam proyek tersebut. Bank tersebut memiliki modal disetor US\$ 100 miliar pada Juni 2015. China memiliki saham terbesar di AIIB, yakni 26%. Indonesia menjadi donatur terbesar ke-8 untuk AIIB dengan setoran modal US\$ 672 juta yang dibayarkan bertahap dalam lima tahun. Sekitar 75% dari modal tersebut berasal dari negara-negara Asia yang menjadi anggotanya, sisanya dari negara-negara Oseania. Proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang mendapatkan pendanaan dari AIIB, antara lain proyek energi, manajemen air, pertanian, dan transportasi berbasis rel, baik *Light Rail Transit* (LRT) maupun kereta cepat (high speed rail/HSR) (Kata Data.co.id, 2019).

Jalur kereta api dianggap oleh Beijing sebagai proyek BRI terpenting di Indonesia. Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu proyek pembangunan transportasi antara Indonesia dan China. Pada September 2015, China mengalahkan Jepang untuk memenangkan hak untuk membangun jalur kereta api - karena tidak memberikan jaminan utang kepada pemerintah Indonesia.

Dengan panjang jalur yang mencapai 150 km dan menelan biaya sekitar USD5,9 miliar, Kereta Cepat Jakarta – Bandung ini 40 persen sahamnya dimiliki oleh *China Railway International*. Proyek tersebut dimulai pada Januari 2016, tetapi telah terjadi banyak ketegangan di sekitar proyek. Pada Maret 2017, angkatan udara Halim di Jakarta menangkap beberapa pekerja China yang terkait dengan proyek di pangkalan udara tersebut, dan pada Juli 2018 pembangunan dihentikan oleh tiga tuntutan hukum yang menuntut kompensasi dari akuisisi tanah (The Asia Dialogue.com, 2019).

Kejadian tersebut dan ditambah dengan adanya fakta bahwa pekerja yang tertangkap adalah eks-kombatan dari negara China tentunya menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Meskipun demikian, berkat proses penerimaannya, hingga Maret 2019 praktis semua pembebasan lahan (99 persen) sudah selesai dan akhirnya progres dilakukan. Perkeretaapian dijadwalkan selesai pada 2021: dua tahun di belakang tanggal penyelesaian yang semula diusulkan tetapi dengan persetujuan masyarakat setempat. Proyek kereta api ini mewujudkan paradoks di jantung BRI di Indonesia. Masalah seputar reklamasi lahan dan persetujuan menteri untuk proyek telah sangat memakan waktu mengingat perjanjian perizinan yang ketat, kekhawatiran dengan korupsi, dan masalah seputar kepemilikan (The Asia Dialogue.com, 2019).

Indonesia sendiri tidak lepas dari ekspansi ekonomi China sejak BRI diluncurkan. Tercatat bahwa nilai investasi China senilai US\$ 2,3 miliar untuk 1.562 proyek di Indonesia. Angka ini melibatkan seribu perusahaan dan 25 ribu pekerja dari China. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki konektivitas, dan menurunkan biaya logistik. Volume perdagangan antara China-Indonesia meningkat 23,5% menjadi US\$ 72,6 miliar pada 2018 (Kata Data.co.id, 2019). Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanyalah satu contoh diantara sekian banyak kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan China melalui skema kerja sama BRI ini.

Transfer teknologi dalam kerja sama BRI oleh China dilaksanakan melalui ekspor barang-barang berteknologi tinggi, seperti mesin dan peralatan elektronik. Namun, Indonesia mengekspor hasil sumber daya alam, seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). Meski nilai perdagangan kedua negara meningkat signifikan, Indonesia menghadapi defisit neraca perdagangan. Defisit perdagangan Indonesia dengan China di sektor non-migas meningkat dari US\$ 8,25 miliar pada 2013 menjadi US\$ 18,98 miliar pada 2018. Angka ini jauh dibandingkan dengan defisit perdagangan Indonesia dengan Jepang yang tercatat US\$ 2 miliar pada 2018.



Gambar 4.2 Neraca Perdagangan Indonesia terhadap China periode tahun 2015-2020

Sumber : Kementerian Perdagangan dalam artikel website Kata Data.co.id, 2019

Defisit neraca perdagangan ini merupakan sebuah gambaran bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang dari kerja sama BRI. Peningkatan variasi ekspor barang jadi selain bahan baku menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia ke negara China. Dalam perkembangan kedepan, Indonesia harus mampu menarik dan memperluas sektor investasi China di Indonesia , selain dalam bidang infrastruktur (Kata Data.co.id, 2019).

Selain itu, regulasi yang ketat dalam monitoring Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari China harus ditingkatkan. Kejadian penangkapan TKA yang merupakan eks kombatan di wilayah militer pangkalan udara Halim Perdanakusuma di Indonesia juga menjadi pertanda bahwa Indonesia masih lalai dalam mengatur dan mengawasi pesebaran TKA dari China di Indonesia. Negara harus mampu bersikap tegas mengatur masuknya TKA ke Indonesia. Background check secara berkala diperlukan demi menjaga keamanan dan pertahanan di Indonesia Hal ini diperlukan selain dalam bidang hankam, juga untuk memastikan pekerja domestik bisa bersaing dengan sehat dengan TKA yang masuk secara legal.

Gambaran umum objek penelitian mulai dari kawasan geoekonomi China dan Indonesia di Asia, awal mula pembentukan kerja sama BRI, serta *track record* proyek kerja sama BRI di Indonesia telah dipaparkan pada sub bab diatas. Penelitian akan dilanjutkan dengan paparan hasil pengumpulan data mengenai objek penelitian akan dibahas pada sub bab berikutnya.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Ancaman dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

4.2.1.1. Pro Kontra dalam Kerja Sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

Di dalam *Memorandum of Understanding Belt and Road Initiative (BRI) China dan Global Maritime Fulcrum (GMF)* Indonesia tercatat bahwa

Indonesia menyambut dan mendukung inisiatif pemerintah China untuk bersama-sama mempromosikan BRI dan GMF dengan tujuan pertukaran barang, teknologi, dan personel melalui konektivitas bersama guna mendorong pembangunan dan kemajuan bersama dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya, mendorong dialog dan integrasi antar peradaban serta mempromosikan pembangunan komunitas masa depan bersama bagi umat manusia (MoU BRI-GMF, 2018).

Namun demikian, selalu ada pro dan kontra terhadap setiap hal. Termasuk pada kerja sama BRI di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan berbagai narasumber, terdapat dua sudut pandang berbeda mengenai kerja sama BRI di Indonesia ini. Sebagian besar narasumber menganggap bahwa kerja sama BRI dari negara China di Indonesia ini membawa tidak hanya kepentingan bisnis, namun juga berbagai agenda

politik ekspansionis negara China. Sementara beberapa pendapat narasumber juga ada yang menyatakan bahwa kerja sama BRI ini murni hanya bisnis semata.

Hal ini tergambar dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Direktorat Sun Jaksarhaneg Dit Jakstra Strahan Kementerian Pertahanan, Kol. Adm Agung Karyanto (Wawancara, Desember 2020) yang menyatakan bahwa :

Tujuan utamanya dia (China) menggunakan kerja sama BRI ini untuk menguasai wilayah-wilayah di Asia Selatan, Indo Pasifik dan Asia Tenggara. Kerja sama akan mempermudah penguasaan khususnya di bidang ekonomi. Tujuan khususnya, berhubungan dengan klaim *Nine-Dash Line* nya China. Kerja sama ini akan membuat ketergantungan ekonomi terhadap China dan akan memberikan pengaruh dengan apa yang di klaim China.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Analis Madya Bidang Perizinan Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Kol. Dewa Gede Agung Putra (Wawancara, Desember 2020) yang berpendapat bahwa :

Kerja sama BRI ini ada kaitannya dengan ekonomi global. China ingin meruntuhkan perekonomian lawannya, dalam hal ini adalah negara Amerika. China ingin mengambil alih secara global melalui jalur ekonomi, finansial, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kerja sama perdagangan. Oleh karena itu, kita harus bijak menentukan strategi pertahanan dan keamanan kita, melalui diplomasi dan politik luar Negeri Indonesia. Namun menurut saya, kerja sama ini cenderung merugikan kita. Dan diperlukan langkah-langkah tertentu untuk mengatasi hal tersebut.

Selanjutnya Analisis Kebijakan Madya Bidang Diplomasi Pertahanan – Direktorat Kerja sama Internasional Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Letkol Inf Kurniawan Firmuzi (Wawancara, Desember 2020) berpendapat bahwa :

OBOR (*One Belt One Road – re : Belt and Road Initiative*) itu keterkaitannya sama infrastruktur sama pendanaan, jadi kaitan dengan infrastruktur pelabuhan itu yang termasuk dalam OBOR. Dan bagaimana manfaatnya ya bermanfaat karena kita memang membutuhkan itu (investasi). Infrastruktur yang dibangun ini ya gunanya kan untuk meminimalisasi *cost* mempermudah pergerakan tidak memusatkan pertumbuhan di satu tempat saja. Namun perlu diketahui bahwa semua hal didalam berdagang itu selau ada sesuatu di baliknya. Dan bukan saja dilakukan oleh China tetapi dilakukan oleh seluruh negara.

Selain melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Pertahanan, peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber dari pihak lembaga penelitian dan akademik. Dosen Universitas Pertahanan Jurusan Peperangan Asimetris, Dr. Yono Reksoprodjo (Wawancara, Desember 2020) berpendapat bahwa :

Kita harus mengetahui apa tujuan Indonesia bekerja sama didalam kerja sama BRI ini. Juga apa kepentingan China. Kita bisa melihat bahwa hal terbesar yang menjadi tujuan China adalah mengambil Sumber Daya Alam yang ada disini (Indonesia). Dan strategi perang asimetris adalah didasari oleh *deception*, seperti apa yang dikatakan oleh Sun Tzu. China menggunakan *deception* ini untuk melakukan investasi ke kita, dan kita termakan oleh strategi tersebut. Karena kita hanya melihat uang (keuntungan) nya, bukan ujung (*ends*) nya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua *Indonesia Research Development International (IRDI)*, Laksdya (Purn) TNI Dr. Desi Albert Mamahit (Wawancara, Desember 2020) yang menyatakan bahwa :

Karena inisiatif (BRI) ini adalah asalnya dari negara China, maka sudah tentu China akan lebih diuntungkan dalam Program ini. Negara lain yang mengikuti kerja sama ini hanya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah China. Sehingga akhirnya tergantung bagaimana negara tersebut mengambil manfaatnya juga. Jika negara tersebut cerdas, maka negara tersebut akan mendapat manfaatnya. Jika sebaliknya ya pasti merugi, dan ini adalah resiko dari kerja sama tersebut. Di Indonesia sudah ada beberapa kerja sama di bidang energi, pertambangan, dan transportasi. Kita tinggal lihat saja seberapa cerdas kita mampu bekerja sama dengan China.

Sebagian besar narasumber menyetujui bahwa kerja sama BRI ini memiliki tujuan lain selain bisnis, namun memiliki motif dibaliknya. Penguasaan dalam bidang ekonomi, hingga pengaruh politik khususnya pada kasus *Nine-Dash Line* di wilayah Laut China Selatan turut menjadi tujuan khusus dari kerja sama BRI ini. Terutama mengenai keuntungan dimana kerja sama ini diinisiasi oleh negara China dan sudah tentu China ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, baik secara materil maupun pengaruh politik terhadap negara yang bekerja sama.

Meskipun demikian, Indonesia memang membutuhkan investasi untuk mengembangkan perekonomiannya. Pembangunan infrastruktur, transportasi, penanaman modal asing, dan lain-lain diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi di Indonesia. Melalui kerja sama BRI ini, Indonesia diharapkan lebih cermat dalam menilai untung rugi yang dihasilkan

dalam kerja sama tersebut, agar dapat memberikan manfaat yang sepadan dengan apa yang diberikan oleh Indonesia dalam kerja sama tersebut.

4.2.1.2 Bentuk Ancaman dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024 yang baru disahkan di awal tahun ini telah menyatakan bahwa *Belt and Road Initiative (BRI)* termasuk dalam ancaman di kawasan regional Asia yang tercantum sebagai berikut :

Pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman yang dapat memicu instabilitas kawasan diantaranya konflik Laut China Selatan, konflik di Semenanjung Korea, dan konflik China-Taiwan. Selain itu, menguatnya kerja sama keamanan kelompok *Quadilateral Security Dialogue* yaitu Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang untuk mengimbangi strategi *Belt and Road Initiative (BRI)* China telah meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik sehingga instabilitas kawasan tersebut juga berpengaruh terhadap stabilitas Indonesia (Jakumhaneg, 2020-2024).

Terdapat setiap potensi ancaman dalam setiap perjanjian kerja sama, baik dalam bidang ekonomi, politik, hingga militer. Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai ancaman dari kerja sama BRI China di Indonesia. Ancaman tersebut terbagi atas 2 hal, yaitu ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia dan ancaman dalam bidang ekonomi dan isu neo-imperialisme China di Indonesia. Berikut akan dijabarkan lebih detail mengenai hasil wawancara mengenai topik tersebut.

a. Ancaman dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)*

Dalam bidang pertahanan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kerja sama Indonesia – China dalam skema *Belt and Road Initiative (BRI)* ini. Salah satu ancaman dalam bidang pertahanan adalah mengenai ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan. Klaim *Nine-Dash Line* China juga termasuk kedalam wilayah Indonesia, yaitu di wilayah perairan pulau natuna, Laut Natuna Utara. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Sun Jaksarhaneg Dit Jakstra Strahan Kementerian Pertahanan, Kol. Adm Agung Karyanto (Wawancara, Desember 2020) yang menyatakan bahwa :

Dengan penguasaan China dalam bidang ekonomi dan ada tujuan dalam tanda kutip klaim China (*Nine-Dash Line*) itu tentu saja akan menghambat perdamaian di lingkungan kawasan Asia ini, khususnya di wilayah Laut China Selatan. Dan Indonesia terlibat di dalamnya. Karena salah satu klaim China itu memasukkan Laut Natuna Utara menjadi wilayahnya. Yang kedua, dengan munculnya China sebagai kekuatan baru melalui penguasaan dalam bidang ekonomi, tentu saja akan berbenturan dengan kekuatan dari negara besar seperti Amerika. Perebutan hegemoni antara China dan Amerika akan mempengaruhi segi keamanan dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Selain isu mengenai keamanan kawasan, ancaman dalam bidang pertahanan juga terdapat dalam transfer teknologi yang dilakukan oleh Indonesia dan China. Khususnya dalam bidang alutsista. Kepala Sub Direktorat Sun Jaksarhaneg Dit Jakstra Strahan Kementerian Pertahanan, Kol. Adm Agung Karyanto menyatakan bahwa :

China akan berusaha merebut pasar alutsista dari negara besar di Indonesia. Terbukti sudah banyak alutsista kita yang berasal dari negara China. Ada roket, ada peluru kendali, rencananya juga radar. Itu akan mengganggu dalam hal penentuan pertahanan. Contoh kongkritnya, ketika kita membeli suatu alutsista, kebijakan kita bahwa alutsista tersebut harus memiliki interoperabilitas dengan alutsista yang lain. Ketika alutsista kita berasal dari negara yang berbeda, misalnya yang satu dari China dan yang lain dari Amerika, maka akan sulit menemukan interoperabilitasnya.

Pernyataan diatas juga didukung oleh Analis Madya Bidang Perizinan Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Kol. Dewa Gede Agung Putra (Wawancara, Desember 2020) yang berpendapat bahwa :

Kita paham dengan adanya prinsip 'No Free Lunch' diterapkan dalam setiap hubungan kerja sama antar negara. Tidak mungkin suatu negara memberikan riset terbaiknya dalam bidang teknologi kepada negara lain secara cuma-cuma. Contoh saja dalam bidang alutsista kita yang dibeli dari negara China. Kualitasnya cenderung lebih buruk dari apa yang mereka gunakan. Kualitas dari teknologi yang ditransfer ke Indonesia mungkin hanya yang biasa saja, atau bahkan mungkin yang kurang layak.

Selain itu, identitas dari Tenaga Kerja Asing (TKA) dari negara China juga menjadi salah satu perhatian dalam kerja sama BRI ini. Analis Madya Bidang Perizinan Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Kol. Dewa Gede Agung Putra (Wawancara, Desember 2020) menyatakan bahwa:

Semua kerja sama tentunya memiliki kepentingan didalam sebuah kerja sama. China memiliki masyarakat terbesar di dunia dengan jumlah hampir 1.3 Milyar manusia. Tentunya mereka akan memikirkan

cara bagaimana agar seluruh masyarakatnya dapat hidup sejahtera. Salah satu caranya adalah dengan mengirim tenaga kerja China ke negara lain melalui kerja sama, misalnya dengan adanya kerjasama BRI ini. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga kerja yang dikirim adalah komponen-komponen cadangan nya mereka. Hal tersebut akan menjadi ancaman bagi kita. Bukan hanya dari segi ekonomi namun juga mengancam sektor pertahanan kita.

Lebih lanjut mengenai ancaman dalam bidang pertahanan ini dijelaskan melalui kasus pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang lokasinya berada dekat dengan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Analis Madya Bidang Perizinan Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Kol. Dewa Gede Agung Putra (Wawancara, Desember 2020) menyatakan bahwa :

Hal ini juga merupakan ancaman bagi Indonesia. Jika melihat pandangan saya sebagai TNI AD, saya jelas tidak setuju dengan keputusan tersebut. Sektor pertahanan harusnya dijadikan prioritas dalam pembuatan kebijakan. Khususnya dalam kasus ini, kerahasiaan untuk suatu pangkalan militer itu diperlukan. Karena jika diketahui oleh musuh kekuatan kita akan melemah. Selain itu, pemerintah harus jujur dan tidak menutupi siapa saja yang datang ke Indonesia (sebagai TKA China). Karena ada kasus ketika beberapa (TKA China) yang kita tangkap di Halim, ternyata mereka adalah komponen cadangan. Kita harus ketat dalam mendata siapa saja yang masuk ke Indonesia. Karena kenyataan di lapangan, sangat mudah bagi orang (Asing) untuk membuat KTP di Indonesia. Ini adalah kelalaian kita dan merupakan tugas yang berat bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia.

Kejadian ditangkapnya 5 orang WNA China saat melakukan pekerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini terjadi pada tahun 2016. Kelima orang tersebut mengenakan seragam militer China dan ditangkap oleh Tim Patroli TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, karena memasuki area Halim Perdanakusuma tanpa izin. Saat ditangkap, mereka sedang melakukan pengeboran tanah di area tersebut.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, TKA China tersebut bukan tentara, melainkan kombatan. Selain itu, mereka juga tidak memiliki izin kerja. *Corporate Secretary* PT Wijaya Karya Suradi mengatakan para pekerja yang ditangkap TNI AU bukan merupakan karyawan perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan perintah untuk melakukan pekerjaan tersebut. "Mereka bukan orang Wika (PT Wijaya Karya) dan bukan atas permintaan Wika kegiatan tersebut sehingga kami tidak tahu perihal itu." (Warta Kota Tribun News.com, 2016).

Dalam wawancara penelitian dengan Dr. Yono Reksoprodjo (Wawancara, Desember 2020) mengenai lahan Kereta Cepat Indonesia China yang bersinggungan dengan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, beliau menganggap bahwa hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Beliau menyatakan bahwa :

Jika kita tidak mampu bayar (hutang), akan ada hal yang diambil alih oleh China, dan tidak menutup kemungkinan Kereta Api Cepat ini diambil alih. Padahal kita tahu bahwa Pangkalan AU di Halim juga merupakan *Emergency Escape Route* nya Kepala Negara Indonesia. Jika suatu saat mereka yang menggunakan kereta tersebut mengatakan bahwa mereka perlu lahan tersebut sebagai jalur kereta, kita bisa bilang apa? Jika infrastruktur tersebut sudah diambil alih oleh China. Dan kita tidak bisa mengklaim balik urusan tersebut karena hal

tersebut bersifat bisnis. Sementara Pangkalan AU Halim adalah basis militer. Ada fasilitas pertahanan disana. Jika pintu masuk kita dikuasai oleh asing (China) dan setiap kali kita ingin lewat disana tidak diberikan izin, kita mau bilang apa?

Namun terlepas dari segala ancaman dari kerja sama BRI China-Indonesia ini, terdapat pula opini bahwa pemerintah Indonesia juga cukup 'aware' terhadap resiko dan ancaman yang datang dari kerja sama BRI tersebut. Dalam wawancara dengan Analisis Kebijakan Madya Bidang Diplomasi Pertahanan – Direktorat Kerja sama Internasional Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Letkol Inf Kurniawan Firmuzi (Wawancara, Desember 2020) beliau berpendapat bahwa :

Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan negara lain semuanya memiliki potensi (ancaman). Bagaimana dia melaksanakan penekanan terhadap kita pada akhirnya menyerahkan sedikit kedaulatan kita terhadap suatu wilayah. Ini merupakan ancaman non militer, dan penanggulangan ancaman non militer dilakukan oleh K/L (Kementerian dan Lembaga). Berarti kita (Kemhan) hanya mendukung mereka, bagaimana mereka mengantisipasinya. Jadi potensi tersebut ada, tetapi kita sudah punya strategi untuk mencegahnya. Dan menurut saya, kita punya kemampuan untuk melakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ancaman dalam bidang pertahanan dalam kerja sama BRI, terdapat setidaknya 4 aspek yang *vulnerable* dengan adanya kerja sama tersebut. (1) Pertama, klaim *Nine-Dash Line* China di wilayah Laut Natuna Utara, Indonesia. (2) Kedua, mengenai transfer teknologi terkait perdagangan alutsista Indonesia-China. (3) Ketiga, mengenai identitas Tenaga Kerja Asing asal China yang tidak memiliki izin untuk melakukan pekerjaannya, serta adanya indikasi

merupakan kombatan atau komponen cadangan dari negara China. (4) Keempat, ancaman mengenai pengambil-alihan infrastruktur sebagai konsekuensi atas kegagalan pembayarah hutang, khususnya dalam kasus Kereta Api Cepat Jakarta Bandung yang mana proyek tersebut bersinggungan dengan basis militer TNI AU di wilayah Halim Perdanakusuma, Jakarta.

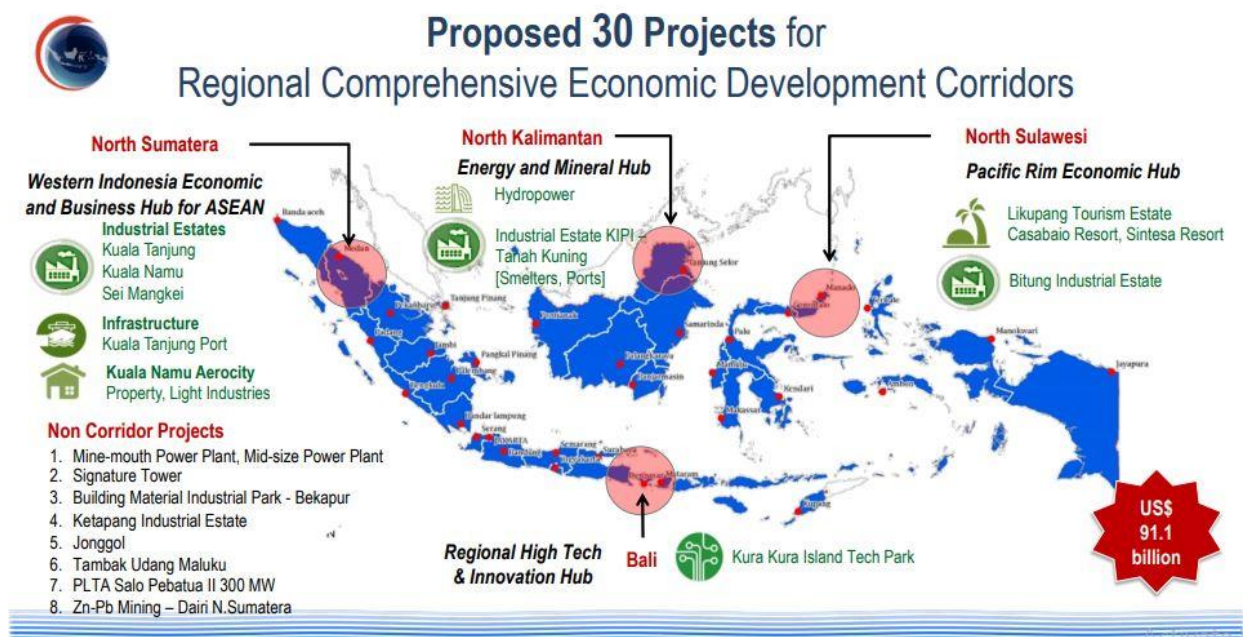
Selain ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia, terdapat pula ancaman dalam bidang ekonomi dan adanya pengaruh neo-imperialisme China pada kerja sama BRI ini. Hal tersebut lebih lanjut akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

b. Ancaman dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruh Neo-imperialisme China dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)*

Selain dalam bidang pertahanan dan keamanan, dampak kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* ini juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Pengaruh Neo-Imperialisme China di Indonesia juga menjadi salah satu ancaman yang terdapat dalam kerja sama ini. Menurut Dr. Yono Reksoprodjo, (Wawancara, Desember 2020) salah satu ancaman dalam bidang ekonomi adalah terkait pembayaran hutang dan pengambil-alihan infrasturktur sebagai konsekuensi gagal bayar hutang dalam kerja sama BRI. Beliau menyatakan bahwa :

Resiko terbesarnya adalah ketika hutang kita sudah jatuh tempo namun kita tidak bisa mengembalikan modal. Karena yang terpenting dalam urusan pembayaran hutang bukan pada rasio hutang nya, namun kemampuan untuk membayar hutang atau cicilan hutang ketika sudah jatuh tempo. Hal inilah yang terjadi di beberapa negara. Mereka jatuh tempo namun tidak bisa membayar kemudian infrastrukturnya diambil alih. Dan artinya, jika sahamnya sebagian besar telah

berpindah, maka perusahaan yang awalnya hanya kerja sama dengan perusahaan asing, akan menjadi perusahaan asing seutuhnya, karena saham nya lebih besar. Jadi perusahaan tersebut full PMA (Penanaman Modal Asing). Banyak hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan dalam perjanjian tersebut. Bahwa yang namanya hutang yang dilakukan antar swasta khususnya yang mengelola sumber daya nasional akan memiliki dampak terhadap penguasaan atau kontrol atas konsesi-konsesi milik negara yang di karyakan kepada perusahaan swasta nasional.



Gambar 4.3 Proposal 30 Proyek untuk *Regional Comprehensive Economic Developments Corridors* BRI-GMF

Sumber : Kemenko Maritim dan Investasi Republik Indonesia, 2020

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak industri dalam bidang ekonomi, transportasi, hingga dalam bidang energi dan

mineral dari kerja sama BRI di Indonesia. Hal ini akan menjadi kerugian bagi Indonesia apabila terjadi pengambil-alihan infrastruktur sebagai konsekuensi atas kegagalan pembayaran hutang. Pengambilalihan infrastruktur sebagai konsekuensi kegagalan pembayaran hutang telah terjadi di beberapa negara. Contohnya di negara Srilanka yang selama 99 tahun Pelabuhan Hambatota nya dikelola oleh negara China dan Gwadar Port di Pakistan yang selama 44 tahun diambil alih hak pengelolaannya sebagai sanksi kegagalan pembayaran hutang.

Selain itu, dampak ekonomi tentunya akan mempengaruhi jumlah anggaran, termasuk anggaran pertahanan suatu negara. Disampaikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Diplomasi Pertahanan – Direktorat Kerja sama Internasional Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Letkol Inf Kurniawan Firmuzi (Wawancara, Desember 2020) yang berpendapat bahwa :

Dampak terbesar akan dirasakan oleh sektor ekonomi. Namun, begitu ekonomi tidak terbangun dengan baik tentunya akan berdampak pada seluruh aspek, termasuk mengenai anggaran angkatan bersenjata. Kita lihat bahwa anggaran PDB China itu kurang lebih menggunakan 5% dari PDB nya yang sangat besar. Sementara Indonesia hanya dalam kisaran 1% dari PDBnya. Andai kata PDB kita semakin meningkat tentunya anggaran kita akan semakin kuat. Ketika ekonomi kita melemah karena desakan yang diatur oleh China dan ekonomi kita tidak berjalan dengan baik dan mengalami penurunan, tentunya anggaran pertahanan kita akan menurun. Karena berdasarkan dengan hitungan persen dari PDB. Hal ini yang menyebabkan mengapa ketika ancaman yang datang adalah ancaman non militer, yang terdepan dalam menghadapinya adalah adalah K/L (Kementerian dan Lembaga).

Selain itu, terdapat pula ancaman dari pengaruh neo-imperialisme China yang terdapat dalam kontrak *Turnkey Management Project* yang merupakan regulasi dari kerja sama BRI China di Indonesia. Aturan yang diterapkan dalam regulasi tersebut mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) China, pemakaian bahan baku atau material untuk pembangunan proyek dan transfer teknologi China di Indonesia.

Peneliti mewawancarai Kepala Sub Direktorat Sun Jaksarhaneg Dit Jakstra Strahan Kementerian Pertahanan, Kol. Adm Agung Karyanto (Wawancara, Desember 2020) mengenai hal tersebut, dan beliau menyatakan bahwa hal tersebut adalah resiko dari negara lain yang bekerja sama dengan China, termasuk Indonesia. Beliau menyatakan bahwa :

Dalam hal ini strategi China adalah bagaimana bekerja sama dengan negara lain melalui *transfer of technology*, tapi dia (China) juga harus mendapat keuntungan. Misalnya dari segi penyerapan tenaga kerja yang menjadi permasalahan di Negara China. Itu adalah resiko dari negara lain yang bekerja sama dengan China, termasuk Indonesia. Masuknya tenaga kerja dari China akan mempermudah hegemoni China di Indonesia, karena dengan banyaknya TKA China di Indonesia maka akan lebih mudah bagi negara mereka untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari Indonesia dalam konteks ekonominya.

Pendapat diatas serupa dengan opini dari Ketua *Indonesia Research Development International* (IRDI), Laksdya (Purn) TNI Dr. Desi Albert Mamahit (Wawancara, Desember 2020) yang berpendapat bahwa *Turnkey Management Project* dalam kerja sama BRI yang telah diketahui dan disetujui oleh pemerintah Indonesia. Beliau menyatakan bahwa :

Jika sudah melakukan negosiasi, artinya kedua belah pihak yang bekerja sama sudah memperhitungkan keuntungannya, meskipun

tidak 50:50. Tergantung pembagian saham terbesar dipegang oleh pihak mana. Kalau kita bicara mengenai *Turnkey Management Project*, hal tersebut merupakan kesepakatan dari pihak China dan Indonesia. Karena kita bicara mengenai bisnis, bukan sosial. Ini adalah kesepakatan antara perusahaan China dan perusahaan swasta Indonesia.

Namun terdapat pula beberapa pendapat narasumber yang menganggap bahwa strategi tersebut merupakan bentuk perang asimetris China dalam bidang ekonomi di Indonesia. Dosen Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan, Dr. Yono Reksoprodjo menyatakan bahwa “Sisi asimetris yang paling terlihat dalam hal kerja sama ini adalah mereka masuk tidak menggunakan tentara maupun senjata, itu sudah termasuk asimetrik. Mereka menguasai sesuatu tanpa perang fisik. Perangnya sendiri dimulai dengan memberikan izin mereka untuk masuk.” (Wawancara, 2020).

Hal serupa juga disampaikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Diplomasi Pertahanan – Direktorat Kerja sama Internasional Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Letkol Inf Kurniawan Firmuzi (Wawancara, Desember 2020) yang menyatakan bahwa :

Semua kerja sama ada potensi ancamannya. Jadi kalau ancaman asimetris jadi ada. Ancaman asimetrisnya itu apa? Ya itu dengan dagang memasukkan pengaruhnya bisa, kemudian dia nanti akan mengatur kita, mungkin akan menatur *tax* (pajak) kita, undang-undang kita. Contohnya seperti di Eithopia. Jika saya melihatnya dari perspektif hubungan internasional, secara ekonominya mungkin memang ada kemungkinan dari itu jadi suatu negara di dunia ini ada punya kecenderungan untuk meluaskan lapangan pekerjaannya dan menjual usahanya. Dan ini pengaruhnya adalah sangat jauh sekali

ketika di PBB. Mengapa demikian? Karena di PBB itu *one country one vote*. Jika nanti pada saat semua ini (pengaruh) dia (China) sudah kuat, dia mengarah ke negara-negara yang berkembang di jalur asia pasifik selatan sampai ke arah afrika termasuk amerika selatan. Bisa di bayangkan jika dari 100 sekian negara di PBB itu mendukung apapun yang China lakukan karena adanya pengaruh kerja sama dengan negara China.

Terdapat pula beberapa potensi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi yang menjadi dampak dari kerja sama BRI ini. Namun menurut Ketua *Indonesia Research Development International (IRDI)*, Laksdya (Purn) TNI Dr. Desi Albert Mamahit (Wawancara, Desember 2020) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya sudah menganalisis setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Beliau menyatakan bahwa :

Saya pikir pemerintah sudah mengukurnya. Kita harus percaya pada pemerintah Indonesia. Karena kerja sama ini dilaksanakan tentunya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang sesuai dengan proyek Penanaman Modal Asing (PMA) yang diajukan. Selain itu tentunya dalam pelaksanaan proyek tersebut juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan K/L yang terkait. Jadi, sebelum kontrak tersebut berjalan, tentu sudah melalui prosedur yang berlaku. Jika perusahaan Indonesia dan China ini mampu memenuhi persyaratan perizinan tersebut dengan baik, pasti akan berjalan dengan lancar.

Hal ini juga ditemukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairani, B., Khafivah, D.N, Susanti, R.W. dalam Prosiding Senas POLHI ke-

2 Tahun 2019 FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan judul “*Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Belt And Road Initiative (BRI) Republik Rakyat China*” yang hasil penelitiannya adalah Indonesia bekerja sama dengan China dalam BRI yang tidak lepas dari kepentingan politik maupun ekonomi Indonesia. Penelitian tersebut mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya BRI ini juga dapat mempermudah visi presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia agar adanya pemerataan perekonomian antar daerah di dalam maupun di luar pulau Jawa. Pemerintah juga telah menyetujui skema kerja sama *Business to Business (B2B)*, bukan *Government to Government (G2G)*. Sehingga APBN Indonesia tidak terganggu dengan adanya proyek kerja sama tersebut (Khairani, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disintesaikan bahwa terdapat sudut pandang yang jauh dari sekedar bisnis, yaitu menyangkut (1) penguasaan sumber daya alam, (2) masuknya pengaruh dari kerja sama ekonomi tersebut terhadap pembuatan kebijakan di Indonesia, serta (3) imbas pengaruh politik dalam tatanan dunia internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menyusun strategi untuk menangkal ancaman yang mungkin terjadi dalam kerja sama BRI di Indonesia dengan sebaik mungkin. Hasil penelitian mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi hal tersebut akan dibahas pada sub bab berikutnya.

4.2.2 Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)*

Telah disampaikan pada sub bab sebelumnya mengenai ancaman terkait kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia. Termasuk pula beberapa negara yang menjadi contoh atas kegagalan pembayaran hutang

(Sri Lanka, Pakistan, dll). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan skema “*Business to Business*” dalam kerja sama BRI di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir resiko gagal bayar hutang, dan hutang tersebut tidak dihitung sebagai hutang negara. Untuk membahas mengenai strategi ‘*business to business*’ dalam kerja sama BRI akan dijabarkan dalam sub bab berikut.

4.2.2.1 Strategi “*Business to Business*” dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)*

Skema “*business to business*” dalam kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* ini dianggap menjadi strategi yang cukup baik untuk menghindari beban hutang negara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan “Ada yang memperingati *debt trap*, itu untuk skemanya tidak seperti kita. Kita tidak melakukan perjanjian *G to G* (antar pemerintah), kita gunakan skema *B to B* (antar badan usaha). Itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini.” (Antara News, 2019)

Namun tentunya masih terdapat celah dalam skema ‘*Business to Business*’ yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Analis Madya Bidang Perizinan Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Kol. Dewa Gede Agung Putra (Wawancara, Desember 2020) menyatakan bahwa :

Memang strategi tersebut diharapkan menjadi cara yang tepat dalam melaksanakan kerja sama BRI ini. Namun perlu diperhatikan bahwa Indonesia sudah memiliki hutang sekitar 6000 Trilyun. Perlu diperhatikan berapa hutang swasta, hutang negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan skema *business to business*, namun jika BUMN ikut

berhutang maka artinya negara juga ikut berhutang. Akhirnya negara juga turun tangan untuk ikut membayar.

Kereta Cepat Jakarta Bandung menjadi salah satu contoh proyek dimana BUMN masih terlibat dalam kerja sama yang seharusnya '*business to business*' ini. BUMN sejatinya adalah perusahaan milik negara, dan otomatis hutang tersebut berada dalam tanggung jawab negara. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bertanggung jawab atas pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Perusahaan itu merupakan gabungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60% saham), dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co Ltd (40% saham). Konsorsium perusahaan Indonesia dipegang oleh Wijaya Karya menjadi pemegang saham paling besar, yakni 38%. Lalu, PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT KAI masing-masing memiliki 25% saham. Sisanya dipegang oleh Jasa Marga, sebesar 12% (Databoks Kata Data.co.id, 2020).

Dr. Yono Reksoprodjo (Wawancara, Desember 2020) juga menyatakan bahwa ada konsekuensi lebih lanjut dari penerapan strategi *business to business* tersebut. Beliau menyatakan bahwa:

Langkah cerdas menurut pemerintah Indonesia adalah membiarkan perusahaan swasta yang melakukan kerja sama tersebut. Bukan pemerintah. Tapi yang '*not so smart*', pemerintah seharusnya paham apabila terjadi kerugian dari perusahaan swasta tersebut maka akan ada yang berpindah tangan (saham). Karena perusahaan (yang melakukan investasi) tidak akan mau merugi. Karena investasi tujuannya adalah mencari keuntungan.

Selain itu, menurut Kepala Sub Direktorat Sun Jaksarhaneg Dit Jakstra Strahan Kementerian Pertahanan, Kol. Adm Agung Karyanto (Wawancara, Desember 2020) menyatakan bahwa :

Sebenarnya strategi tersebut baik, namun yang perlu digarisbawahi adalah Indonesia harus mampu menempatkan diri terlebih dahulu. Politik Indonesia adalah politik bebas aktif. Meskipun kerja sama dengan China tersebut bersifat *business-to-business*, namun sisi pemerintahan akan terpengaruh, termasuk kebijakan didalamnya. Hal tersebut harus dapat dipahami dan diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.

Mengenai strategi Indonesia dalam bekerja sama dengan China, Analisis Kebijakan Madya Bidang Diplomasi Pertahanan – Direktorat Kerja sama Internasional Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Letkol Inf Kurniawan Firmuzi (Wawancara, Desember 2020) yang memiliki pendapat sebagai berikut:

Indonesia sejauh yang saya pahami bahwa dengan tingkat rasio hutang dan segala macamnya masih mampu dan menyanggupi untuk membayar hutang. Oleh karena itu, kemungkinan yang terjadi di beberapa negara lain mungkin tidak akan terjadi di Indonesia. Menurut saya, membayar hutang kan sudah ada perjanjiannya ada jatuh temponya, dan walaupun misalnya pada suatu saat kita mengalami sesuatu kendala sehingga tidak bisa membayar (hutang) tepat waktu, kita bisa meminta reschedule ulang.

Selain itu, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi sebagai data sekunder (pendukung). Penelitian yang dilakukan oleh Wibawati, S.W., Sari, M.I., Sulistyanti, Y.A. (2018) dalam Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 No.2, 2018 Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan dengan judul penelitian “*Potensi Dan Tantangan One Belt One Road (OBOR) Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Maritim*” mendapatkan hasil bahwa pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan yang datang

dari China dengan melakukan pengawalan terhadap kepentingan nasional Indonesia dalam OBOR. Sinergitas antar Kemenko Maritim, Kemenko Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut dibutuhkan dalam menjaga stabilitas Indonesia agar mampu melakukan kerja sama BRI ini dengan baik dan tetap menjaga kedaulatan negara.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi “*business to business*” didalan kerja sama BRI, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. (1)Pertama, mengenai keikutsertaan BUMN dalam proyek kerja sama BRI yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan swasta. (2) Kedua, mengenai pembagian saham dalam kerja sama BRI di Indonesia. Dan (3) Ketiga, pengaruh politik yang menjadi dampak dari kerja sama BRI di Indonesia.

Strategi ‘*Business to Business*’ ini nyatanya masih memiliki celah untuk merugikan Indonesia jikalau tidak mampu mengatasi ancaman yang terdapat dalam kerja sama tersebut, Untuk mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi, dibutuhkan *contingency plan* dalam mengatasi permasalahan dapat timbul kedepannya.

4.2.2.2. *Contingency Plan* dalam Mengatasi Ancaman dari Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)*

Contingency plan dibutuhkan untuk menjadi pedoman mengenai langkah-langkah dan keputusan yang harus diambil ketika Indonesia berada dalam situasi sulit, terkait dengan kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* ini. Beragam skenario terburuk dapat terjadi apabila Indonesia gagal membayar hutang terhadap China. Salah satunya, menurut Kepala Sub Direktorat Sun Jaksarhaneg Dit Jakstra Strahan Kementerian Pertahanan, Kol. Adm Agung Karyanto (Wawancara, Desember 2020) adalah mengenai

klaim *Nine-Dash Line* China di kawasan Laut China Selatan. Beliau berpendapat bahwa :

Kasus Natuna adalah yang paling mungkin untuk menjadi *worst case* apabila Indonesia gagal membayar hutang kepada negara China. Kedaulatan kita akan sangat terganggu. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut tentunya Kementerian Luar Negeri yang akan menjadi *leading sector* dan Kementerian Pertahanan tentu akan mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemlu. Kita harus membangun hubungan yang baik khususnya dengan khususnya dengan negara ASEAN dan negara yang merasa 'terganggu' dengan strategi nya China, khususnya Australia, Amerika, India dan lain-lain. Sehingga ketika kita kesulitan dengan China, akan ada negara lain yang siap untuk membantu kesulitan tersebut.

Politik luar Negeri bebas aktif Indonesia dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Indonesia dapat mengembangkan potensinya dalam bidang sumber daya alam dan menjalin kerja sama dengan negara lain untuk dapat membantu Indonesia mengatasi *worst case scenario* dalam kerja sama BRI tersebut. Kepala Sub Direktorat Sun Jaksarhaneg Dit Jakstra Strahan Kementerian Pertahanan, Kol. Adm Agung Karyanto (Wawancara, Desember 2020) berpendapat bahwa:

Jika Indonesia mengalami ketergantungan secara ekonomi dengan negara China harus diimbangi dengan kedekatan dengan negara lain. Sehingga ketika kita kesulitan dengan China, akan ada negara lain yang siap untuk membantu kesulitan tersebut. Selain itu Indonesia juga harus memperhitungkan geoekonomi dan geostrateginya. Potensi Indonesia harus digali lebih dalam lagi, sehingga dapat menjadi alternatif pembayaran hutang terhadap negara China, dengan

tidak mengorbankan kedaulatan, ketergantungan, dan keutuhan wilayah Indonesia.

Dosen Universitas Pertahanan, Dr. Yono Reksoprodjo (Wawancara, Desember 2020) juga menyatakan bahwa potensi sumber daya alam Indonesia dapat dipergunakan sebagai *contingency plan* dalam mengatasi dampak jika terjadi kerugian dalam kerja sama BRI ini. Beliau menyatakan bahwa :

Untuk *contingency plan*, pertama-tama untuk pembangunan infrastruktur dan pengolahan sumber daya alam, pemerintah harus upayakan sendiri. Swasta nasional yang mau ikut disana dibatasi untuk bikin kerja sama dengan perusahaan asing. Pemerintah mendorong investasi asing tapi untuk industrialisasi *non-raw material*. Jadi industri nya pada bidang proses. *Raw material* harus kita kuasai. Jadi tambang-tambang bahan mentah kita tidak boleh dikelola oleh asing, dan wajib dikelola secara nasional. Jika itu dilakukan maka hal tersebut akan menjadi modal yang sangat besar. Jika nanti ada kerugian disitu maka pabrik prosesnya mungkin diambil alih, namun sumber daya alam Indonesia masih terjaga.

Analisis Kebijakan Madya Bidang Diplomasi Pertahanan – Direktorat Kerja sama Internasional Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Letkol Inf Kurniawan Firmuzi (Wawancara, Desember 2020) juga menyatakan bahwa Indonesia dapat mencari keuntungan dengan melakukan kerja sama dengan negara lain dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia, sebagaimana yang beliau sampaikan :

Ketika kita tidak bisa membayar hutang dengan China, kita akan mencari pertolongan lain dari negara lain untuk membayar hutang ini. Tetapi syarat nya satu kita mencari keuntungan dari negara lain.

Indonesia, kita banyak yang belum kita kelola kan? Misalnya panas bumi kita kelola dengan baik kemudian kita jual ke Singapore per megabite, bisa gak? Bisa. Kenapa tidak. Karena Singapore tidak ada tempat lain untuk mengembangkan listrik.

Selain mengembangkan potensi sumber daya alam, menggunakan politik bebas aktif dan berdiplomasi dengan negara lain, Analis Madya Bidang Perizinan Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Kol. Dewa Gede Agung Putra (Wawancara, Desember 2020) menyatakan bahwa salah satu *contingency plan* dalam mengatasi gagal bayar hutang kerja sama BRI di Indonesia adalah dengan negosiasi ulang terkait perjanjian kerja sama tersebut. Beliau menyatakan bahwa :

Skenario *contingency* yang dapat diambil oleh negara dapat dilakukan dengan cara meminta keringanan bunga. Kemudian meminta reschedule pembayaran. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan konsolidasi aset untuk di lelang, melalui IPO (*Initial Public Offering*) melalui lelang saham dan sebagainya. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuka dan mengevaluasi kembali lembar surat hutang negara.

Pendapat tersebut serupa dengan Analis Kebijakan Madya Bidang Diplomasi Pertahanan – Direktorat Kerja sama Internasional Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Letkol Inf Kurniawan Firmuzi (Wawancara, Desember 2020) yang menyatakan bahwa perjanjian hutang tersebut dapat di negosiasi ulang jika Indonesia tidak mampu membayar ketika sudah jatuh tempo. Beliau berpendapat bahwa :

Kalaupun misalnya pada suatu saat kita mengalami sesuatu kendala sehingga tidak bisa membayar (hutang) tepat waktu, kita bisa meminta reschedule ulang dan kita sudah melaksanakan hal itu pada tahun

1998 ketika terjadi krisis ekonomi. Ketika tidak mampu membayar hutang, kemudian hutang ini di reschedule dijadwalkan ulang. Bukan putihkan, karena begitu (hutang) diputihkan maka kita tidak akan dapat kepercayaan dari dunia Internasional.

Skema penghapusan hutang juga dilakukan oleh beberapa negara yang mengalami kesulitan untuk membayar hutang terhadap China. Kamerun, misalnya yang meminta penghapusan terhadap negara China sebesar US\$78.4 juta. Kelonggaran China terhadap Kamerun dapat mendorong negara-negara lain yang berutang banyak, seperti Ethiopia, Djibouti, dan Zambia, untuk mengharapkan perlakuan serupa. Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan bahwa “China sepakat untuk menghapuskan utang antar-pemerintah bebas bunga yang belum dibayarkan Kamerun pada akhir tahun 2018.” (Mata Mata Politik.com, 2019).

Penghapusan hutang tersebut tentu tidak semata pengampunan, namun juga terdapat motif politis didalamnya. China melakukan investasi di Kamerun dengan membangun Pelabuhan Kirbi. Pelabuhan ini dijadwalkan akan rampung pada tahun 2035 dan akan menangani ekspor bauksit, bijih besi, serta melayani Proyek Pengembangan Minyak dan Pipa Chad-Kamerun. Pelabuhan ini juga sebagai bagian dari Jalur Sutera Maritim China di wilayah Afrika Barat, dan bagian penting dari kerja sama BRI China di wilayah tersebut (Mata Mata Politik.com, 2019).

Selain itu, manajemen resiko juga diperlukan dalam *contingency plan* untuk mengatasi permasalahan yang akan datang. Ketua *Indonesia Research Development International* (IRDI), Laksdya (Purn) TNI Dr. Desi Albert Mamahit (Wawancara, Desember 2020) menyatakan bahwa manajemen resiko akan menjadi hal utama dalam kelancaran pelaksanaan kerja sama ini, sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa :

Kita harus memahami tentang *Risk Management* (Manajemen Resiko). Jika risk management kita baik, pasti kerja sama akan berjalan lancar. Jika tidak, maka kita akan merugi. Lalu kita harus melihat data mengenai berapa banyak negara yang mengalami kerugian akibat gagal membayar hutang dari kerja sama BRI ini. Jika jumlah yang bermasalah diatas 10% maka tentu kita harus ekstra hati-hati. Tapi jika yang bermasalah dibawah 5% dari keseluruhan total proyek yang ada, itu berarti sebetulnya kita tidak perlu terlalu takut (untuk melakukan investasi). Karena Indonesia masih menginginkan adanya investasi dari pihak asing, termasuk dengan China. Kasus gagal di Srilanka, Pakistan, dan Afrika itu berbeda dengan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *contingency plan* yang dapat digunakan jika *worst case* seperti gagal bayar hutang terjadi di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan beberapa strategi apabila terjadi kerugian di pihak Indonesia. (1) Pertama, dengan meningkatkan hubungan diplomatik di kawasan ASEAN dan negara yang memiliki ketegangan dengan China, dengan harapan akan membantu apabila Indonesia mengalami kesulitan dalam kerja sama BRI ini. (2) Kedua, dengan negosiasi ulang atas pembayaran hutang dalam perjanjian kerja sama tersebut. Yang (3) Ketiga, adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai hasil penelitian akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

4.3. Pembahasan

Pembahasan mengenai hasil penelitian yang berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi dokumentasi akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab 1 dan menggunakan landasan teori yang ada pada bab 2 penelitian ini. Analisis dan interpretasi akan disesuaikan dengan teori dan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya.

4.3.1. Analisis Ancaman Asimetris dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

Definisi ancaman menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar Negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara serta keselamatan negara. Didalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, dijelaskan bahwa ancaman merupakan dasar dari penyusunan sistem pertahanan negara, menurut penggolongan atau klasifikasi ancamannya.

Ancaman terbagi dalam tiga jenis, yakni ancaman militer (bersenjata maupun non-senjata), ancaman non militer, serta ancaman hibrida. Ketiga ancaman tersebut dapat berasal dari internal, maupun eksternal negara dalam lingkup wilayah nasional, regional, dan internasional. Kemudian dampak dari ancaman tersebut dapat meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Sementara itu, David L. Buffaloe (2006) dalam tulisannya yang berjudul *Defining Asymmetric Warfare* mendefinisikan peperangan asimetris sebagai berikut

“Asymmetric warfare is population-centric nontraditional warfare waged between a militarily superior power and one or more inferior powers which encompasses all the following aspects: evaluating and defeating asymmetric threat, conducting asymmetric operations, understanding cultural asymmetry and evaluating asymmetric cost.”

Serangan terhadap ekonomi suatu negara dapat dikategorikan sebagai asymmetric warfare dalam klasifikasi *Asymmetric Operations* yang dilakukan oleh negara yang lebih kuat secara power ekonominya terhadap negara yang lemah. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* ini dapat menjadi menjadi permasalahan pelik yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui contoh kasus yang telah disebutkan pada Bab I.

Konsep ini juga akan menjelaskan bagaimana kerja sama ekonomi dan investasi dapat dipandang sebagai salah satu strategi peperangan asimetris yang dipakai oleh China selain untuk memperoleh keuntungan atas pangsa pasar Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar, namun untuk melemahkan dan merusak tatanan negara melalui perjanjian kerja sama yang memiliki dampak negatif terhadap suatu, tanpa disadari oleh negara tersebut, serta sebagai strategi dalam mencapai ambisinya menjadi hegemoni global dalam bidang ekonomi politik internasional.

Analisis mengenai ancaman yang terdapat dalam kerja sama BRI ini akan menggunakan perspektif Peperangan Asimetris. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, ancaman tersebut dapat dikategorisasi sebagai ancaman asimetris dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan ancaman asimetris dalam bidang ekonomi dan pengaruh neo-imperialisme di Indonesia.

4.3.1.1. Ancaman Asimetris dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* dalam bidang Pertahanan dan Keamanan

Menurut Makmur Supriyatno, ilmu pertahanan mencakup tentang mempelajari bagaimana pengelolaan sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang, dan pada sesudah perang. Ilmu pertahanan memiliki fungsi untuk menjadi panduan dalam menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014).

Tujuan dari pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara secara fisik dan non fisik, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dari disintegrasi dan disorientasi serta menjaga keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman baik ancaman militer atau pun non militer yang datang dari dalam dan luar negeri. Esensi pertahanan negara menjadi penuntun bagi setiap warga negara untuk dapat memahaminya yang meliputi tujuan nasional, kepentingan nasional, hakikat pertahanan negara, sistem pertahanan negara, fungsi pertahanan negara dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Ancaman dalam non-militer bidang pertahanan dan keamanan ini, meskipun bukan menjadi yang utama namun tetap memiliki potensi sebagai dampak dari kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* China dan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya, setidaknya terdapat 4 aspek aspek yang rentan untuk terpengaruh dengan adanya kerja sama tersebut. Hal tersebut adalah :

a. Klaim *Nine-Dash Line* China di wilayah Laut Natuna Utara, Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu ancaman bagi Indonesia, mengingat bahwa Indonesia memiliki beberapa masalah mengenai Klaim *Nine-Dash Line* China di wilayah Laut Natuna Utara. Yang menjadi perhatian dalam konteks kerja sama ini adalah, kekhawatiran terhadap hilangnya hak untuk mengelola Laut Natuna Utara sebagai sanksi apabila gagal membayar hutang dalam kerja sama BRI.

b. Kualitas dalam Transfer Teknologi Indonesia-China dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)*

Transfer teknologi menjadi salah satu hal yang termasuk dalam skema kerja sama BRI. Dalam hal ini, ancaman mengenai kualitas dari teknologi yang diberikan kepada Indonesia dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia. Terlebih apabila transfer teknologi tersebut berkaitan dengan bidang pertahanan, seperti alutsista, perdagangan senjata maupun dengan instrumen penting seperti transportasi dan industri dalam bidang energi.

c. Identitas Tenaga Kerja Asing asal China.

Hal tersebut nyatanya telah menjadi permasalahan dalam kerja sama BRI di Indonesia. Kasus penangkapan TKA ilegal di wilayah Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma menjadi bukti bahwa Indonesia belum melakukan pendataan secara rinci mengenai seluk beluk TKA China yang masuk dan bekerja di Indonesia. Pendataan secara detail dibutuhkan untuk mengetahui, siapa saja yang masuk ke dalam Indonesia dan apa tujuannya. Kasus TKA China yang ditangkap di wilayah basis militer TNI AU dan sedang mengenakan pakaian militer, meskipun bukan

tentara namun dicurigai mereka adalah kombatan dan menyusup masuk kedalam wilayah yang dimana terdapat infrastruktur pertahanan didalamnya. Hal tersebut sangat mengganggu kerahasiaan dan keamanan wilayah yang menjadi basis pertahanan Indonesia.

Menurut teori *Balance of Threat* dari Stephen M. Walt dan menurut Walt, tingkat besar kecilnya ancaman disebabkan oleh empat faktor, yaitu :

1. *Aggregate power* : Semakin besar total sumber daya suatu negara (yaitu, populasi, kemampuan industri dan militer, kecakapan teknologi, dll.), Semakin besar potensi ancaman yang dapat ditimbulkannya kepada orang lain.
2. *Proximity* : Negara cenderung untuk dalam menanggapi ancaman dari kekuatan yang ada di sekitarnya. Karena kemampuan untuk memproyeksikan daya menurun seiring dengan jarak, negara yang wilayahnya berdekatan akan menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada yang jaraknya berjauhan.
3. *Offensive capability* : Negara dengan kemampuan ofensif besar lebih cenderung memprovokasi aliansi daripada mereka yang lemah secara militer atau hanya mampu bertahan.
4. *Offensive intentions* : Negara yang tampak agresif cenderung memprovokasi orang lain untuk menyeimbangkan diri melawan mereka (Walt, 1985).

Jika dalam kasus kerja sama ini ketidakmampuan Indonesia yang memiliki power yang lemah dari China gagal menangkal ancaman perjanjian kerja sama yang berujung kepada jebakan hutang dan kemudian terjadi

pengambil-alihan infrastruktur, atas dasar ketidakmampuan Indonesia untuk menghindari ancaman tersebut, alih-alih menghadapi ancaman dengan cara 'mengusir pergi', namun justru menjadikan ancaman tersebut sebagai 'aliansi'. Hal ini juga tergambar dari sebagian besar negara yang menjadi target dari pelaksanaan kerja sama BRI China, yang secara kondisi dan tingkat perekonomiannya berada dibawah negara China, termasuk Indonesia.

Hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Apabila Indonesia gagal mengidentifikasi ancaman dalam perjanjian kerja sama BRI ini, dan kemudian secara sadar maupun tidak akhirnya menjadi 'aliansi' dari negara investor yakni China, hal tersebut akan mengancam stabilitas politik luar Negeri di Indonesia yang sejatinya memiliki asas politik bebas-aktif, serta mengancam kedaulatan Indonesia.

4.3.1.2. Ancaman Asimetris dalam bidang Ekonomi dan Neo-imperialisme

Menurut Buku Strategi Pertahanan Negara (2014), dimensi ancaman mudah berkembang dari satu dimensi ke dimensi lain, termasuk dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, informasi dan teknologi. Spektrum ancaman dapat berubah dengan tiba-tiba dari lokal ke nasional. Demikian juga eskalasi keadaan dari tertib hingga darurat atau sebaliknya, tidak mudah untuk diprediksi. Sifat, sumber, dimensi, dan spektrum ancaman serta tantangan yang kompleks dan sulit diprediksi, mudah berubah, dan tidak jelas, harus dihadapi dengan suatu kebijakan pertahanan negara yang fleksibel dan adaptif.

Sementara itu, menurut Doktrin Pertahanan Negara (2014), ancaman berdimensi ekonomi dapat dipengaruhi dari dalam dan luar negeri. Ancaman berdimensi ekonomi dari luar berkaitan dengan inflasi, ketergantungan pada modal asing, pembatasan kuota, penolakan impor, pembatasan ekspor, dan

embargo. Potensi ancaman ekonomi dapat terjadi ketika inflasi sangat tinggi dan nilai tukar mata uang sangat tertekan, sehingga menimbulkan rendahnya daya saing ekonomi. Tingkat ketergantungan pada modal asing yang menyebabkan utang negara menjadi tinggi mengakibatkan posisi tawar dan daya saing lemah. Persaingan antar negara dalam bidang ekonomi dapat berupa pembatasan kuota, penolakan impor, pembatasan ekspor, dan embargo menjadi fenomena wajar yang mengakibatkan ketimpangan volume perdagangan. Ketidaksiapan pasar dalam negeri menghadapi pasar bebas, mengakibatkan melemahnya sektor industri dan produksi dalam negeri untuk mensuplai barang dan jasa dengan kualitas bersaing.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat tiga ancaman dalam dimensi ekonomi yang merupakan dampak dari kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia, yaitu :

a. Dampak terhadap Penguasaan Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil penelitian, industri yang menjadi proyek dalam kerja sama BRI juga termasuk dalam konsesi pertambangan dan energi. Hal ini turut menjadi ancaman dalam kerja sama BRI ini apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, perusahaan swasta Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan China, tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar hutang.

Jika hal tersebut terjadi, maka pengambil-alihan saham dan penguasaan terhadap *raw-material* Indonesia akan diambil alih oleh perusahaan investor, dalam hal ini oleh perusahaan China. Ketika saham terbesar dipegang oleh perusahaan asing, maka Indonesia tentunya akan kesulitan menentukan harga, tarif, dan pajak terhadap bahan baku yang ada didalam industri tersebut. Hal ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia, mengingat bahwa hasil tambang dan energi

merupakan hal penting yang menjadi kemaslahatan bersama bagi masyarakat Indonesia.

Ketika Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia telah masuk dalam penguasaan pihak asing, maka Indonesia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan kemudian menciptakan suatu ketergantungan terhadap negara yang menguasai SDA tersebut. Hal ini berkaitan dengan tendensi neo-imperialisme sebagai dampak dalam kerja sama BRI. Jika imperialisme kapitalis klasik didasarkan pada pemaksaan dan eksploitasi ekonomi secara tidak langsung, maka 'Neo-Imperialisme' menyerupai imperialisme pra-kapitalis di mana paksaan dan penyitaan langsung (kekerasan) mendominasi, namun neo imperialism melakukan pemaksaan dan eksploitasi ekonomi secara tidak langsung (Mavroudeas, 2018).

Neo-imperialisme muncul sebagai kekuatan dominan dalam politik dunia melalui penggunaan kekuatan politik, ekonomi, dan militer. neoimperialisme tentu saja menyerupai imperialisme Eropa generasi sebelumnya, yakni dalam manipulasi politik, dominasi ekonomi, dan kesediaannya untuk menggunakan kekuatan militer. Tetapi ada juga perbedaan besar. Melalui dekolonisasi, banyak bekas rakyat kolonial memperoleh hak dan kebebasan formal sebagai warga negara baru (Encyclopedia.com, 2020).

Jika ancaman tersebut terjadi di Indonesia, maka yang akan terjadi adalah Indonesia kehilangan kekuatannya dalam bidang ekonomi. *Bargaining position* atas kepemilikan Sumber Daya Alam yang potensial, akhirnya hilang dan diambil alih oleh perusahaan asing. Memang, secara kedaulatan, Indonesia masih 'merdeka'. Namun dalam menjalankan kehidupan ekonominya, Indonesia akan sangat bergantung kepada

negara yang menguasai SDA di Indonesia, termasuk China melalui kerja sama BRI ini.

b. Ancaman mengenai Skema Pengambil-Alihan Infrastruktur sebagai Konsekuensi atas Kegagalan Pembayaran Hutang.

Pengambil-alihan infrastruktur sebagai konsekuensi kegagalan pembayaran hutang telah terjadi di beberapa negara, seperti Sri Lanka dan Pakistan. Meskipun pemerintah Indonesia meyakini bahwa Indonesia memiliki rasio hutang yang tergolong rendah dan menyanggupi untuk membayar hutang atas investasi kerja sama BRI tersebut, namun Indonesia selayaknya bersikap lebih waspada terkait isu pengambil-alihan infrastruktur dan menjadikan negara yang gagal bayar hutang tersebut sebagai *“lesson-learn”* agar tidak terjadi hal serupa di Indonesia.

Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah yang paling riskan untuk diambil alih hak kelolanya apabila Indonesia gagal membayar hutang dalam kerja sama Belt and Road Initiative ini. Kerugian besar bagi Indonesia, mengingat kereta tersebut juga berada dalam wilayah yang dekat dengan basis militer Indonesia yakni Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

c. Dampak terhadap Pengaruh Politik dalam Kerja sama Ekonomi Belt and Road Initiative (BRI) China-Indonesia

Didalam sebuah kerja sama ekonomi antar-negara, baik yang dilaksanakan secara *government to government (G2G)* maupun secara *business to business (B2B)* terdapat kepentingan masing-masing negara yang melakukan perjanjian didalamnya. Tidak hanya apa yang tersurat seperti apa yang ada didalam MoU, namun juga ada pengaruh yang tersirat didalam hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut.

Indonesia dan China sejauh ini memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik. Namun adanya kerja sama ini dapat mempengaruhi hubungan antar kedua negara. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan studi dokumentasi, China dapat mempengaruhi kebijakan politik di Indonesia melalui kerja sama ekonominya.

Hal tersebut dapat berupa pengaruh atas kebijakan dan regulasi, pengaruh terhadap pajak dan tarif ekspor-impor, dan lainnya. Jika hal tersebut terjadi, maka Indonesia akan kehilangan kedaulatannya dalam mengatur negaranya. Ini merupakan ciri utama dari neo-imperialisme. Ada hubungan asimetris antara negara yang memiliki power dengan negara yang 'dijajah'. Negara yang menjadi kekuatan imperial (China) dapat mengontrol aspek perilaku negara lain untuk kepentingannya sendiri dimana tidak ada pengaruh timbal balik oleh negara yang dijajah. Ada spektrum yang berkisar dari neo-imperialisme yang dijalankan secara terpusat hingga kehilangan pengaruh atas suatu perekonomian.

Dalam perspektif peperangan asimetris, hal ini merupakan *Asymmetric Operation*. *Asymmetric Operation* sebagai elemen dari peperangan asimetris merupakan operasi yang direncanakan dan dilakukan oleh pihak yang cenderung memiliki *power* yang lebih kuat dalam peperangan asimetris. Oleh karena itu, operasi ini juga dapat dikatakan sebagai operasi ofensif. Operasi ini dapat berjalan dengan menempatkan *asymmetric twist* pada bidang instrument kekuatan nasional, yaitu diplomasi, informasi, militer dan ekonomi (DIME).

Ketika instrument kekuatan nasional tersebut telah mendapat '*asymmetric twist*' melalui strategi yang dilancarkan oleh suatu negara, terlebih apabila negara tersebut memiliki power, maka negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar dapat menggunakan powernya untuk

mempengaruhi instrument kekuatan nasional negara lain, khususnya yang memiliki kekuatan yang lebih lemah. Konsep asimetri pada elemen ini cenderung memberikan benefit bagi negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar, alih-alih bersifat menguntungkan bagi negara yang memiliki kekuatan yang lemah (Buffaloe, 2006).

Dapat dilihat bahwa kerja sama ekonomi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap bidang ekonomi saja, namun juga mempengaruhi kebijakan politik didalam negara tersebut. Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang saling keterkaitan antara satu sama lain. Kerja sama ekonomi dapat memberikan dampak terhadap pengaruh politik, dan begitu pula sebaliknya.

d. Dampak Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* terhadap Pengaruh Politik Negara China Di Tatanan Dunia Internasional.

Seperti yang sudah dipaparkan dalam hasil penelitian bahwa kerja sama BRI ini tidak hanya memiliki kepentingan dalam bidang ekonomi, namun juga terdapat ancaman mengenai tendensi hegemoni dan ekspansi dari negara China. Hal ini berkaitan dengan pengaruh atas perjanjian perdagangan yang bersifat ekonomi terhadap aliansi politik dalam tatanan dunia internasional.

Stephen M. Walt dalam bukunya yang berjudul "*The Origins of Alliances*" mengemukakan teori *Balance of Threat*. Teori ini menjelaskan bahwa aliansi negara terbentuk sebagai cara untuk memastikan keamanan mereka sendiri dan respon atas ancaman yang berlaku. Negara membentuk aliansi dengan tujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan melawan ancaman (Walt, 1987).

Di dalam *Balance of Threat* ini, aliansi terbagi dua kategori, yaitu: *Balancing* dan *Bandwagoning* (Walt, 1987). *Balancing* merupakan aliansi antara negara dengan negara lain melawan ancaman yang berlaku. Aliansi kategori ini juga dipertimbangkan di tingkat regional, dimana negara-negara menyiratkan keinginan untuk mempertahankan status quo. Sementara *bandwagoning* secara konseptual menurut Kenneth Waltz (1978) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan yang lebih lemah untuk bergabung mengikuti negara yang memiliki kekuatan lebih besar demi mendapat tambahan kekuatan dan keamanan bagi negaranya dalam rangka menghadapi ancaman yang berlaku.

Bandwagoning terjadi hanya di bawah kondisi paksaan atau tidak stabil atau tidak pasti. Aliansi *Bandwagoning* menyiratkan keinginan untuk menginduksi perubahan sistemik dan atau perilaku mendestabilisasi (Schweller, 1994). Aliansi ini terjadi ketika negara lemah memutuskan bahwa biaya melawan negara yang lebih kuat justru lebih mahal daripada keuntungan yang didapatkan. Negara kuat biasanya menawarkan insentif, misalnya penambahan wilayah, perjanjian dagang, atau perlindungan, agar negara lemah mau bekerja sama dengan mereka (Mearsheimer, 2001).

Konsep *bandwagoning* ini memiliki kaitan erat dengan perjanjian kerja sama BRI dari negara China. Karena ketidakmampuan suatu negara untuk mengcounter ancaman dari luar, alih-alih menghadapi ancaman dengan cara 'mengusir pergi', mereka justru menjadikan ancaman tersebut sebagai 'aliansi'. Hal ini juga tergambar dari sebagian besar negara yang menjadi target dari pelaksanaan kerja sama BRI China, yang secara kondisi dan tingkat perekonomiannya berada dibawah negara China. Ketidakmampuan negara yang memiliki power yang lemah untuk

menangkal ancaman perjanjian kerja sama yang berujung kepada jebakan hutang dari skema investasi tersebut membuat negara yang 'lemah' ini cenderung untuk mengikuti kemauan sang investor.

Ketika Indonesia dan negara yang kekuatannya lebih rendah daripada China ikut serta dan melakukan aliansi melalui perjanjian kerja sama investasi, maka sejatinya negara yang powernya lebih lemah tersebut sedang melakukan '*bandwagoning*' terhadap ancaman dari negara yang powernya lebih kuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, hasil analisis peneliti adalah bahwa peperangan asimetris dapat terjadi dalam bidang ekonomi. Bukan dalam bentuk sanksi, embargo, restriksi perdagangan, atau hal-hal yang bersifat pembatasan dan pemutusan hubungan kerja sama yang kerap dikaitkan sebagai 'perang ekonomi', namun dapat berbentuk kerja sama antar-negara yang justru menjadi ancaman apabila negara tersebut tidak mampu mengatasi dampak negatif dari kerja sama ekonomi, dalam hal ini khususnya pada kerja sama BRI.

Hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa, Indonesia. Apabila Indonesia gagal mengidentifikasi ancaman dalam perjanjian kerja sama BRI ini, dan kemudian secara sadar maupun tidak mengalami *bandwagoning* dan menjadi 'aliansi' dari negara investor yakni China, hal tersebut akan mengancam stabilitas politik luar Negeri di Indonesia yang sejatinya memiliki asas politik bebas-aktif, serta mengancam kedaulatan Indonesia.

4.3.2. Analisis Strategi Pertahanan Negara Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)*

Dalam menganalisis kasus dalam penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus menggunakan teori Sun Tzu khususnya dalam frasa “mengalahkan musuh tanpa berperang”. Kerja sama BRI ini dapat menjadi strategi bagi negara China untuk dapat mengalahkan ‘musuh’ nya yaitu kompetitor dari negara lain seperti Amerika Serikat. Melalui kerja sama ini, China mampu bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru dan mengalahkan hegemoni kekuatan ekonomi yang sebelumnya.

Jakarta Global Future Institute (GFI) Forum dalam artikel berjudul “*Mengenal Perang Asimetris : Sifat, Bentuk, Pola, dan Sumber*” (The Global Review.com, 2017) merumuskan tujuan perang asimetris tidak hanya dalam satu aspek tetapi juga dalam berbagai aspek. Ada tiga target untuk perang asimetris, yaitu (1) mengalihkan sistem suatu negara untuk kepentingan kolonialisme, (2) melemahkan ideologi dan mengubah pola pikir masyarakatnya, dan (3) menghancurkan keamanan pangan dan keamanan energi, kemudian menciptakan saling ketergantungan pada negara-negara target untuk keamanan pangan dan energi.

Dalam melakukan kerja sama dengan China, khususnya dalam skema kerja sama BRI ini, pemerintah Indonesia memiliki strategi tersendiri untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang merugikan Indonesia dalam kerja sama ini. Berikut akan dibahas mengenai strategi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, serta mengenai *contingency plan* yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia apabila *worst case* dalam kerja sama BRI ini terjadi.

4.3.2.1. Strategi *Business to Business* dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

Ekonomi adalah instrument penting yang datang untuk memperoleh posisi yang hegemonik secara strategis. Hal ini bukan karena ia cocok secara

unik untuk tujuan intelektual ini tetapi karena keputusan yang disengaja untuk mengadopsinya sebagai dasar ilmu baru pengambilan keputusan dan promosi aktif ilmu baru ini (Freedman: 2013).

Strategi '*business to business*' ini diberlakukan dalam kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI), dengan anggapan bahwa hutang tersebut tidak akan menjadi hutang negara. Namun dalam perjalannya, strategi ini masih memiliki banyak kekurangan didalamnya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi "*business to business*" didalam kerja sama BRI ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. (1) Pertama, mengenai keikutsertaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek kerja sama BRI yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan swasta. (2) Kedua, mengenai pembagian saham dalam kerja sama BRI di Indonesia. Dan (3) Ketiga, pengaruh politik yang menjadi dampak dari kerja sama BRI di Indonesia.

Sebagaimana hasil penelitian yang mendapatkan data bahwa perusahaan BUMN juga ikut terlibat dalam kerja sama BRI ini, artinya ada celah dalam penggunaan skema *business to business* Indonesia. Jika Indonesia masih melibatkan BUMN, artinya hal tersebut tidak pure '*business to business*' karena ada kepemilikan negara didalamnya. Hal ini akan menjadi bumerang bagi Indonesia apabila suatu saat tidak mampu membayar hutang, meskipun rasio hutang Indonesia masih dalam batas wajar.

Hal terpenting dalam pembayaran hutang bukan mengenai rasio, melainkan tentang kesanggupan membayar ketika hutang tersebut sudah jatuh tempo. Mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19, dibutuhkan waktu tambahan

dalam memperbaiki perekonomian Indonesia yang saat ini masih dalam masa resesi.

Selain itu, mengenai pembagian saham perusahaan yang bekerja dalam proyek kerja sama BRI ini juga menjadi perhatian. Apabila konsekuensi kegagalan pembayaran hutang tersebut adalah perpindahan saham dari perusahaan swasta nasional kepada perusahaan asing, maka perusahaan tersebut akan sepenuhnya menjadi milik asing atas penguasaan saham terbesar. Kebijakan yang ada didalamnya, khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pemasaran produk dan tarif untuk mengambil keuntungan akan sepenuhnya berada dalam kontrol pihak asing. Indonesia, disisi lain akan kehilangan banyak hal. Penguasaan raw-material, modal, alur perdagangan, harga, tarif, hingga pajak terhadap hasil tambang maupun produk yang dihasilkan dari industri yang diambil alih sahamnya.

Strategi "*business to business*" dari Indonesia nampaknya tidak mampu untuk menangkal "*deception*" dari kerja sama BRI ini. Pepatah Sun Tzu dalam "*The Art of War*", menyatakan bahwa kunci dari *deception* atau pengelabuan adalah dengan cara melakukan kebalikan dari apa yang diharapkan, terlihat tidak berdaya saat mampu, pasif saat aktif, dekat saat jauh, jauh saat dekat. Keunggulan tertinggi dalam perang tidak ditemukan dalam memenangkan "seratus kemenangan dalam seratus pertempuran." Sebaliknya, lebih baik "menaklukkan musuh tanpa berperang". Ahli strategi yang hebat harus menjadi penipu yang ulung, menggunakan kekuatan di tempat yang paling efektif: "Hindari yang kuat untuk menyerang yang lemah." Mengalahkan strategi musuh (atau "menolak rencana musuh") adalah "bentuk tertinggi dari keahlian militer." (Sun Tzu, diterjemahkan oleh Giles: 2000).

China menggunakan kerja sama BRI ini sebagai '*deception*' atas hal yang kepentingan lain yang lebih dari sekedar bisnis. Ketika China mengajak sebagian besar negara di dunia untuk bekerja sama dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian secara bersama-sama, dari sanalah China mengalahkan negara yang tidak mampu menghadapi strateginya. Penguasaan terhadap sumber daya, masuknya pendatang dari China yang tidak jelas pendataan identitasnya, memberikan pinjaman hanya untuk membuat negara tersebut masuk kedalam jebakan *debt trap* negara China.

Indonesia seharusnya menerapkan strategi yang lebih bijaksana dalam melaksanakan kerja sama BRI ini. Skema *business to business* seharusnya dilaksanakan dengan perusahaan swasta saja. Agar tujuan penggunaan skema tersebut sebagai alternatif untuk tidak menambah hutang negara dapat terlaksana dengan baik.

Pun pemerintah Indonesia harus memperhatikan manajemen resiko jika terjadi *worst case* dalam pelaksanaan kerja sama ini, yaitu kegagalan pembayaran hutang. Dibutuhkan strategi yang mampu menangkal ancaman tersebut dalam tataran strategis dan operasional kerja sama tersebut. Indonesia harus mampu mengembangkan strategi agar kerja sama ini memberikan manfaat tidak hanya untuk negara China sebagai inisiator, namun juga kepada Indonesia dalam bidang perekonomiannya.

Politik bebas aktif juga perlu diperkuat demi menghindari ketergantungan ekonomi terhadap China. Saat ini, China bukan mitra bisnis nomor satu di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan dengan semakin terbuka nya Indonesia terhadap investasi luar negeri, China akan lebih banyak menanamkan investasinya di Indonesia. Diperlukan keseimbangan dalam menjalin hubungan antar negara baik dalam bidang

hubungan diplomatik, ekonomi, pertahanan, maupun sosial budaya. Kecenderungan berlebihan terhadap satu negara akan menghilangkan esensi politik luar Negeri Indonesia.

4.3.2.2. *Contingency Plan* dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

Setelah membahas mengenai ancaman dari kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia, serta mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kerja sama BRI dengan menggunakan skema *business to business* yang nyatanya masih terdapat celah dan kekurangan dalam pelaksanaannya, maka dibutuhkan *contingency plan* untuk menghadapi apabila terjadi *worst case* dalam kerja sama ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dalam penelitian ini, *contingency plan* yang dapat dilakukan oleh Indonesia jika suatu saat mengalami kegagalan pembayaran hutang adalah (1) Pertama, dengan meningkatkan hubungan diplomatik di kawasan ASEAN dan negara yang memiliki ketegangan dengan China, dengan harapan akan membantu apabila Indonesia mengalami kesulitan dalam kerja sama BRI ini. (2) Kedua, dengan negosiasi ulang atas pembayaran hutang dalam perjanjian kerja sama tersebut. Yang (3) Ketiga, adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghindari dampak terburuk dari kegagalan pembayaran hutang, yaitu pengambil-alihan infrastruktur, maupun penguasaan saham dan potensi daya alam di Indonesia. Hubungan diplomatik dengan negara yang mengalami ketegangan dengan China, mungkin merenggangkan hubungan baik China dan Indonesia namun hal tersebut merupakan pemanfaatan asas politik bebas aktif Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Negosiasi hutang juga dapat dilakukan mengingat hal ini juga pernah terjadi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1998 yang mana banyak perusahaan yang harus membayar hutang ketika sudah jatuh tempo namun tidak mampu untuk melakukannya. Negosiasi ulang mengenai jangka waktu pembayaran hutang dapat menjadi alternatif yang baik apabila hal tersebut disetujui oleh pihak China. Sekali lagi, negosiasi dapat menghasilkan kebijakan yang beragam. Perlu diperhatikan secara lebih lanjut apakah China akan menyetujui negosiasi ulang tanpa ada syarat tambahan yang akan merugikan Indonesia di kemudian hari. Jika Indonesia mampu menghadapi hal demikian, maka seharusnya strategi ini cukup membantu Indonesia untuk menghadapi apabila *worst case scenario* tersebut benar-benar terjadi di Indonesia.

Solusi ketiga yang berupa pemanfaatan Sumber Daya Alam dan mengelolanya dengan lebih baik merupakan langkah yang baik, dengan catatan bahwa perusahaan nasional baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia lah yang mengelolanya secara penuh. Atau jikalau pun dibutuhkan investasi asing, maka kepemilikan sahamnya tidak boleh lebih besar dari perusahaan Indonesia, dan khusus pada industri proses, bukan pada industri raw-material, sehingga Indonesia masih memiliki kontrol penuh atas pengelolaan Sumber Daya Alam nya. Potensi Sumber Daya Alam Indonesia masih sangat banyak dan dapat dipergunakan apabila pengelolaanya baik dan bijaksana serta berorientasi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Ancaman Asimetris dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

Berdasarkan analisis mengenai hasil penelitian dari kerja sama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia, kerja sama ini dapat menjadi ancaman bagi negara Indonesia apabila kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Dalam bidang ekonomi, ancaman datang dari berbagai hal yaitu:

1. Penguasaan Sumber Daya Alam
2. Pengambil-alihan infrastruktur sebagai resiko apabila gagal membayar hutang
3. Ketergantungan ekonomi pada negara China
4. Ancaman terhadap stabilitas politik luar negeri yang bebas aktif apabila China menjadi negara yang dominan dalam kerja sama ekonomi internasional dengan Indonesia.

Sementara itu, bidang pertahanan juga mendapat ancaman sebagai dampak dari kerja sama BRI ini. Aspek dalam bidang pertahanan yang mendapatkan ancaman atas kerja sama BRI ini adalah:

1. Kedaulatan Indonesia atas klaim China, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara
2. Pertahanan dan keamanan negara terhadap identitas Tenaga Kerja Asing China

3. Kualitas dari *transfer of technology* yang dilakukan dalam kerja sama BRI di Indonesia.

Dalam perspektif peperangan asimetris, ancaman justru datang melalui jalur yang tidak diduga. Kerja sama yang seharusnya menjadi keuntungan atas kedua-belah pihak berpotensi mengancam kedaulatan dan kehidupan ekonomi negara Indonesia. Jika Indonesia tidak mampu mengatasi ancaman tersebut, maka Indonesia akan ikut terjebak dalam *debt trap* seperti negara lain yang telah mengalami efek negatif dari kerja sama BRI ini.

b. Strategi Pertahanan Negara Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi dan Neo-imperialisme China dalam *Belt and Road Initiative (BRI)*

Dalam melakukan kerja sama BRI dengan negara China, Indonesia menggunakan strategi '*business to business*', dengan harapan bahwa strategi tersebut dapat meminimalisir hutang yang dibebankan terhadap negara. Namun nyatanya dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, strategi ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti:

1. Keikutsertaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek kerja sama BRI di Indonesia
2. Pembagian saham dalam kerja sama BRI di Indonesia.
3. Adanya pengaruh politik yang menjadi dampak dari kerja sama BRI di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang dapat digunakan apabila strategi '*business to business*' yang digunakan pada saat ini memberikan kerugian bagi Indonesia dan mengalami kondisi terburuk, yaitu gagal membayar hutang terhadap China.

Contingency plan yang dapat dilakukan untuk menangani situasi tersebut adalah ;

1. Meningkatkan hubungan diplomatik di kawasan ASEAN dan negara yang memiliki ketegangan dengan China, dengan harapan akan membantu apabila Indonesia mengalami kesulitan dalam kerja sama BRI ini
2. Negosiasi ulang atas pembayaran hutang dalam perjanjian kerja sama tersebut.
3. Memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia dengan sebaik-baiknya

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk membuat kebijakan terkait kerja sama internasional, khususnya mengenai kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia, agar dapat terhindar dari ancaman dibalik kerja sama tersebut. Rekomendasi tersebut adalah :

a. Teoritis

Melihat ancaman dibalik kerja sama internasional merupakan ancaman yang sulit diprediksi dan seringkali kita terkecoh atas tawaran kerja sama yang diberikan Oleh karena itu, maka peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- 1) Universitas Pertahanan sebagai rekomendasi tambahan dan *early-warning system* terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi internasional, dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal strategi menghadapi

ancaman dibalik kerja sama ekonomi melalui perspektif peperangan asimetris.

- 2) Akademisi sebagai rujukan untuk dilakukan penelitian berikutnya dalam bidang pertahanan negara Indonesia guna menciptakan strategi yang lebih komprehensif untuk menghadapi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi.

b. Praktis

Secara praktis, peneliti merekomendasikan seluruh instansi/lembaga terkait untuk dapat mengidentifikasi dan meningkatkan kewaspadaan mengenai ancaman asimetris dalam bidang ekonomi melalui hal-hal berikut:

- 1) Kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Maritim dan Investasi, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait pengkajian ulang mengenai kerja sama ekonomi internasional, khususnya yang menyangkut Sumber Daya Alam Indonesia.
- 2) Kepada Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia, dengan harapan dapat membantu Indonesia apabila terkena *debt-trap* dari negara China.
- 3) Kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan agar menjadikan negara yang gagal menghadapi dampak negatif dari kerja sama BRI sebagai '*lesson learnt*' dalam membuat strategi dan *contingency plan* yang lebih terarah untuk menghadapi *worst case scenario* dalam kerja sama BRI di Indonesia.
- 4) Kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, terkait pendataan mengenai Tenaga Kerja Asing khususnya yang terkait dalam proyek kerja sama BRI dari negara China di

Indonesia. Legalitas dan identitas tenaga kerja asing tersebut sangat mempengaruhi pertahanan dan keamanan Indonesia.

- 5) Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal agar melakukan pemantauan secara menyeluruh dalam setiap proyek kerja sama BRI mengingat adanya beberapa kejadian ditangkapnya TKA ilegal dan *transfer of technology* yang bermasalah di beberapa wilayah.
- 6) Kepada perusahaan BUMN maupun swasta, serta lembaga yang mengatur terkait, atas dasar kerja sama BRI di Indonesia yang bersifat *Business to Business*, maka diharapkan perusahaan swasta nasional lah yang memegang peran, dengan tujuan untuk menghindari pembebanan hutang terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Alfajri, Setiawan, A., Wahyudi, H. (2019) *“Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia”* Global & Strategis, Th. 13, No. 1
- Asgarkhani, A., Ghahramani, J. Mohammad., Hajat, G. Mostafa., (2019) *“Goe-conomic Analysis of China's Foreign Policy”* Geopolitics Quarterly, Volume: 14, No 4, Winter 2019
- Baru, Sanjaya (2012). *“Geo-economics and Strategy”*, Survival, 54.3: 47–58
- Beeson, Mark. (2018). *“Geoeconomics with Chinese characteristics: the BRI and China’s evolving grand strategy”* Economic And Political Studies. Political Science and International Relations, University of Western Australia, Perth, Australia
- Bogdan, R., Biklen, S. (1992) *“Qualitative Research for Education”*. Boston
- Buffaloe, David L. (2006) *Defining Asymmetric Warfare*, The Institute Land Warfare Papers (AUSA)
- Bungin, Burhan (2007) *“Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, ”*. Jakarta : Kencana
- Buzan, B. (1983). *“People, State, and Fear: The National Security Problem in International Relations”* . Brighton/Sussex: Wheatsheaf Books.
- Chomsky, Noam. (2005) *“Imperial Ambitions : Conversation with Noam Chomsky on The Post 9/11 World – Interviews with David Barsamian”* England: Hamish Hamilton
- Creswel, W. Johnl. (2011) *“Educational Research Fourth Edition”* . Pearson
- Damuri, Y.R., dkk. (2019) *“Perceptions and Readiness of Indonesia towards the Belt and Road Initiative : Understanding Local Perspectives, Capacity, and Governance”* Centre for Strategic and International Studies.

- Danial dan Wasriah. (2009). *“Metode Penelitian Karya Ilmiah”*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI
- Fabtian, Danika Ramadhani Azizah. (2018) *“Belt Road Initiatives (BRI): Intensi Supremasi China di Samudra Hindia dan Respon Counterbalance dari India”* Jurnal Hubungan Internasional Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
- Freedman, L. (2013) *“Strategy : A History”* New York: Oxford University Press.
- Fuddin, Abdul H. (2016). *“Pengaruh Perkembangan Geopolitik dan Geostrategi China”* Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 25 Maret 2016. Jakarta.
- Gaddis, J.L.(2009) *“What is Grand Strategy”* Yale University.
- Grevi, Giovanni. (2011). *“Geo-economics and Global Governance. in A. Martiningui and R. Youngs (Vol. Ed.). Challenges for European Foreign Policy in 2012: What Kind of Geo-economic Europe?”* Madrid: FRIDE.
- Gumilar, Nugraha. (2015) *“Ilmu Pertahanan dan Pendidikan Bela Negara Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan”* Wira, Volume 54 /No. 38/Mei-Juni 2015, Media Informasi Kementerian Pertahanan
- Hobson, J.A. (2005). *“Imperialism : A Study ”* Ney York : Cosimo, Inc.
- Ispriyahadi, H., Nuryantono, N., Manurung, A.H., Hakim, D.B. (2012) *“Pengaruh Utang Luar Negeri Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”* Jurnal Pasar Modal dan Perbankan Vol 1 No. 3, November 2012. Adler Manurung Press
- Jaeger, C. Bruna., Brites, V.P. Pedro. (2020). *“Goeconomics in the light of International Political Economy: a theoretical discussion”* Brazilian Journal of Political Economy, vol. 40, no 1, pp. 22-36, January-March/2020

- Kementerian Pertahanan (2014) *“Buku Strategi Pertahanan Indonesia”*
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan (2015) *“Buku Putih Pertahanan Indonesia”*.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Khairani, B., Khafivah, D.N, Susanti, R.W. (2019) *“Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Belt And Road Initiative (Bri) Republik Rakyat China”*
Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019 FISIP. Universitas Wahid Hasyim Semarang
- Korwa, Johni Robert Verianto. (2019) *“Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia”* Jurnal Hubungan Internasional Vol. 8, No. 1 / April - September 2019
- Kurniawan, Y. (2016) *“One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal China?”* Politica Vol. 7 No. 2 November 2016 Universitas Indonesia
- Kusmanto, Heru (2016). *“Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”* Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 25 Maret 2016. Jakarta.
- Marsudi, L.P. Retno (2019) *“Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024”* Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta
- Mavroudeas, Stavros. (2018). *“The Marxist Theory of Imperialism: Which way forward”*
- Mearsheimer, J. (2001) *“The Tragedy Of Great Power Politics.”* 1st ed. New York: Norton
- Nasution. (2003). *“Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif”*. Bandung: Tarsito.
- Neuman, W. (2014). *“Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition.”* Assex: Pearson Education Limited.

- Nkrumah, Kwame. (1965). *“Neo-Colonialism : The Last Stage of Imperialism”*
London : Thomas, Nelson, & Sons Ltd.
- Priyono, Juniawan., Yusgiantoro, Purnomo. (2017). *“Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi”* Unhan Press, Bogor.
- Schweller, Randall L.. (1994) *“Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In.” International Security 19*
- Scobell, A., et al. (2020) *“China’s Grand Strategy: Trends, Trajectories, and Long-Term Competition”* RAND Corporation
- Sikder, M., Dou, X., Davi, L. (2020) *“Enlightenment of Global Advancement for Future: One Belt One Road”* International Journal of Economics and Finance; Vol. 12, No. 6; 2020 ISSN 1916-971XE-ISSN 1916-9728
Published by Canadian Center of Science and Education
- Supriyatno, Makmur. (2014) *“Tentang Ilmu Pertahanan.”* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tsu, S., Giles, L. (2000) *“Sun Tzu on the Art of War”*. Leicester.
Universitas Pertahanan (2019) *“Buku Pedoman Penelitian Thesis dan Disertasi”* UNHAN Press, Bogor.
- Vignali, C., Hallier, B., & Stanton, J. L. (2016). *“Research Methodology: Special Issue Collections. International Journal of Sales, Retailing and Marketing”*, 4(9), 1–79
- Walt, Stephen M. (1985) *“Alliance Formation and the Balance of World Power.” International Security*, vol. 9, no. 4
- Walt, Stephen M. (1987) *“The Origins of Alliance.”* Cornell University Press.
- Wibawati, S.W., Sari, M.I., Sulistyanti, Y.A. (2018) *“Potensi Dan Tantangan One Belt One Road (Obor) Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Maritim”* Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 No.2, 2018 Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
- Yarger, H.R., (2006) *“Strategic Theory for The 21st Century : The Little Book on Big Strategy”* Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.

Undang-Undang dan Peraturan :

Pasal 30 Bab XII Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Undang Undang no 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024

Website :

Antara News.com *“Luhut yakin Indonesia terhindar dari jebakan utang Belt and Road”* <https://www.antarane.ws.com/berita/846785/luhut-yakin-indonesia-terhindar-dari-jebakan-utang-belt-and-road> (diakses November 2020)

Beijing Review (2018) *“5 Years of the Belt and Road Initiative”* http://www.bjreview.com/Special_Reports/2018/5_Years_of_the_Belt_and_Road_Initiative/ diakses Januari 2021

China.org.cn (2017) *“Chronology of China’s Belt and Road Initiative”* http://www.china.org.cn/china/2017-01/05/content_40044651.htm diakses Januari 2021

Council on Foreign Relations.org (2020). *“China’s Massive Belt and Road Initiative”* <https://www.cfr.org/background/chinas-massive-belt-and-road-initiative> diakses Januari 2021

Encyclopedia.com *“Neoimperialism”* <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/neoimperialism> (diakses September 2020)

- Friedrich Ebert Stiftung.org “*Indonesia’s Global Maritime Fulcrum & China’s Belt and Road Initiative: A Match Made at Sea?*” <https://www.fes-asia.org/news/indonesias-global-maritime-fulcrum-chinas-belt-road-initiative-a-match-made-at-sea/> (diakses November 2020)
- International Policy Digest.org “*The Rise of Chinese Neo Imperialism*” <https://intpolicydigest.org/2019/12/05/the-rise-of-chinese-neo-imperialism/> (diakses September 2020)
- International The News.com.pk “*The Economic Agenda of Imperialism*” <https://www.thenews.com.pk/print/604585-the-economic-agenda-of-imperialism> (diakses Oktober 2020)
- Kata Data. (2019) “*Belt and Road Initiative, Menghidupkan Kembali Kejayaan Jalur Sutra*” <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a5194464ab/belt-and-road-initiative-menghidupkan-kembali-kejayaan-jalur-sutra/1> diakses Januari 2021
- Kompas.com (2021) “*Mengupas Kerja sama Investasi China di Indonesia*” <https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di-indonesia> diakses Februari 2021
- Kompas.com “*Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3.49 Persen*” <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all> (diakses November 2020)
- Mata Mata Politik.com “*Mengapa China Diam-Diam Hapuskan Sebagian Utang Kamerun*” <https://www.matamatapolitik.com/analisis-mengapa-china-diam-diam-hapuskan-sebagian-utang-kamerun/> diakses Januari 2021

- Media Indonesia.com (2020) “*Kerja sama Tiongkok-Indonesia Diharapkan Ubah Krisis Jadi Peluang*”
<https://mediaindonesia.com/internasional/317878/kerja-sama-tiongkok-indonesia-diharapkan-ubah-krisis-jadi-peluang> diakses Februari 2021
- Safety 4 Sea.com (2018) “*Timeline of Belt and Road Development*”
<https://safety4sea.com/timeline-of-belt-and-road-development/> diakses Januari 2021
- Tagar.com “*Benarkah Nasib Indonesia Seperti Sri Lanka yang Dijebak Utang China?*”
<https://www.tagar.id/benarkah-nasib-indonesia-seperti-sri-lanka-yang-dijebak-utang-china#:~:text=Sri%20Lanka%20pinjam%20duit%20ke,infrastruktur%20seperti%20bandara%20dan%20pelabuhan.&text=Ketiga%2C%20wajar%20Sri%20Lanka%20gagal,sebesar%2077%20persen%20dari%20PDBnya.>
- Tempo.co “*Ini Alasan Skema Kereta Cepat Jakarta-Bandung B to B*”
<https://bisnis.tempo.co/read/747842/ini-alasan-skema-kereta-cepat-jakarta-bandung-b-to-b/full&view=ok> (diakses November 2020)
- The Asia Dialogue (2019) “*Indonesia: The Belt and Road Initiative and relations with China*”
<https://theasiadialogue.com/2019/10/04/belt-and-road-initiative-in-indonesia-and-relations-with-china/> diakses Januari 2021
- The Global Review.com “*Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumber*”
<https://theglobal-review.com/mengenal-perang-asimetris-sifat-bentuk-pola-dan-sumber/> (diakses Agustus 2020)
- Tirto.id (2019) “*Indonesia Siapkan 4 Koridor untuk Proyek Belt and Road Initiative*”
<https://tirto.id/indonesia-siapkan-4-koridor-untuk-proyek-belt-and-road-initiative-dm8d> diakses Januari 2021
- Warta Kota Tribun News.com (2016) “*5 Warga China Berpakaian Militer Ngebor di Bandara Halim Ditangkap*”

<https://wartakota.tribunnews.com/2016/04/28/5-warga-china-berpakaian-militer-ngebor-di-bandara-halim-ditangkap?page=2>
diakses Januari 2021

Dokumen :

Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Jointly Promoting Cooperation within the Framework of the Global Maritime Fulcrum Vision and the Silk Rpad Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road Initiative

LAMPIRAN 1

SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : BJ/2001 /XI/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 25 November 2020

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Potensi
Pertahanan Kementerian
Pertahanan RI
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, berkenan mengizinkan mahasiswa Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Cohort-8 atas nama Siti Mawaddah Palamani NIM. 120190102013, untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul "*Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi (Studi Neo-Imperialisme China dalam Kerjasama Belt and Road Initiatives)*".
3. Mohon konfirmasi waktu, tempat pelaksanaan wawancara dan pemberian kuisisioner. *Contact Person*: e-mail: wadapalamani97@gmail.com dan HP. 085156713974.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

s.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerjasama dan Kolaborasi Unhan



Benny Rijanto Rudy S., M.B.A.
Laksamana Muda TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Telp/Fax. 021 - 87951555



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : BJ/2001 /XI/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 25 November 2020

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Strategi
Pertahanan Kementerian
Pertahanan RI
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, berkenan mengizinkan mahasiswa Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Cohort-8 atas nama Siti Mawaddah Palamani NIM. 120190102013, untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul "*Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi (Studi Neo-Imperialisme China dalam Kerjasama Belt and Road Initiatives)*".
3. Mohon konfirmasi waktu, tempat pelaksanaan wawancara dan pemberian kuisisioner. *Contact Person*: e-mail: wadapalamani97@gmail.com dan HP. 085156713974.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

s.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerjasama dan Kolaborasi Unhan



Benny Rijanto Rudy S., M.B.A.
Laksamana Muda TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Telp/Fax. 021 - 87951555

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

**STRATEGI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA DALAM MENGHADAPI
ANCAMAN ASIMETRIS BIDANG EKONOMI (STUDI NEO-IMPERIALISME
CHINA DALAM KERJA SAMA *BELT AND ROAD INITIATIVE*)**

No.	Teori / Konsep	Pertanyaan
1.	Strategi	<p>1. Bagaimana pandangan narasumber mengenai strategi China dalam kerja sama <i>Belt and Road Initiatives</i> ini? Baik dalam lingkup dunia maupun di Indonesia pada khususnya.</p> <p>2. Menurut pendapat narasumber, apakah strategi <i>business to business</i> yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir resiko '<i>debt trap</i>' dalam kerja sama BRI ini sudah tepat?</p> <p>3. Menurut pendapat narasumber, <i>contingency plan</i> seperti apa yang dibutuhkan pemerintah jikalau Indonesia gagal menghindari jebakan hutang dari BRI China ini meskipun telah menerapkan skema <i>B to B</i>?</p>
2.	Pertahanan	<p>1. Apakah kerja sama BRI ini dapat mengganggu kedaulatan negara dan stabilitas pertahanan di Indonesia?</p> <p>2. Menurut pandangan narasumber,</p>

		<p>jika kerja sama BRI ini merupakan sebuah ancaman, sektor atau bidang apa yang paling <i>vulnerable</i> atau paling terpengaruh dengan ancaman dari kerja sama ini?</p>
3.	Ancaman	<p>1. Menurut pendapat narasumber, apakah kerja sama Belt and Road Initiative ini memiliki potensi untuk menjadi ancaman bagi negara Indonesia?</p> <p>2. Hal apa saja yang dapat menjadi indikator bahwa kerja sama BRI ini dapat menjadi ancaman bagi negara Indonesia?</p>
4.	Neo – Imperialisme	<p>1. Menurut pandangan narasumber, apakah kerja sama BRI ini mengandung unsur Neo-Imperialisme? Jika ya, mohon penjelasannya.</p> <p>2. Bentuk Neo-Imperialisme seperti apa yang terdapat dalam kerja sama BRI, ini khususnya di Indonesia?</p>
5.	Peperangan Asimetris	<p>1. Menurut pendapat narasumber, apakah kerja sama BRI ini dapat dikategorikan sebagai perang asimetris atau ancaman asimetris?</p> <p>2. Menurut pendapat narasumber,</p>

		<p>bagaimana kerja sama BRI ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan hegemoni China di dunia melalui cara yang asimetris (dengan adanya ketimpangan kekuasaan)?</p> <p>3. Sisi asimetris mana yang paling terlihat dalam kerja sama BRI China ini? Khususnya di Indonesia.</p>
--	--	--

LAMPIRAN 3

MOU BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) -CHINA DAN GLOBAL MARITIME FULCRUM (GMF) – INDONESIA



LAMPIRAN 4**DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN**

Informan : Dr. Yono Reksoprodjo
Jabatan : Dosen Universitas Pertahanan
Hari, Tanggal : Jumat, 4 Desember 2020
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Menara Duta It 3



DOKUMENTASI WAWANCARA

Informan : Laksdya (Purn) TNI Dr. Desi Albert Mamahit
Jabatan : Ketua *Indonesia Research Development International* (IRDI)
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Desember 2020
Waktu : 20.00 WIB
Tempat : Via Zoom



DOKUMENTASI WAWANCARA

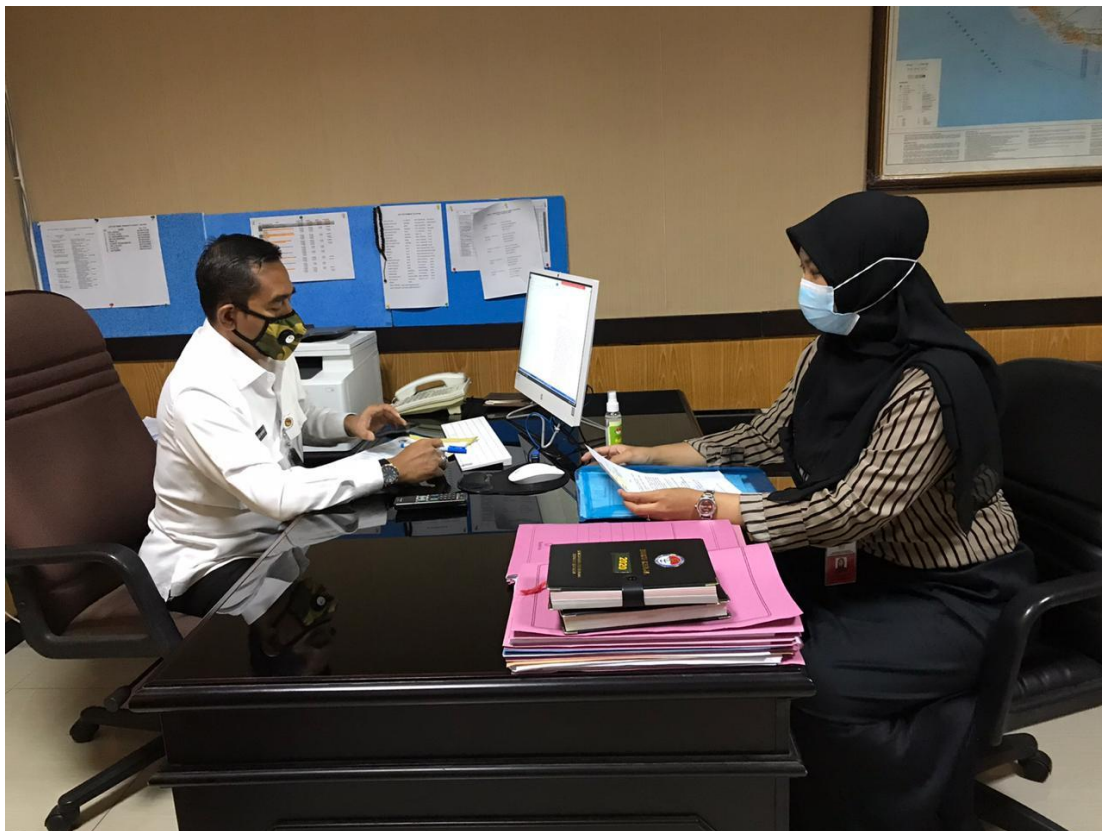
Informan : Kol. Adm Agung Karyanto S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Sun Jaksarhaneg - Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan

Hari, Tanggal : Senin, 23 Desember 2020

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Direktorat Kebijakan dan Strategi Pertahanan,
Direktorai Jendral Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI



DOKUMENTASI WAWANCARA

Informan : Letkol. Inf Kurniawan Firmuzi S, S.E
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bidang Diplomasi Pertahanan
– Direktorat Kerja sama Internasional
Hari, Tanggal : Senin, 23 Desember 2020
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Direktorat Kerja sama Internasional Pertahanan,
Direktorai Jendral Strategi Pertahanan, Kementerian
Pertahanan RI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



Siti Mawaddah Palamani lahir di Jakarta pada tanggal 13 November 1997 anak ke-1 dari pasangan Bapak Ramlan Palamani dan Ibu Yusmaniar. Menyelesaikan pendidikan SD di SDN 01 Parung Bingung, lulus tahun 2008, SMP di SMP Negeri 1 Dumai, lulus tahun 2011, SMA di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru, lulus tahun 2014, Sarjana (S1) di Universitas Riau lulus tahun 2014 dan pada tahun 2019 melanjutkan program Magister (S2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Pertahanan. Peneliti mengawali karir sebagai Guru di Sekolah Dasar Montessori Community School pada tahun 2018-2019 dan Tutor Bahasa Inggris di English Central pada tahun 2018-2019.

Karya Tulis yang pernah ditulis yaitu Skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana (S1) di Universitas Riau, FISIP, Jurusan Hubungan Internasional dengan judul penelitian "*Kepentingan Rusia dalam Kerjasama BRICS (Brazil, Rusia, India, China, and South Africa)*".